

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



RENCANA STRATEGIS

20
25

20
29

BALAI BESAR POM
DI SEMARANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.(Epid)
19660909 199303 2 002
Kepala Balai Besar POM di Semarang

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Semarang tahun 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Semarang untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang berisi upaya-upaya yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan, indikator, dan target. Balai Besar POM di Semarang bertujuan untuk melindungi kesehatan

masyarakat melalui Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu di Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) BBPOM di Semarang disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dengan memperhatikan struktur organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Semarang sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Sesuai dengan RPJMN 2025 – 2029 terdapat 8 program prioritas nasional, salah satunya yaitu “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kestaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas”. Salah satu program andalan yang dirancang untuk mendukung agenda tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis.

Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan nutrisi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga memiliki korelasi erat dengan peningkatan kualitas SDM Indonesia dan juga pemberdayaan ekonomi di daerah dengan akumulasi perputaran uang beredar di daerah dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BBPOM di

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang

Semarang pada tahun 2025-2029 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional.

Menghadapi tantangan tersebut, BBPOM di Semarang menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan premarket, postmarket, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Renstra BBPOM di Semarang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan strategi, serta program dan kegiatan Balai Besar POM di Semarang. Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BBPOM di Semarang Tahun 2025-2029 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BBPOM di Semarang terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra BBPOM di Semarang Tahun 2025-2029. Dalam kesempatan ini juga, Kami ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkarya dan bekerjasama dalam kemitraan yang

sinergi dalam kerangka pengawasan Obat dan Makanan untuk melindungi kesehatan masyarakat, demi tercapainya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

KEPALA BALAI BESAR POM DI SEMARANG



RUSTYAWATI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
SK KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG NOMOR HK.02.02.9A.12.25.131 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TAHUN 2025-2029	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.1.1 Tugas dan Fungsi Badan POM	2
1.1.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Badan POM	3
1.1.3 Tugas dan Fungsi Balai Besar POM di Semarang.....	5
1.1.4 Struktur Organisasi dan Sumber Daya BBPOM di Semarang.....	9
1.1.5 Capaian Kinerja Renstra Balai Besar POM di SemarangTahun 2020- 2024	14
1.1.6 Aspirasi Stakeholder	34
1.2 Potensi dan Permasalahan	39
1.2.1 Kekuatan (Strength).....	40
1.2.2 Kelemahan (Weakness)	50
1.2.3 Peluang (Opportunity).....	53
1.2.4 Ancaman (Threat)	61
1.2.1 Isu Internal.....	67
1.2.2 Isu Eksternal	69
BAB II.....	79
VISI, MISI DAN TUJUAN	79

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang

BALAI BESAR POM DI SEMARANG	79
2.1 Visi.....	79
2.2 Misi.....	81
2.3 Tujuan.....	88
2.4 Sasaran Kegiatan BBPOM di Semarang	92
BAB III.....	121
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	121
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM.....	121
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Semarang.....	124
BAB IV	132
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	132
4.1 Target Kinerja.....	132
4.2 Kerangka Pendanaan	134
BAB V.....	136
PENUTUP.....	136
5.1 Kesimpulan	136
5.2 Saran	136
LAMPIRAN.....	138

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Cathment Area Balai Besar POM di Semarang, Balai POM Surakarta dan Balai POM di Banyumas.....	8
Tabel 2 Capaian Kinerja Renstra Balai Besar POM di Semarang Tahun 2020-2024	15
Tabel 3 Daftar Tim SK Pembinaan dan Koordinasi di Wilayah Balai Besar POM di Semarang.....	41
Tabel 4 Jumlah partisipan / peserta dalam kegiatan sosialisasi, KIE dan pemberdayaan Masyarakat BBPOM di Semarang Tahun 2024.....	60
Tabel 5 Indikator Tujuan 2025-2029.....	90
Tabel 6 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator.....	96
Tabel 7 Matriks Indikasi Risiko	98
Tabel 8 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi	123
Tabel 9 Target Kinerja BBPOM di Semarang	132
Tabel 10 Kerangka Pendanaan BBPOM di Semarang 2025-2029 Berdasarkan Program.....	135
Tabel 11 Kerangka Pendanaan BBPOM di Semarang 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Organisasi Badan POM	4
Gambar 2 Peta Sebaran dan Klasifikasi UPT Badan POM	4
Gambar 3 Kebutuhan Pegawai BBPOM di Semarang v.s jumlah eksisting	5
Gambar 4 Catchment Area Balai Besar POM di Semarang, Balai POM Surakarta dan Balai POM di Banyumas	9
Gambar 5 Struktur Organisasi BBPOM di Semarang.....	10
Gambar 6 Profil SDM BBPOM di Semarang.....	11
Gambar 7 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) BBPOM di Semarang 2020-2024.....	14
Gambar 8 Grafik Nilai Pencapaian SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang 2020-2024	25
Gambar 9 Grafik Nilai Pencapaian SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang 2020-2024	26
Gambar 10 Grafik Nilai Pencapaian SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang 2020-2024	27
Gambar 11 Grafik Nilai Pencapaian SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang 2020-2024.....	28
Gambar 12 Grafik Nilai Pencapaian SK5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	29
Gambar 13 Grafik Nilai Pencapaian SK6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang 2020-2024	30
Gambar 14 Grafik Nilai Pencapaian SK7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang 2020-2024	31
Gambar 15 Grafik Nilai Pencapaian SK8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	31
Gambar 16 Grafik Nilai Pencapaian Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal.....	32
Gambar 17 Grafik Nilai Pencapaian SK10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	33
Gambar 18 Grafik Nilai Pencapaian SK11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel.....	34
Gambar 19 Wordcloud dari hasil survei kepada masyarakat.....	36
Gambar 20 Klasterisasi Saran dan Masukan dari Masyarakat.....	37
Gambar 21 Wordcloud dari hasil survei kepada masyarakat di wilayah BBPOM di Semarang.....	39
Gambar 22 Indeks RB BBPOM di Semarang 2021-2024	41
Gambar 23 Capaian SKL pada BBPOM di Semarang tahun 2022 sd 2024.....	46
Gambar 24 Nilai Unit Pelayanan Publik BBPOM di Semarang tahun 2022 - 2024	49
Gambar 25 Hasil Survey SKM BBPOM di Semarang Tahun 2022-2024.....	54
Gambar 26 Jumlah Layanan Informasi dan Pengaduan BBPOM di Semarang Tahun 2022-2024	55
Gambar 27 Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi yang Diselenggarakan 2022-2024	56

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang

Gambar 28 Jumlah UMKM yang Didampingi oleh BBPOM Semarang serta telah Memenuhi Ketentuan 2022 - 2024.....	56
Gambar 29 Misi Presiden (Asta Cita).....	81

**SK KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI SEMARANG NOMOR HK.02.02.9A.12.25.131
TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI
BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG
TAHUN 2025-2029**



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. 024 - 7612324 (ULPK) Fax. 024-7613633
Email : likpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

NOMOR HK.02.02.9A.12.25.131 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal : 5 Desember 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Semarang



RUSTYAWATI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang memiliki peran strategis dalam menjamin bahwa seluruh produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di wilayah kerjanya memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPOM di Semarang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah melalui proses evaluasi dan pengawasan yang ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasaran. Melalui mekanisme pengawasan pre-market dan post-market yang terintegrasi, BBPOM di Semarang berkontribusi secara nyata dalam mencegah peredaran produk berisiko tinggi, menjamin akses masyarakat terhadap produk yang aman dan bermutu, serta mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam konteks dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang, BBPOM di Semarang menghadapi berbagai tantangan, antara lain kompleksitas industri obat dan makanan, perkembangan teknologi, globalisasi perdagangan, serta perubahan pola konsumsi dan penyakit masyarakat. Kondisi tersebut menuntut BBPOM di Semarang untuk senantiasa adaptif, responsif, dan inovatif dalam melaksanakan fungsi pengawasan serta memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia guna menjawab kebutuhan pengawasan yang semakin luas dan kompleks.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Sejalan dengan hal tersebut, BBPOM di Semarang menetapkan Arah Kebijakan Tahun 2025 sebagai dasar penyusunan perencanaan jangka menengah 2025–2029 yang mendukung pelaksanaan RPJMN dan selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan POM 2025–2029. Dalam pelaksanaannya, BBPOM di Semarang berkomitmen untuk memperkuat kualitas pelayanan publik, meningkatkan efektivitas pengawasan, menegakkan hukum terhadap pelanggaran, memperbaiki tata kelola kelembagaan, serta memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, BBPOM di Semarang terus memperluas kemitraan strategis dengan pelaku usaha dalam rangka peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kegiatan pendampingan, fasilitasi, dan edukasi keamanan pangan. Upaya ini diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus menekan potensi pelanggaran dan peredaran produk obat dan makanan ilegal. Selain itu, dalam mendukung pelaksanaan program nasional *Makan Bergizi Gratis (MBG)* di

Jawa Tengah, BBPOM di Semarang berperan aktif dalam peningkatan budaya keamanan pangan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) bersama Tim Gerak Cepat (TGC) di daerah.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di daerah merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan serta mendekatkan layanan kepada masyarakat. Di Provinsi Jawa Tengah, penguatan kelembagaan tersebut diawali dengan terbitnya Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM, yang menjadi dasar pembentukan BBPOM di Semarang dan unit pengawasan di tingkat kabupaten/kota (Loka POM). Sebagai bagian dari Proyek Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2018, dua Loka POM awal dibentuk di Kota Surakarta dan Kabupaten Banyumas. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pengawasan dan cakupan wilayah, melalui Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 dan Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2025, kedua UPT tersebut telah ditingkatkan statusnya menjadi Balai POM di Surakarta dan Balai POM di Banyumas. Langkah ini mencerminkan komitmen Badan POM dalam memperluas jangkauan pengawasan, memperkuat kapasitas kelembagaan daerah, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan obat dan makanan.

Selain itu, saat ini BBPOM di Semarang juga didukung oleh proses pembentukan calon Loka POM di Kabupaten Grobogan dan Kota Tegal, yang diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan di wilayah dengan beban kerja dan potensi risiko tinggi, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Dengan jaringan UPT yang semakin merata, Badan POM melalui BBPOM di Semarang dan seluruh unit pengawasan di Jawa Tengah siap memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat, mendukung pembangunan kesehatan nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis keamanan, mutu, dan manfaat produk. Sesuai amanat tersebut, Badan POM menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang berpedoman pada RPJMN 2025–2029 dan memperhatikan perubahan lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan.

1.1.1 Tugas dan Fungsi Badan POM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM

bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Selain, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh Kementerian/Lembaga termasuk BPOM diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

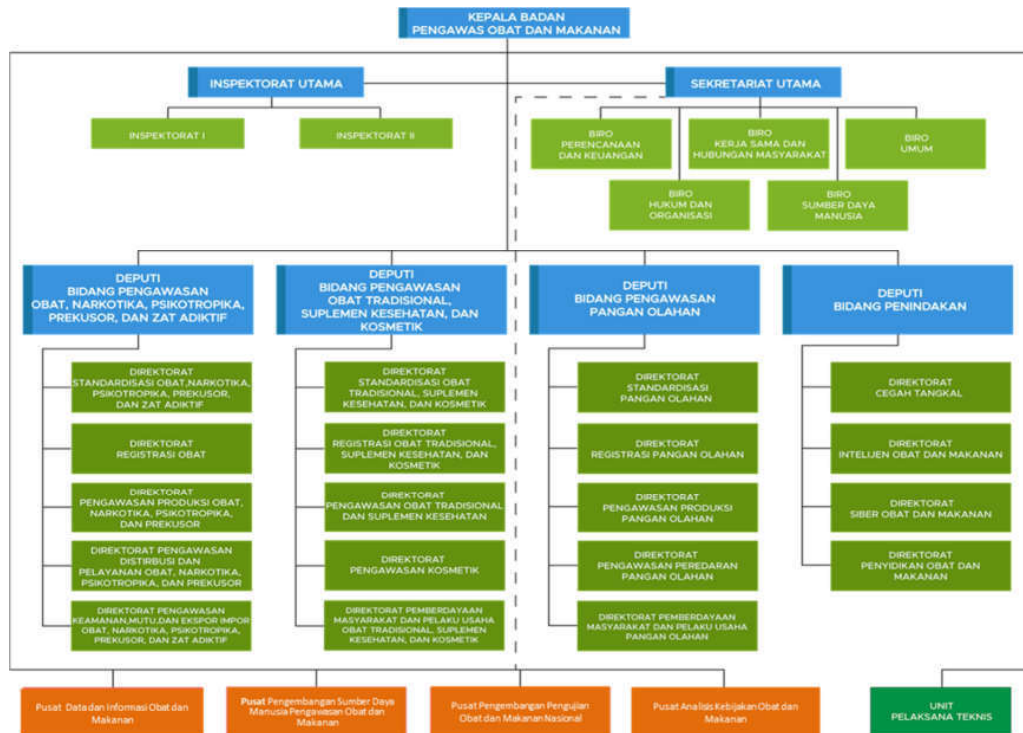
1.1.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Badan POM

A. Struktur Organisasi

Bagan organisasi Badan POM seperti pada gambar berikut:

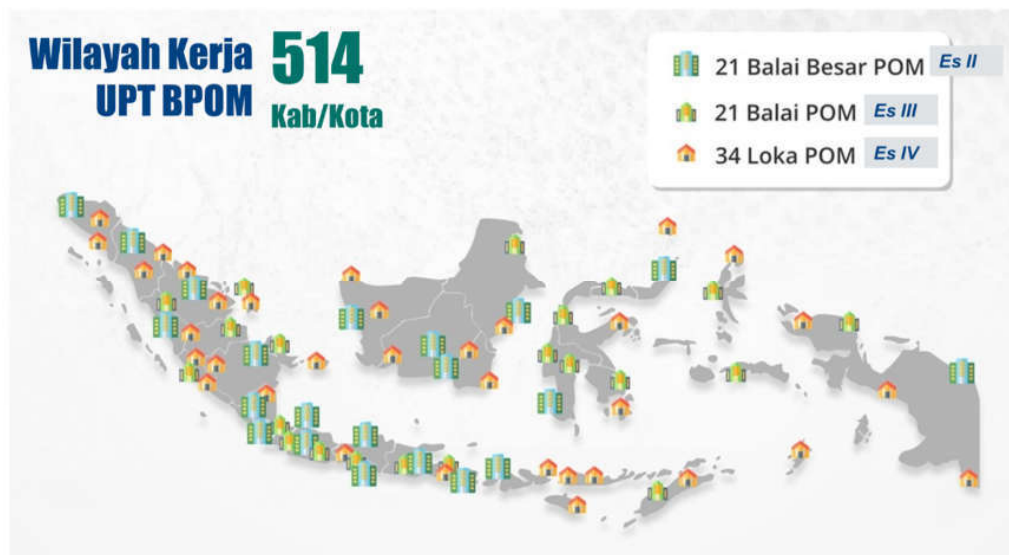
RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang



Gambar 1 Bagan Organisasi Badan POM

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional pengawasan Obat dan Makanan di daerah, BBPOM di Semarang mempunyai 76 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan wilayah kerja 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia seperti gambar di bawah ini:



Gambar 2 Peta Sebaran dan Klasifikasi UPT Badan POM

B. Sumber Daya Manusia

Dalam periode tahun 2020 - 2024, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) telah menunjukkan peran pentingnya dalam memajukan agenda pembangunan nasional di bidang kesehatan, khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, BBPOM di Semarang telah berupaya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pengawasan yang ketat terhadap produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia.

Sesuai Perpres No 80 Tahun 2017 tentang Badan POM, Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi pengawasan obat dan makanan. Pengawasan obat dan makanan merupakan upaya strategis guna mendukung pembangunan kesehatan dalam rangka melindungi bangsa Indonesia dari produk obat dan makanan yang bermutu, aman dan berkhasiat. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM perlu perkuatan SDM baik dari kualitas maupun kuantitas SDM yang memadai dengan kompetensi serta kualifikasi yang sesuai dengan tantangan pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan perhitungan kebutuhan ASN di lingkungan Badan POM Tahun 2020-2024, kebutuhan SDM Badan POM sebanyak 8.810 orang dengan jumlah pegawai eksisting saat ini 5.357 orang (*Data SIASN Per 29 Oktober 2024*). Persentase pemenuhan SDM Badan POM sampai dengan saat ini 60,81%. Masih terdapat kekurangan SDM sebanyak 3.453 orang. Beberapa strategi pemenuhan SDM telah dilakukan Badan POM diantaranya pelaksanaan seleksi terbatas dari PNS Eksternal di luar Badan POM, serta usulan CASN ke Kementerian PANRB. Pada Tahun 2024, Badan POM mendapatkan penetapan kebutuhan ASN sebanyak 1.296 formasi (781 PNS dan 515 PPPK).



Gambar 3 Kebutuhan Pegawai BBPOM di Semarang v.s jumlah eksisting

Berdasarkan data kepegawaian, Jumlah SDM Badan POM yang aktif sampai dengan Oktober 2024 sebanyak 5.357 pegawai terdiri dari 1.519 pegawai laki-laki (28%) dan 3.838 pegawai perempuan (72%). Sedangkan jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai Badan POM memiliki tingkat pendidikan D4/S1 sejumlah 2.385 pegawai (45%), diikuti Profesi sebanyak 1.448 pegawai (27%), non sarjana sebanyak 762 pegawai (14%), untuk S2 sejumlah 740 (14%), dan tingkat S3 sebanyak 22 pegawai (0,4%).

1.1.3 Tugas dan Fungsi Balai Besar POM di Semarang

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klarifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. BBPOM di Semarang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang

penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, berkedudukan di Jalan Sukun Raya No. 41 A Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Telp : (024) 7613761, 7613768, 7612328, 7612324 (ULPK), Fax (024) 7613633, Email likpomsm@yahoo.com, website www.pom.go.id

BBPOM di Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Dalam menjalankan fungsinya, BBPOM di Semarang mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan., dimana fungsi yang dijalankan meliputi:

FUNGSI BBPOM DI SEMARANG DI SEMARANG		
		8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan		9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan		10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian		11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang

4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan			12. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan			13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan			14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan		DLL	15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 19 tahun 2023 tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, terdapat 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu

1. Balai Besar POM di Semarang dengan cakupan Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Batang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang
2. Balai POM di Surakarta dengan cakupan Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri
3. Balai POM di Banyumas dengan cakupan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang

Tabel 1 Cathment Area Balai Besar POM di Semarang, Balai POM Surakarta dan Balai POM di Banyumas

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan
Wilayah Kerja BBPOM di Semarang		
1	Kota Semarang	16
2	Kota Magelang	3
3	Kota Salatiga	4
4	Kota Pekalongan	4
5	Kota Tegal	4
6	Kebumen	26
7	Purworejo	16
8	Wonosobo	15
9	Magelang	21
10	Boyolali	22
11	Klaten	26
12	Grobogan	19
13	Blora	16
14	Rembang	14
15	Pati	21
16	Kudus	9
17	Jepara	16
18	Demak	14
19	Semarang	19
20	Temanggung	20
21	Kendal	20
22	Batang	15
23	Pekalongan	19
24	Pemalang	14
25	Tegal	18
26	Brebes	17
Wilayah Kerja BPOM di Surakarta		
1	Kota Surakarta	5
2	Sukoharjo	12
3	Wonogiri	25
4	Karanganyar	17
5	Sragen	20
Wilayah Kerja BPOM di Banyumas		
1	Cilacap	24
2	Banyumas	27
3	Purbalingga	18
4	Banjarnegara	20
Total		576

Dalam melaksanakan tugasnya, BBPOM di Semarang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.



Gambar 4 Catchment Area Balai Besar POM di Semarang, Balai POM Surakarta dan Balai POM di Banyumas

1.1.4 Struktur Organisasi dan Sumber Daya BBPOM di Semarang

A. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Semarang disusun berdasarkan Peraturan BBPOM di Semarang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (BBPOM di Semarang) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi BBPOM di Semarang per Januari 2024

Struktur organisasi BBPOM di Semarang terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 5 Struktur Organisasi BBPOM di Semarang

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai Struktur Organisasi BBPOM di Semarang adalah sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas antara lain:

melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri

2. Kelompok Jabatan Fungsional

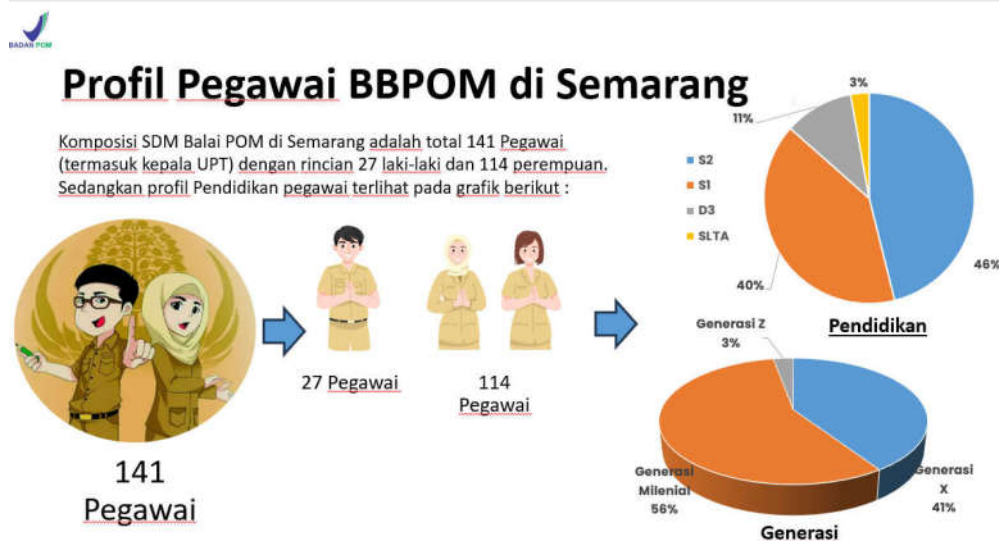
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Tim kerja terdiri atas:

- a. ketua tim; dan
- b. anggota tim.

Ketua tim berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sumber Daya

1 Sumber Daya Manusia (SDM)



Gambar 6 Profil SDM BBPOM di Semarang

Gambar tersebut menampilkan profil SDM BBPOM di Semarang. Berikut adalah narasi berdasarkan informasi yang ada:

Balai POM di Semarang memiliki total 141 pegawai, termasuk kepala UPT. Komposisi pegawai ini terdiri dari 27 laki-laki dan 114 perempuan.

Dari segi pendidikan, pegawai BBPOM di Semarang memiliki tingkat pendidikan sebagai berikut:

- 46% lulusan S2,
- 40% lulusan S1,
- 11% lulusan D3,
- 3% lulusan SLTA.

Dari segi generasi, pegawai BBPOM di Semarang terbagi menjadi:

- 56% berasal dari Generasi Milenial,
- 41% berasal dari Generasi X,
- 3% berasal dari Generasi Z.

Data ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai BBPOM di Semarang adalah perempuan, berpendidikan tinggi (S1 atau S2), dan didominasi oleh Generasi Milenial.

2 Sarana dan Prasarana

Luas Tanah dan Bangunan (m²)

Kantor Balai Besar POM Di Semarang ada di 2 (dua) lokasi yaitu:

1) Jl Madukoro Blok AA-BB No 8 Semarang.

Terdiri dari tanah dan bangunan yang status kepemilikannya atas nama Pemerintah Republik Indonesia CQ. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor sertifikat Hak Pakai no.6. Dengan luas tanah 6000 m², terdapat bangunan gedung 2 lantai di atasnya seluas 4425 m² yang pemanfaatannya saat ini untuk gudang penyimpanan barang bukti.

2) Jl Sukun Raya No 41 A Banyumanik Semarang 50264.

Terdiri dari tanah dan bangunan yang status kepemilikannya atas nama Pemerintah Republik Indonesia CQ. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor sertifikat Hak Pakai No.65. Tanah memiliki luas 9.845 m² dengan berdiri beberapa bangunan di atasnya antara lain gedung Laboratorium luas 4.752 m², gedung administrasi luas 2.612 m², gedung penyimpanan genset luas 151 m², gedung pos jaga luas 11 m², bangunan parkir kendaraan dinas roda 4 semi permanen luas 109 m², dan gazebo luas 6 m². Bangunan ini merupakan gedung baru yang dibangun secara bertahap sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 dan mulai ditempati secara penuh pada pertengahan 2017. Di alamat ini seluruh operasional Balai Besar POM di Semarang dilaksanakan, antara lain untuk fungsi perkantoran, fungsi laboratorium, fungsi pemeriksaan dan penyidikan serta pelayanan publik.

Secara umum kebutuhan terhadap luasan lahan telah terpenuhi, namun demikian saat ini masih diperlukan bangunan untuk parkir kendaraan roda 2 dan 4 baik bagi kendaraan pegawai maupun kendaraan masyarakat yang memerlukan pelayanan di kantor Balai Besar POM di Semarang.

a. Alat Pengolah Data (APD) dan Meubelair Kerja.

Untuk alat pengolah data dan *meubelair* kerja masih perlu dilengkapi terutama menggantikan barang yang telah usang, pemenuhan standar minimal sebagai kantor pelayanan publik dan pemenuhan standar minimal K3 laboratorium.

b. Rumah Dinas

Balai Besar POM Di Semarang telah memiliki rumah dinas untuk Kepala Kantor, beralamat di Jl Puri Anjasmoro Blok N 3/33 Semarang yang sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia CQ. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Hak Pakai Nomor 1. Memiliki luas tanah 206 m² dan bangunan 1 lantai seluas 99 m².

c. Penerangan

Sumber penerangan yang digunakan Gedung Balai Besar POM di Semarang adalah PLN dan Generator:

❖ □ PLN	:	83 KVA (Gedung Lama)
		163 KVA dan 555 KVA (Gedung Baru)
❖ □ Generator	:	250 KVA (Gedung Baru)
		100 KVA (Gedung Baru)

d. Sarana Komunikasi Sarana komunikasi yang dipakai pada gedung Balai Besar POM di Semarang :

❖ □ Telepon	:	(024) 7612324
❖ □ Faksimile	:	(024) 7613633
❖ □ Email	:	BBPOM.di.Semarang_semarang@pom.go.id
❖ □ Website	:	www.pom.go.id

e. Sumber Air

Sumber air yang digunakan di Balai Besar POM Semarang pada saat ini adalah air tanah dengan kedalaman 125 m dengan pemakaian rata-rata 800 m³ per bulan.

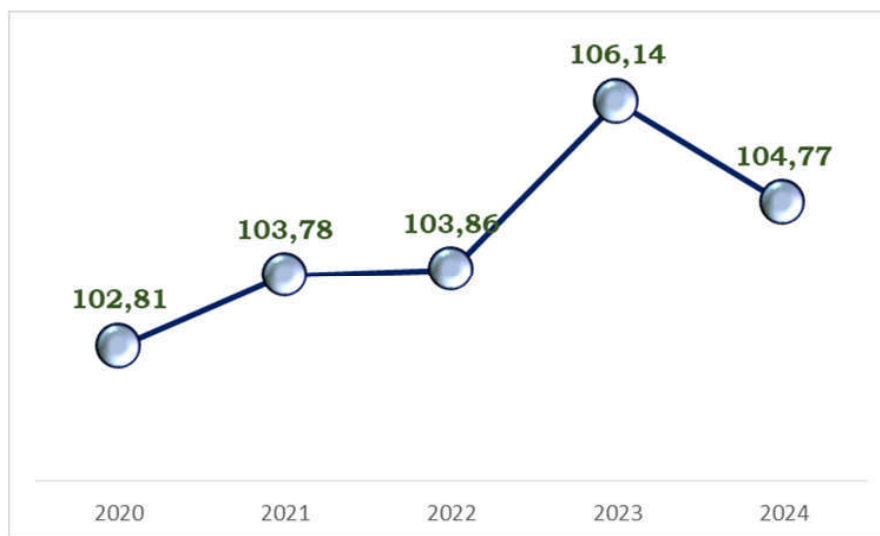
f. Kendaraan

Kendaraan yang layak pakai di Balai Besar POM Di Semarang berjumlah 8 Unit, dengan rincian sebagai berikut:

❖ □ Kendaraan Oprasional Kantor	: 3 Unit
❖ □ Kendaraan Mobling	: 2 Unit
❖ □ Mobil BAP Penyidikan	: 1 Unit
❖ □ Kendaraan Roda 2	: 2 Unit

1.1.5 Capaian Kinerja Renstra Balai Besar POM di Semarang Tahun 2020-2024

Selama periode 2020-2024, nilai kinerja/Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) BBPOM di Semarang bergerak naik setiap tahunnya. BBPOM di Semarang selalu berupaya penuh untuk perbaiki capaian kinerjanya. Hal ini terlihat NPS yang meningkat setiap tahunnya. Sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



Gambar 7 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) BBPOM di Semarang 2020-2024

Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja setiap sasaran dan indicator kinerja akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2 Capaian Kinerja Renstra Balai Besar POM di Semarang Tahun 2020-2024

No.	IKU	2020			2021			2022		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang										
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,00	84,62	94,02	90,50	86,67	95,77	91,00	87,23	95,86
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	74,34	95,31	80,00	90,96	113,70	82,00	92,15	112,38
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	78,45	88,15	89,20	74,12	83,09	89,40	77,76	86,98
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00	77,58	106,27	77,50	84,80	109,42	79,00	78,66	99,57
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	94,00	58,46	62,19	95,00	83,09	87,46
SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang										
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang	72,00	71,91	99,88	75,00	87,05	116,07	78,00	78,85	101,09
SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang										
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82,00	86,03	104,91	87,10	92,10	105,74	88,20	94,50	107,14
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja	71,00	69,30	97,61	70,73	72,56	102,59	72,16	75,08	104,05

No.	IKU	2020			2021			2022		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
	Pengawasan Obat dan Makanan									
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang	88,00	88,11	100,13	90,00	91,84	102,04	91,00	94,18	103,49
SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang										
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	82,98	95,38	89,00	100,00	112,36	91,00	100,00	109,89
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,60	79,02	101,83	78,00	72,77	93,29	80,00	87,66	109,58
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	99,09	116,58	99,00	99,79	100,80	99,20	99,68	100,48
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46,00	47,91	104,15	51,00	53,56	105,02	53,00	54,96	103,70
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	58,66	106,65	70,00	74,81	106,87	71,00	71,52	100,73
15	Indeks Pelayanan Publik	3,51	4,14	117,95	4,35	4,37	100,46	4,45	4,65	104,49
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-	-	77,00	86,87	112,82

No.	IKU	2020			2021			2022		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
17	Persentase keterlibatan BBPOM di Semarang dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SK5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang										
18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	84,31	91,38	108,39	91,50	92,50	101,09	93,00	93,38	100,41
19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16,00	18,00	112,50	41,00	45,00	109,76	79,00	87,00	110,13
20	Jumlah desa pangan aman	6,00	6,00	100,00	19,00	19,00	100,00	28,00	28,00	100,00
21	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3,00	3,00	100,00	10,00	10,00	100,00	16,00	16,00	100,00
SK6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang										
22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92,00	100,00	108,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90,00	100,00	111,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SK7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang										
24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70,00	71,39	101,99	72,50	81,40	112,28	75,00	92,00	122,67
SK8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal										

RENCANA STRATEGIS 2025-2029
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Semarang

No.	IKU	2020			2021			2022		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
25	Indeks RB BBPOM di Semarang	91,00	84,76	93,14	86,00	85,97	99,97	87,00	95,85	110,17
26	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	81,00	77,49	95,67	78,50	79,16	100,84	79,50	80,83	101,67
27	Nilai Pengelolaan Kearsipan									
SK9. Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal										
28	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	77,00	85,57	111,13	85,60	81,57	95,29	85,80	85,79	99,99
SK10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan										
29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00	75,20	91,71	79,00	81,17	102,75	84,00	86,60	103,10
30	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	1,51	1,82	120,53	2,00	2,50	125,00	2,25	3,00	133,33
SK11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel										
31	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	94,00	90,97	96,78	92,90	90,62	97,55	93,50	90,71	97,02
32	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang	90,00	100,00	111,11	91,00	100,00	109,89	-	-	-
33	Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Persentase realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	IKU	2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang							
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	95,36	104,21	95,50	93,65	98,06
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	91,54	108,97	92,00	89,31	97,08
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,60	90,99	101,55	91,00	85,69	94.16
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,00	81,05	100,06	83,00	88,46	106,58
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	94,06	104,51	91,00	100,00	109,89
SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang							
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang	81,00	80,56	99,46	84,00	86,22	102,64
SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang							
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,30	94,70	106,05	95,00	96,21	101,27
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73,58	75,99	103,28	76,90	79,88	103,88
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang	92,00	94,97	103,23	95,50	96,40	100,94

No.	IKU	2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang							
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	100,00	107,53	100,00	100,00	100,00
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00	84,74	102,09	85,00	85,69	100,82
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,40	99,77	100,37	99,80	99,87	100,07
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	62,17	113,04	62,50	64,41	103,06
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,00	78,71	109,32	79,00	80,30	101,65
15	Indeks Pelayanan Publik	4,51	4,62	102,44	4,70	4,92	104,68
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	100,00	126,58	89,00	100,00	112,36
17	Persentase keterlibatan BBPOM di Semarang dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	95,00	96,07	101.13
SK5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang							
18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,00	94,60	100,64	95,50	96,02	100,54
19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	119,00	123,00	103,36	153,00	153,00	100,00

No.	IKU	2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)
20	Jumlah desa pangan aman	37,00	37,00	100,00	46,00	46,00	100,00
21	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	21,00	21,00	100,00	27,00	27,00	100,00
SK6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang							
22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	120,00	100,00	100,00	100,00
23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	120,00	100,00	100,00	100,00
SK7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang							
24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78,00	84,06	107,76	88,00	94,32	107,18
SK8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal							
25	Indeks RB BBPOM di Semarang	88,00	95,26	108,25	96,26	92,41	96,00
26	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	80,50	80,56	100,07	84,07	81,63	97,10
27	Nilai Pengelolaan Kearsipan				94,81	95,18	100,39
SK9. Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal							
28	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	86,00	91,17	106,01	91,18	87,77	96,26
SK10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan							
29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89,00	88,39	99,31	88,84	91,44	102,93
30	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2,50	3,00	120,00	3,00	3,00	100,00
SK11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel							
31	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	94,70	91,38	96,50	90,55	91,37	100,90

No.	IKU	2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)
32	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang	-	-	-	-	-	-
33	Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	92,96	95,00	102,19
34	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	-	-	-	81,00	98,71	121,86
35	Persentase realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	60,00	58,40	97,33

Pengukuran kinerja BBPOM di Semarang mengacu pada Sasaran Strategis yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Semarang dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BBPOM di Semarang. Dalam penyusunan sasaran strategis, BBPOM di Semarang menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Pencapaian sasaran strategis, indikator, dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Sampel Makanan yang diperiksa Sesuai Standar

Produk pangan yang beredar semakin banyak kategori dan jenisnya. Semua produk tersebut beredar di sarana distribusi baik retail modern maupun sarana pengecer tradisional. Semua Produk itu dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk menjamin keamanan dan mutu dari Produk Pangan yang beredar perlu diadakan pengawasan secara intensif. Produk pangan disampling dan diuji menggunakan parameter uji kritis. Tidak semua produk pangan yang beredar diuji. Pengujian berdasarkan Prioritas Sampling yang telah ditetapkan oleh Badan POM.

Tahapan Pelaksanaan Balai Besar POM di Semarang untuk mencapai indikator kinerja yang diharapkan terdiri dari:

- 1.1. Penyusunan Perencanaan Sampling
- 1.2. Pengadaan Sampel
- 1.3. Pengujian Laboratorium
- 1.4. Evaluasi Pengujian

2. Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa

Pemeriksaan sarana produksi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, dan pangan ini dilakukan dalam rangka pengawasan implementasi dan pemenuhan CPOB, CPMB, CPKB, CPOTB, dan CPPB IRT.

3. Sarana Distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan yang diperiksa

Pemeriksaan sarana distribusi Obat, Napza, Prekursor, OT dan Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Makanan dan Bahan Berbahaya ini dilakukan dalam rangka pengawasan implementasi dan pemenuhan Cara Distribusi yang Baik.

4. Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan

Dukungan teknis dalam Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan terdiri dari beberapa tahapan pelaksanaan, meliputi :

- a) Pertemuan perkuatan pemantapan operasi penyidikan obat dan makanan
- b) Pertemuan peningkatan kinerja, profesionalisme dan koordinasi
- c) Pendidikan dan pelatihan pembentukan PPNS Badan POM
- d) Pendidikan dan pelatihan dasar intelijen
- e) Pertemuan koordinasi lintas sektor
- f) Pertemuan dan evaluasi satuan tugas pemberantasan obat dan makanan ilegal
- g) Peningkatan kompetensi penyidik
- h) Pemusnahan produk ilegal

5. Laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai *good laboratory practice*

Kegiatan Laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai *good laboratory practice* terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, meliputi :

- a) Peningkatan Kemampuan Fungsi / Kapasitas / Teknis Laboratorium
- b) Evaluasi/Konsultasi/Koordinasi Untuk Pengelolaan dan Peningkatan
- c) Peningkatan Kapasitas, Perencanaan Dan Kepegawaian

6. Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan

- a) Investigasi Awal Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan (Dalam Kota).
- b) Investigasi Awal Pelanggaran di Bidang Obat Dan Makanan (Luar Kota).
- c) Penyidikan Tindak Pidana Di Ibu Kota Propinsi (Dalam Kota)
- d) Penyidikan Tindak Pidana Di luar Ibu Kota Propinsi (Luar Kota).
- e) Pasca Penyidikan :

7. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa

Tahapan Pelaksanaan Balai Besar POM di Semarang untuk mencapai indikator kinerja yang diharapkan terdiri dari beberapa komponen dan sub komponen kegiatan antara lain :

- a) Penyusunan Perencanaan Sampling
- b) Pengadaan Sampel
- c) Pengujian Laboratorium
- d) Evaluasi Pengujian

8. Sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Tahapan pelaksanaan/Komponen Input:

- a) Advokasi Lintas Sektor PJAS
- b) Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Sekolah
- c) Bimtek Keamanan Pangan Untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
- d) Pemberian Paket Edukasi
- e) Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah
- f) Sertifikasi Sekolah Dengan PJAS Aman

9. Desa Pangan Aman

Tahapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas sebagai berikut:

- a) Desa Pangan Aman Baru
 - 1) Advokasi Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor
 - 2) Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa
 - 3) Bimtek Komunitas Desa
 - 4) Fasilitasi Desa Pangan Aman
 - 5) Intensifikasi Intervensi Keamanan Pangan
 - 6) Monitoring dan Evaluasi Program

10. Pasar yang diintervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas

Tahapan kegiatan pasar yang diintervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas meliputi :

- a) Survei Pasar
- b) Advokasi Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor
- c) Bimbingan Teknis Komunitas Pasar
- d) Kampanye dan Penyuluhan Komunitas Pasar
- e) Pengawasan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang



Balai Besar POM di Semarang telah **berhasil** mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS): 101,15 % di tahun 2024. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja utama yaitu:

Gambar 8 Grafik Nilai Pencapaian SK1.
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi
syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang
2020-2024

- IKSK 1. *Persentase Obat yang memenuhi syarat*
IKSK 2. *Persentase Makanan yang memenuhi syarat*
IKSK 3. *Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan*
IKSK 4. *Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan*
IKSK 5. *Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat*

Upaya yang telah dilakukan selama 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan intensitas dan kualitas sampling serta pengujian laboratorium, terutama pada komoditas dengan risiko tinggi, sehingga hasil pengawasan semakin akurat dan mampu menggambarkan kondisi keamanan produk di lapangan.
2. Penguatan pembinaan kepada pelaku usaha, melalui kegiatan diseminasi, konsultasi teknis, dan pendampingan pemenuhan CPOTB/CPKB/CPPOB. Upaya ini membantu UMKM dan industri kecil menengah lebih memahami standar keamanan pangan dan obat.
3. Koordinasi lintas sektor dengan Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan instansi terkait, sehingga tindakan korektif dan penindakan terhadap produk tidak memenuhi syarat dapat dilakukan lebih cepat dan terintegrasi.
4. Peningkatan efektivitas patroli siber serta penindakan terhadap peredaran produk ilegal secara daring, termasuk penelusuran iklan/perdagangan produk berisiko yang tidak memenuhi ketentuan.

SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang



Balai Besar POM di Semarang telah **berhasil** Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 2024 : 102,64% Capaian Pencapaian sasaran strategi ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu:

Gambar 9 Grafik Nilai Pencapaian SK2.
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap
keamanan dan mutu Obat dan Makanan di
wilayah kerja BBPOM di Semarang 2020-2024

IKSK 6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang

Upaya yang telah dilakukan selama 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan intensitas komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) melalui berbagai kanal, seperti penyuluhan tatap muka, media sosial, website resmi, siaran radio, dan media luar ruang, sehingga pesan keamanan pangan dan obat lebih mudah diterima masyarakat.
2. Penguatan peran komunitas dan kader keamanan pangan, termasuk Desa Pangan Aman, Pasar Aman, Komunitas Peduli Obat dan Makanan, serta kader penyuluh PIRT, guna memperluas jangkauan edukasi berbasis masyarakat.
3. Kolaborasi lintas sektor dengan Pemda, PKK, sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat, sehingga kampanye keamanan obat dan makanan dilakukan secara masif dan menyentuh kelompok sasaran yang lebih beragam.
4. Pemanfaatan kegiatan pengawasan rutin sebagai sarana edukasi langsung, seperti memberikan laporan hasil pengawasan kepada pelaku usaha dan konsumen, disertai penjelasan mengenai risiko, cara membaca label, dan langkah pencegahan bahaya produk.

SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang



Balai Besar POM di Semarang telah **berhasil** Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 2024 : 102,03% Capaian Pencapaian sasaran strategi ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu:

Gambar 10 Grafik Nilai Pencapaian SK3.
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan
Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat
dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di
Semarang 2020-2024

IKSK 7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

IKSK 8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

IKSK 9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang

Upaya yang telah dilakukan selama 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas layanan pembinaan dan konsultasi kepada pelaku usaha, termasuk pendampingan pemenuhan persyaratan izin edar, perbaikan label, penerapan CPOTB/CPPKB/IPCPPOB dan pendampingan UMKM melalui konsultasi dan bimbingan teknis.
2. Pemantapan transparansi dan kecepatan layanan publik, seperti perbaikan SOP, penyederhanaan alur pelayanan, penerapan layanan berbasis digital, serta penyediaan informasi layanan yang mudah diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha.
3. Penguatan mekanisme penanganan pengaduan dan komunikasi risiko, termasuk tindak lanjut cepat terhadap laporan masyarakat, penyediaan kanal pengaduan yang terintegrasi, serta memberikan umpan balik yang jelas, sopan, dan solutif.
4. Membangun hubungan kemitraan yang lebih responsif dengan stakeholder, seperti asosiasi pelaku usaha, komunitas konsumen, pemerintah daerah, dan akademisi, melalui forum koordinasi, sosialisasi kebijakan, serta diskusi rutin mengenai isu pengawasan yang berkembang.

SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang



**Gambar 11 Grafik Nilai Pencapaian SK4.
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana
obat dan makanan serta pelayanan publik di
masing masing wilayah kerja BBPOM di
Semarang 2020-2024**

Balai Besar POM di Semarang telah **berhasil** Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Semarang dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 2024 : 102,97% Capaian Pencapaian sasaran strategi ini diukur dengan 8 (delapan) indikator kinerja utama yaitu:

IKSK 10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

IKSK 11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

IKSK 12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

IKSK 13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

IKSK 14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

IKSK 15. Indeks Pelayanan Publik

IKSK 16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

IKSK 17. Persentase keterlibatan BBPOM di Semarang dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Upaya yang telah dilakukan selama 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan konsistensi pemeriksaan sarana melalui penerapan *risk-based inspection*, penggunaan checklist terstandar, peningkatan kompetensi pemeriksa, serta penguatan analisis risiko untuk memastikan sarana produksi dan distribusi memenuhi ketentuan.
2. Percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan/inspeksi, termasuk penyampaian rekomendasi lebih cepat, pemantauan progres perbaikan pelaku usaha, serta koordinasi intensif dengan Pemda dan dinas terkait untuk sarana yang membutuhkan pembinaan lanjutan.

3. Perbaikan mutu pelayanan publik BBPOM, seperti digitalisasi alur layanan, peningkatan keterbukaan informasi, penerapan SOP yang lebih sederhana, serta peningkatan responsivitas terhadap permohonan layanan sertifikasi, konsultasi, dan aduan masyarakat.
4. Pendampingan dan pembinaan UMKM/IKOT secara berkala, termasuk pelatihan keamanan pangan, konsultasi penerapan CPPOB/CPPKB, pendampingan perizinan edar, serta pemeriksaan sarana produksi skala kecil agar produk lebih aman dan memenuhi ketentuan.
5. Penguatan koordinasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah untuk memastikan pengawasan sarana lebih efektif, khususnya dalam penindakan segera terhadap temuan kritis dan peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan.
6. Optimalisasi penggunaan aplikasi dan sistem informasi pengawasan, seperti BPOM Online, e-Was, Siapik, Asrot, SmartPOM, SIPT, SI MONCER, e-BPOM, e sertifikasi, esertifikasidob dan oss, untuk meningkatkan akurasi data pemeriksaan, mempercepat proses verifikasi, dan memastikan tindak lanjut tepat waktu.
7. Peningkatan kapasitas SDM dan *internal quality control*, melalui pelatihan teknis pemeriksaan, workshop regulasi terbaru, serta evaluasi rutin terhadap kualitas laporan inspeksi agar proses pengawasan semakin profesional dan seragam di seluruh wilayah kerja.

SK5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang



Gambar 12 Grafik Nilai Pencapaian SK5.
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi,
edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja
BBPOM di Semarang

Balai Besar POM di Semarang telah **berhasil** Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 2024 : 100,14% Capaian Pencapaian sasaran strategi ini diukur dengan 8 (delapan) indikator kinerja utama yaitu:

IKSK 18. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

IKSK 19. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

IKSK 20. Jumlah desa pangan aman

IKSK 21. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Upaya yang telah dilakukan selama 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Inovasi Program KIE: Meluncurkan program KIE yang inovatif dan spesifik (misalnya, program yang menyorot UMKM atau pedagang pangan siap saji).
2. KIE Tepat Sasaran: Melaksanakan edukasi yang disesuaikan untuk target spesifik, seperti program PJAS Aman di sekolah dan Desa Pangan Aman.
3. Pemanfaatan Digital: Menggunakan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi keamanan Obat dan Makanan secara lebih luas dan cepat.
4. Kolaborasi Lintas Sektor: Bekerja sama dengan pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat untuk memperluas jangkauan dan dampak edukasi.

SK6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang



Balai Besar POM di Semarang telah **berhasil** Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 2024 : 100% Capaian Pencapaian sasaran strategi ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu:

Gambar 13 Grafik Nilai Pencapaian SK6.
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang 2020-2024

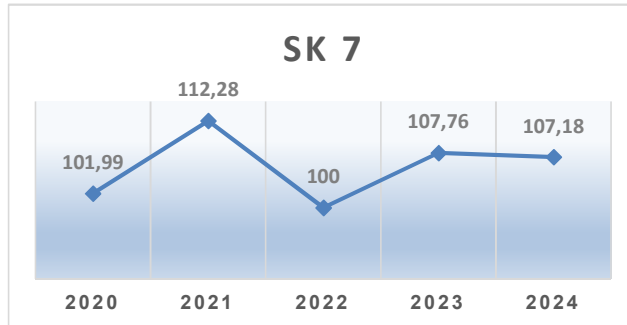
IKSK 22. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

IKSK 23. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Upaya yang telah dilakukan selama 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Sesuai Standar: Memastikan seluruh pengujian sampel Obat dan Makanan dilakukan sesuai dengan Pedoman *Sampling* dan Pengujian yang berlaku.
2. Peningkatan Mutu Laboratorium: Menerapkan sistem mutu ISO/IEC 17025 dan rutin mengikuti uji profisiensi untuk mempertahankan kompetensi pengujian.
3. Kalibrasi Peralatan: Melaksanakan program kalibrasi peralatan laboratorium secara berkala untuk menjamin keakuratan hasil pengujian.
4. Pengawasan Berbasis Risiko: Memprioritaskan pengujian sampel produk dengan risiko tinggi untuk memastikan hasil cepat dan akurat.

SK7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang



Balai Besar POM di Semarang telah **berhasil** Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 2024 : 107,18%. Capaian Pencapaian sasaran strategi ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu:

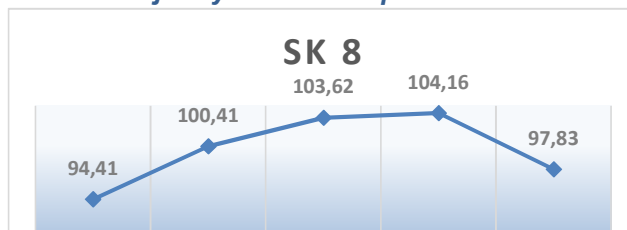
Gambar 14 Grafik Nilai Pencapaian SK7.
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan
Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di
Semarang 2020-2024

IKSK 24. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Upaya yang telah dilakukan selama 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Pengawasan dan Penindakan: Melakukan penindakan kejahatan secara efektif terhadap kasus-kasus Obat dan Makanan yang berpotensi menimbulkan kerugian besar, membahayakan kesehatan masyarakat, atau melibatkan jaringan kejahatan terorganisir.
2. Peningkatan Kompetensi Penyidik: Memastikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM memiliki kompetensi yang tinggi dalam proses penyidikan, mulai dari pengumpulan bukti hingga pelimpahan kasus ke Kejaksaan.
3. Sinergi Penegakan Hukum: Membangun kerja sama yang erat dengan aparat penegak hukum lain, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan, untuk memastikan proses hukum berjalan lancar dan memberikan efek jera yang optimal.

SK8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal



Gambar 15 Grafik Nilai Pencapaian SK8.
Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di
Semarang yang optimal

Balai Besar POM di Semarang telah **berhasil** Mewujudkan tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal di Semarang dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 2024 : 97,83%. Capaian Pencapaian sasaran strategi ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu:

IKSK 25. Indeks RB BBPOM di Semarang

IKSK 26. Nilai AKIP BBPOM di Semarang

IKSK 27. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Upaya yang telah dilakukan selama 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Reformasi Birokrasi: Menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi, termasuk penyederhanaan prosedur layanan dan peningkatan akuntabilitas.
2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja: Berupaya mencapai nilai tinggi dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terukur dan efisien.
3. Optimalisasi Pengelolaan Arsip: Melakukan pengelolaan kearsipan yang sesuai dengan kaidah dan standar yang berlaku untuk mendukung transparansi dan efisiensi administrasi pemerintahan.

SK9. Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal



Balai Besar POM di Semarang telah **berhasil** Mewujudkan SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 2024 : 96,26. Capaian Pencapaian sasaran strategi ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu:

Gambar 16 Grafik Nilai Pencapaian Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal

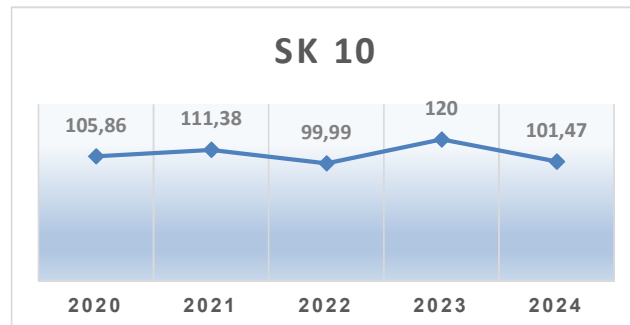
IKSK 28. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang

Upaya yang telah dilakukan selama 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kompetensi: Melakukan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi ASN BBPOM untuk meningkatkan profesionalitas dan keahlian teknis mereka.

2. Manajemen Kinerja: Menerapkan sistem manajemen kinerja yang objektif dan terukur untuk memastikan setiap ASN memberikan kontribusi optimal sesuai target organisasi.
3. Penguatan Integritas dan Etika: Mendorong peningkatan integritas, disiplin, dan etika kerja ASN sebagai bagian dari upaya peningkatan Indeks Profesionalitas.

SK10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan



Balai Besar POM di Semarang telah **berhasil** Menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 2024 : 101,47% Capaian Pencapaian sasaran strategi ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu:

Gambar 17 Grafik Nilai Pencapaian SK10.
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

IKSK 29. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

IKSK 30. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal

Upaya yang telah dilakukan selama 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Standar GLP: Melaksanakan pemenuhan standar Good Laboratory Practice (GLP) secara konsisten untuk memastikan hasil pengujian laboratorium terjamin mutunya.
2. Optimalisasi Pengelolaan Data: Mengembangkan dan menerapkan sistem untuk pengelolaan data dan informasi pengawasan yang efektif dan optimal
3. Infrastruktur Laboratorium: Memastikan sarana, prasarana, dan peralatan laboratorium selalu terawat, berfungsi baik, dan terkalibrasi untuk mendukung pengujian.

SK11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel



Balai Besar POM di Semarang telah **berhasil** Mengelola Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 2024 : 105,11. Capaian Pencapaian sasaran strategi ini diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja utama yaitu:

Gambar 18 Grafik Nilai Pencapaian SK11.
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang
secara Akuntabel

IKSK 31. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang

IKSK 32. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang

IKSK 33. Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

IKSK 34. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

IKSK 35. Persentase realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri

Upaya yang telah dilakukan selama 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Anggaran Tepat Sasaran: Melaksanakan penyerapan dan pemanfaatan anggaran untuk mencapai Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang optimal.
2. Pengadaan Barang dan Jasa Berkualitas: Menerapkan proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan berkualitas.
3. Optimalisasi BMN: Melakukan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara tertib dan bertanggung jawab.
4. Prioritas Produk Dalam Negeri: Mendorong dan mengoptimalkan persentase realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri dalam setiap pengadaan barang dan jasa

1.1.6 Aspirasi Stakeholder

Dalam menghadapi tantangan masa depan, BPOM memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu BPOM dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan BPOM untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi.

Pengawasan obat dan makanan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, BPOM dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang emergent, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Aspirasi masyarakat juga membantu BPOM dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi obat dan makanan.

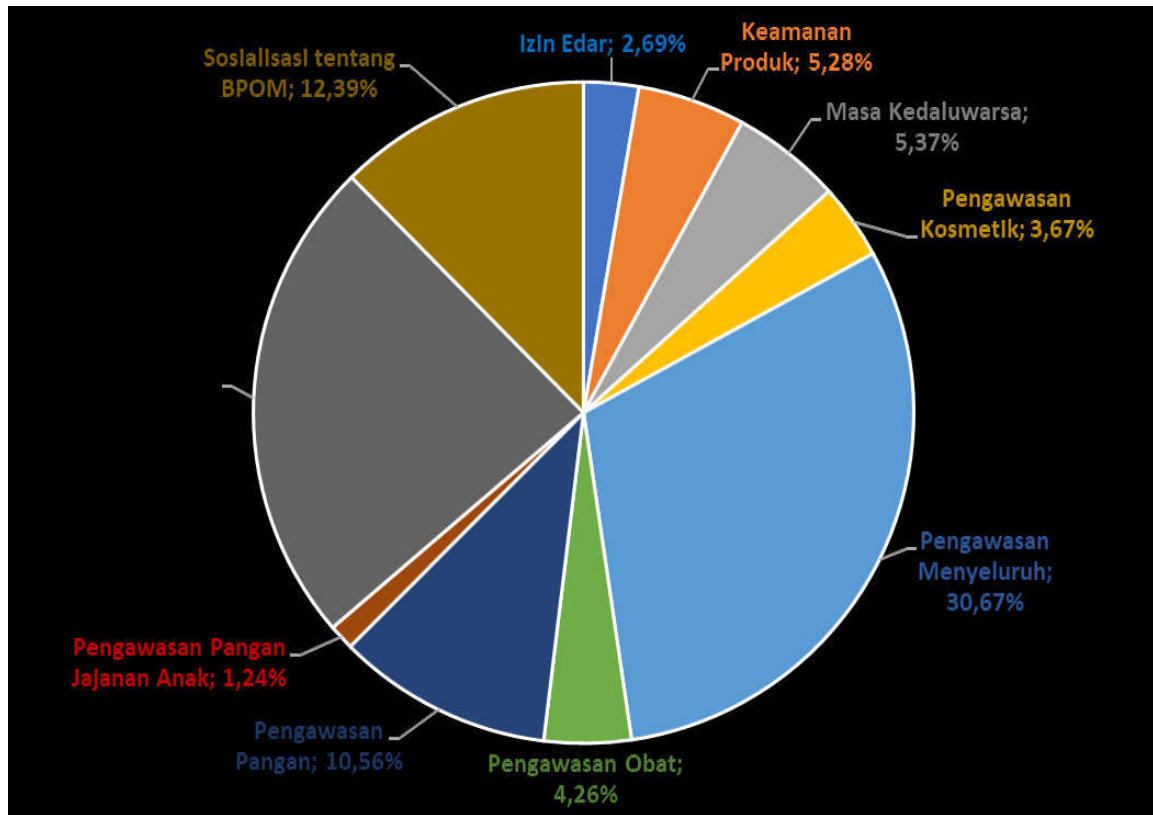
Hal ini penting agar BPOM dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penjangkaran aspirasi ini. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana

Strategis BPOM 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan obat dan makanan di Indonesia tidak hanya memenuhi standar global, tapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara khusus.

Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subyek dan sasaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sistem pengawasan Obat dan Makanan secara global bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi Obat dan Makanan yang aman bermutu dan berdaya saing. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Terkait hal ini aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh BPOM dalam menyusun perencanaan program pengawasan Obat dan Makanan. BPOM menjangkari feedback dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu serta Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BPOM Tahun 2024. Survei ini dilakukan langsung kepada responden masyarakat di seluruh Indonesia di 38 Provinsi. Berdasarkan hasil survei tersebut, telah dilakukan analisis data kualitatif atas feedback yang diberikan oleh masyarakat. Berikut di bawah ini adalah hasil analisis wordcloud dari feedback dan saran masukan dari masyarakat.



36



Gambar 20 Klasterisasi Saran dan Masukan dari Masyarakat.

Berdasarkan hasil klasterisasi saran dan analisis word cloud diatas dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

1. BPOM dapat melakukan pengawasan secara lebih menyeluruh terutama di wilayah rural.
2. BPOM diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.
3. BPOM agar secara intensif memberikan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.

Selain ketiga poin tersebut, pada kegiatan yang melibatkan diskusi dengan pakar gender dan organisasi masyarakat dengan kebutuhan khusus, BPOM diharapkan dapat lebih memperhatikan permasalahan, kebutuhan dan pengalaman dari setiap elemen masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak, lanjut usia, kelompok rentan secara fisik (termasuk disabilitas), sosial dan ekonomi serta melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha denganimbang gender.

Dalam menghadapi tantangan pengawasan obat dan makanan yang semakin kompleks, BBPOM di Semarang sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM berkomitmen untuk terus memperkuat strategi pengawasan yang responsif dan inklusif. Dinamika lingkungan strategis yang dipengaruhi oleh faktor global, kemajuan teknologi, serta perubahan sosial ekonomi masyarakat menuntut adanya pendekatan baru dalam tata kelola pengawasan.

Selaras dengan arah kebijakan BPOM pusat, BBPOM di Semarang menempatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat sebagai fondasi utama dalam penyusunan Rencana Strategis 2025–2029. Aspirasi ini dikumpulkan melalui berbagai saluran, termasuk Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu serta Kepuasan atas Kinerja BPOM Tahun 2024 yang menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Survei ini menjadi landasan penting dalam memahami persepsi publik terhadap efektivitas pengawasan, kebutuhan informasi, dan harapan masyarakat terhadap layanan BBPOM.

Hasil analisis kualitatif dari survei tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sangat menyoroti pentingnya peningkatan kinerja pengawasan produk, sosialisasi dan edukasi, serta pengawasan pangan yang lebih menyeluruh. Kata-kata seperti “kinerja BPOM”, “pengawasan produk”, dan “sosialisasi ke masyarakat” menjadi frasa dominan dalam umpan balik responden.

Sebagai respon konkret, BBPOM di Semarang mengambil langkah untuk:

- Mengembangkan metode pengawasan berbasis risiko yang adaptif,
- Memperluas jangkauan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE),
- Meningkatkan pengawasan post-market melalui inovasi digital dan pelibatan komunitas lokal,
- Mendorong masyarakat menjadi konsumen yang cerdas melalui peningkatan literasi produk obat dan makanan.

BBPOM di Semarang menyadari bahwa pengawasan bukanlah proses statis, tetapi harus terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, dalam menyusun strategi ke depan, BBPOM bertekad menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pengawasan, tetapi juga sebagai subjek aktif dan mitra strategis dalam sistem pengawasan obat dan makanan.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan dinamika lingkungan strategis, BBPOM di Semarang siap membangun sistem pengawasan yang tidak hanya memenuhi standar global, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dan kondisi lokal masyarakat Jawa Tengah. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 21 Wordcloud dari hasil survei kepada masyarakat di wilayah BBPOM di Semarang

1.2 Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan BBPOM di Semarang dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BBPOM di Semarang dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2025 - 2029.

Masa depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, BBPOM di Semarang dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi BBPOM di Semarang dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Mengintegrasikan potensi dan menanggulangi permasalahan dalam konteks agenda pembangunan nasional menjadi prioritas dalam Rencana Strategis BBPOM di Semarang 2025-2029.

Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, BBPOM di Semarang diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan produk obat dan makanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu BBPOM di Semarang tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

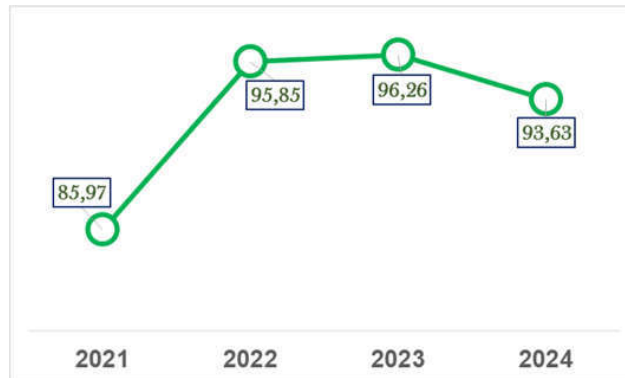
Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), BBPOM di Semarang menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh BBPOM di Semarang periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal BBPOM di Semarang, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

1.2.1 Kekuatan (Strength)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki BBPOM di Semarang, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan BBPOM di Semarang keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi BBPOM di Semarang di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh BBPOM di Semarang, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

a. Kinerja Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Internal yang Kuat dan Terukur

BPOM berkomitmen melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan melalui tata kelola birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing guna mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi (RB). Pelaksanaan RB secara konsisten dilaksanakan terhadap RB General dan RB Tematik. Hal ini dibuktikan dengan capaian Indeks RB BPOM dalam periode Renstra 2020-2024 yang terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2024 dengan nilai 93,63 dengan kategori “Memuaskan”.



Gambar 22 Indeks RB BBPOM di Semarang 2021-2024

Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa BPOM telah memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK serta diharapkan dapat terus dilakukan peningkatan kualitas untuk mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan RB, pengawasan internal memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap langkah reformasi berjalan sesuai arah yang ditetapkan, bebas dari penyimpangan, dan menghasilkan output yang nyata. Zona Integritas menuju WBK diperoleg di tahun 2020 secara mandiri. Selain itu, maturitas SPIP (sistem Pengendalian Intern Pemerintah) BBPOM di Semarang di level 4, hal ini menggambarkan bahwa sistem pengendalian intern BBPOM di Semarang Terkelola dan Terukur.

b. Kerja Sama lintas sektor aktif dan jaringan kerja sama yang solid

- 1). Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah: Koordinasi dengan pemerintah daerah diperlukan untuk mencapai pengawasan yang menyeluruh. Sehingga adanya Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) serta Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) perlu lebih ditingkatkan efektifitas rencana aksinya.

Tabel 3 Daftar Tim SK Pembinaan dan Koordinasi di Wilayah Balai Besar POM di Semarang

No.	Kabupaten	Nomor SK Tim Koordinasi	Tanggal SK
1	Kab. Kebumen	4425/357 Tahun 2020	6 Oktober 2020
2	Kab. Purworejo	022/317,8/2023	3 Maret 2023
3	Kab. Magelang	180.182/436/KEP/05/2019	31 Desember 2019

RENCANA STRATEGIS 2025-2029
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Semarang

No.	Kabupaten	Nomor SK Tim Koordinasi	Tanggal SK
4	Kab. Boyolali	440/797/2019	26 November 2019
5	Kab. Klaten	14/440/4 tahun 2024	21 Februari 2024
6	Kab. Blora	440/1781/2019	4 November 2019
7	Kab. Rembang	400.729.1/0570/2025	10 Juni 2025
8	Kab. Pati	442/0291/2020	27 Januari 2020
9	Kab. Kudus	440.7.20/290/2025	22 Oktober 2025
10	Kab. Jepara	442.6/375/2020	20 Oktober 2020
11	Kab. Demak	442,5/244 tahun 2023	11 September 2023
12	Kab. Semarang	443.73/0787/2019	12 November 2019
13	Kab. Temanggung	442.5/447/2019	14 Oktober 2019
14	Kab. Kendal	442/429/2019	19 November 2019
15	Kab. Batang	050/795/2019	15 November 2019
16	Kab. Pekalongan	400.7/176 Tahun 2024	10 Juni 2024
17	Kab. Pemalang	188.4/438/2020	1 September 2020
18	Kab. Tegal	270 Tahun 2023	19 Januari 2023
19	Kab. Brebes	440/15 Tahun 2024	5 April 2024
20	Kota Magelang	744/057/112 TAHUN 2024	17 Mei 24

No.	Kabupaten	Nomor SK Tim Koordinasi	Tanggal SK
21	Kota Salatiga	400.7/268 Tahun 2024	28 Oktober 2024
22	Kota Semarang	400.7/180 Tahun 2024	2024
23	Kota Pekalongan	400.7.19.2.0240	2024
24	Propinsi Jateng	442.5/67 Tahun 2019	2 Juli 2019

- 2). Dukungan dari Lembaga Penegak Hukum: Kasus produk ilegal atau palsu membutuhkan kerjasama dengan kepolisian dan instansi penegak hukum lainnya. Terkadang, proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga memengaruhi kecepatan penindakan. Dukungan dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam hal ini Korwas PPNS dalam melakukan pendampingan pada saat PPNS Balai Besar POM di Semarang melakukan penindakan ikut mendukung keberhasilan penyidikan yang menjadi target BBPOM di Semarang.

Kerja sama juga dilakukan dengan lintas sektor seperti Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah dan Satpol PP di masing-masing daerah serta organisasi profesi yang turut serta dalam pemberantasan produksi dan peredaran sediaan farmasi ilegal.

- 3). Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan kesadaran masyarakat dan pendampingan pelaku UMKM melalui kegiatan SAPA Kampus sehingga menghasilkan fasilitator keamanan pangan yang kompeten.

Jumlah mahasiswa yang mengikuti program SAPA Kampus dari tahun 2022 - 2024 sejumlah 65 mahasiswa yang berasal dari 7 perguruan tinggi negeri/swasta. Mahasiswa tersebut telah mendampingi sejumlah 60 UMKM yang ada di wilayah Jawa Tengah

- 4). Dukungan dengan organisasi kemasyarakatan (Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga/PKK) untuk memperluas jangkauan pengawasan ke seluruh wilayah provinsi Jawa Tengah, menguatkan kapasitas daerah, serta meningkatkan responsivitas terhadap isu keamanan Obat dan Makanan melalui kegiatan Kader Keamanan Pangan. Sejumlah 120 kader keamanan pangan telah dibentuk selama tahun 2022 - 2024 dari Kota Semarang, Kab. Magelang, Kab. Rembang dan Kab. Pati

c. SDM pengawasan obat dan makanan yang kompeten dan profesional, serta spesialisasi jabatan yang sesuai fungsi

Balai Besar POM di Semarang memiliki SDM pengawasan Obat dan Makanan yang kompeten dan profesional, didukung oleh kualifikasi pendidikan, sertifikasi, serta pengalaman yang relevan dengan fungsi masing-masing substansi. Kompetensi teknis pegawai telah dibangun dan dikembangkan baik melalui pelatihan berjenjang, bimbingan teknis, maupun keterlibatan dalam kegiatan pengawasan langsung, sehingga menghasilkan kapasitas individu yang

mampu menjalankan tugas pengawasan secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas layanan publik.

Kekuatan ini tercermin dari tersedianya pegawai dengan spesialisasi yang sesuai pada setiap substansi. Pada substansi **Pengujian**, pegawai memiliki kompetensi teknis laboratorium yang memadai, pemahaman metode pengujian terkini, dan penerapan sistem mutu laboratorium. Substansi **Pemeriksaan** didukung oleh pegawai dengan kemampuan audit dan inspeksi sarana produksi / distribusi, analisis risiko, serta pendampingan pelaku usaha. Substansi **Penindakan** diperkuat oleh pegawai dengan kompetensi investigasi, intelijen pengawasan, penyusunan berkas perkara, koordinasi lintas lembaga penegak hukum, dan penanganan pelanggaran. Pada substansi **Informasi dan Komunikasi**, pegawai memiliki keahlian dalam pengelolaan informasi publik, literasi keamanan pangan dan obat, edukasi masyarakat, strategi komunikasi publik, serta kolaborasi dengan media dan pemangku kepentingan. Sementara itu, substansi **Tata Usaha** didukung SDM dengan kompetensi tata kelola administrasi, layanan internal, keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan sarana prasarana secara efektif dan sesuai ketentuan.

Sebagai sebuah organisasi pemerintah berbasis organisasi pembelajar, Balai Besar POM di Semarang memiliki komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan pemenuhan kompetensi pegawainya. Sebagai seorang ASN, Pegawai Balai Besar POM di Semarang memiliki hal / kewajiban memenuhi kesenjangan kompetensinya baik secara teknis maupun manajerial sosiokultural. Isu kesenjangan tersebut menjadi semakin kritis di tengah tantangan global yang semakin berat, seperti meningkatnya kompleksitas rantai pasok obat dan makanan lintas negara, serta peningkatan standar regulasi internasional yang harus diikuti. Selain itu, perkembangan teknologi yang digunakan oleh pelaku kejahatan obat dan makanan, seperti pemalsuan produk menggunakan teknik canggih dan distribusi ilegal melalui platform digital, menambah tekanan terhadap kapasitas pengawasan obat dan makanan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Balai Besar POM di Semarang telah mengimplementasikan program pelatihan berbasis kompetensi yang berkelanjutan, baik dalam bentuk pelatihan internal maupun kerja sama dengan lembaga eksternal. Secara internal, Balai Besar POM di Semarang telah mengembangkan penyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi berbasis GAP Kompetensi baik teknis maupun manajerial sosiokultural. Output penyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi tersebut berupa kalender pengembangan kompetensi, yang diharapkan dapat menjadi pedoman pegawai dalam memenuhi kebutuhan kompetensinya. Secara organisasional Balai Besar POM di Semarang secara aktif mendorong pegawainya untuk dapat mengikuti program shortcourse penguatan kolaborasi internasional transfer pengetahuan dan teknologi, sampai dengan saat ini Balai Besar POM di Semarang telah mengoptimalkan penggunaan IDEAS, sebuah modul e-learning yang dibangun oleh PPSDM POM, namun demikian sebagai masukan, Balai Besar POM di Semarang memandang perlu peningkatan pada isi konten yang berbasis kasus-kasus terkini.

Kedepan Balai Besar POM di Semarang merencanakan pengembangan sebuah mini Knowledge Management System, sebuah sistem yang dirancang untuk pengelolaan pengetahuan, meliputi pengumpulan, penyimpanan, pengorganisasian, dan penyebaran pengetahuan untuk mendukung pengambilan keputusan, inovasi, dan efisiensi operasional.

Pengembangan mini Knowledge Management System tersebut dibutuhkan untuk mendukung serta melengkapi IDEAS yang telah dibangun oleh PPSDM POM.

Upaya peningkatan kompetensi yang telah dilaksanakan, serta program pengembangan kedepan diharapkan dapat menjadi solusi strategis untuk memastikan pegawai memiliki keterampilan yang memadai dalam menghadapi tantangan global serta mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan secara komprehensif. Profesionalisme dan keahlian pegawai berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan, penguatan tata kelola, serta pencapaian target kinerja unit kerja secara berkelanjutan. Kekuatan ini juga menjadi fondasi penting dalam akselerasi pembentukan budaya kerja berintegritas dan pelayanan prima sebagai bagian dari pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM..

d. Komitmen Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Inovasi dalam rangka implementasi SPBE BBPOM di Semarang

Sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan budaya kerja digital, BBPOM di Semarang mengembangkan Aplikasi Lawang Sewu, yaitu portal internal digital yang digunakan untuk mengelola berbagai aktivitas kelembagaan secara terintegrasi.

Nama “Lawang Sewu” dipilih sebagai bentuk identitas lokal khas Semarang yang bermakna banyak pintu sebagai simbol aksesibilitas, transparansi, dan konektivitas informasi antar-unit kerja.

Aplikasi ini memuat beragam sistem dan fitur, seperti:

- SMPD (Surat Tugas)
- KONDE Digital (Koordinasi dan Diseminasi Informasi)
- SIASN, KIBAS RAMBUT (Pemantauan Kinerja), SIPERAN
- SANG INTEGRITAS, SEMUT DIAUDIT, ASPEK POSITIF (mendukung penguatan akuntabilitas dan zona integritas)
- Pengajuan BMN, Arsip Inspeksi, Reformasi Birokrasi, SPIP, dan lainnya

Sebagai bagian dari penguatan transformasi digital internal, BBPOM di Semarang terus mengembangkan **Aplikasi Lawang Sewu** sebagai portal kerja terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif. Salah satu inisiatif strategis yang tengah dikembangkan adalah **Dashboard Kinerja dan Log Aktivitas Pegawai** yang memungkinkan pemantauan aktivitas kerja secara **real-time**. Fitur ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan BBPOM di Semarang.

Selain itu, dilakukan **evaluasi berkala terhadap efektivitas pemanfaatan setiap fitur dan kebutuhan pengguna (user internal)** untuk memastikan sistem Lawang Sewu tetap relevan, adaptif, dan selaras dengan dinamika organisasi.

Untuk mendukung optimalisasi sistem, BBPOM di Semarang juga berkomitmen pada **peningkatan kapabilitas digital pegawai** melalui pelatihan dan pembinaan teknis yang

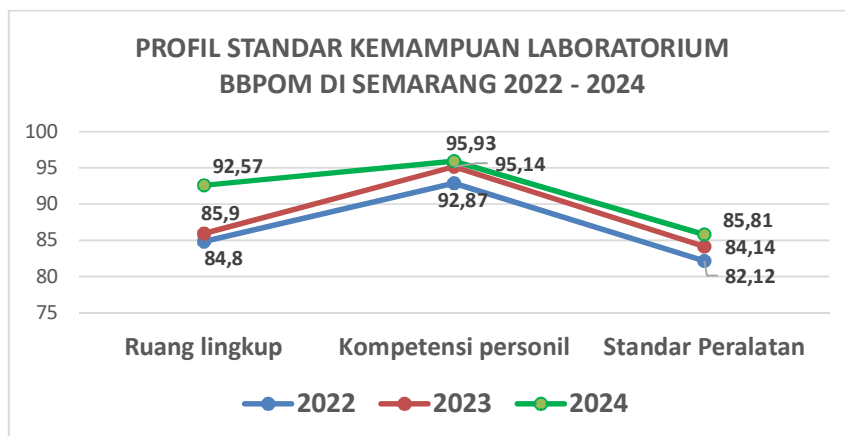
berkelanjutan. Dengan demikian, setiap pegawai dapat memanfaatkan seluruh fitur dalam aplikasi Lawang Sewu secara optimal sebagai bagian dari budaya kerja digital yang produktif, tertib, dan terdokumentasi.

e. Laboratorium Pengujian yang Terakreditasi

BBPOM di Semarang sebagai Laboratorium Regional berperan dalam mengkoordinasikan laboratorium UPT BPOM dalam satu regional, antar regional, maupun dengan unit kerja terkait yang melakukan pengujian Tingkat 4. Laboratorium yang dikoordinasikan dalam satu regional, yang disebut Regional Semarang, meliputi Laboratorium BBPOM di Jakarta, BBPOM di Bandung, BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di Serang, BPOM di Surakarta, BPOM di Bogor, BPOM di Tangerang, BPOM di Tasikmalaya dan BPOM di Banyumas.

Sebagai Laboratorium Regional, BBPOM di Semarang terus berkomitmen untuk memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan melalui pengembangan infrastruktur serta modernisasi fasilitas laboratorium. Langkah ini dilakukan guna menjamin mutu, keamanan, dan khasiat produk yang beredar di masyarakat, termasuk obat, makanan, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, serta obat kuasi.

Guna menjaga keberlanjutan dan konsistensi kualitas hasil pengujian, dukungan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing UPT perlu dioptimalkan dan dikembangkan. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah salah satu tolok ukur yang telah digunakan Badan POM untuk monitoring perkembangan kemampuan dan kapasitas Laboratorium di UPT. Sejak tahun 2022, SKL telah digunakan Badan POM untuk mengukur capaian pemenuhan standar dari 3 komponen, yaitu standar pemenuhan Ruang Lingkup, standar pemenuhan kompetensi personal dan standar peralatan Laboratorium. Berikut adalah data capaian SKL pada BBPOM di Semarang tahun 2022 sd 2024.



Gambar 23 Capaian SKL pada BBPOM di Semarang tahun 2022 sd 2024

Nilai keseluruhan SKL terdapat peningkatan tiap tahun, pada tahun 2022 : 86,6, tahun 2023 : 88,39, serta tahun 2024 : 91,44

Sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan metoda analisa terkini serta kebijakan Regionalisasi Laboratorium (Keputusan Ka BPOM No. 100 tahun 2025 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan POM), maka SKL telah dikembangkan oleh Badan POM dengan penambahan komponen Pemenuhan Standar Metoda Analisa yang terverifikasi. Penambahan komponen tersebut tertuang dalam Keputusan Ka Badan POM RI no 161 tahun 2025 tentang Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM. Pedoman tersebut digunakan oleh Laboratorium Unit Pelaksana Teknis untuk:

1. melakukan pemantauan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan (Pemenuhan Standar Ruang Lingkup)
2. melakukan pemantauan ketersediaan peralatan laboratorium, baik dari jenis dan jumlahnya (Pemenuhan Standar Peralatan Laboratorium)
3. melakukan pemantauan kompetensi laboratorium dalam melakukan pengujian sesuai ruang lingkup oleh personel yang kompeten (Pemenuhan Standar Kompetensi Personil)
4. melakukan pemantauan terhadap metode yang harus diverifikasi oleh laboratorium (Pemenuhan Standar Metoda Analisa yang Terverifikasi)

Monitoring terhadap 4 parameter pemenuhan standar tersebut, dilakukan dengan penetapan target di awal tahun Renstra untuk 5 tahun ke depan (2025 – 2029), selanjutnya membuat perencanaan progres setiap tahun, bahkan lebih detail monitoring dan evaluasi SKL dilaksanakan setiap 3 bulan (Triwulan).

Fasilitas Laboratorium Modern dan Berstandar Internasional

Laboratorium BBPOM di Semarang telah dilengkapi dengan peralatan canggih, seperti spektrofotometri, kromatografi, dan instrumen mikrobiologi, guna mendukung analisis yang lebih akurat dan efisien. Laboratorium ini mampu melakukan berbagai jenis pengujian, antara lain:

- Uji kimia, untuk mendeteksi keberadaan bahan berbahaya seperti logam berat, residu bahan berbahaya, dan zat aditif berbahaya;
- Uji mikrobiologi, untuk memastikan produk bebas dari kontaminasi mikroorganisme patogen, uji sterilitas sediaan steril, dan uji DNA Porcine pada sediaan farmasi dan produk pangan
- Uji toksikologi, untuk mengevaluasi potensi bahaya suatu produk terhadap kesehatan manusia.

Fasilitas ini juga dirancang agar memenuhi standar internasional, seperti ISO/IEC 17025: 2017, yang menjamin pelaksanaan pengujian dilakukan secara profesional dan akuntabel. Guna meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas pengawasan, BBPOM di Semarang secara konsisten melakukan berbagai inisiatif strategis:

- Modernisasi Peralatan

Peralatan laboratorium secara berkala diperbarui mengikuti perkembangan teknologi, dengan prioritas pada alat yang memiliki sensitivitas tinggi untuk mendeteksi kontaminan dalam kadar sangat rendah, seperti LCMSMS, GCMS, HPIC, ICPMS dan lain-lain.

- Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan intensif bagi personel laboratorium, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna memastikan penguasaan terhadap teknologi dan metodologi pengujian terbaru. Sebagai Laboratorium Regional BBPOM di Semarang setiap tahun merencanakan pelatihan personil terutama pelatihan pengujian parameter unggul sesuai dengan penugasan yang diberikan

- Pembangunan dan Perluasan Infrastruktur

Renovasi ruang laboratorium serta penguatan fasilitas pendukung, seperti penambahan laboratorium sitotoksik untuk pengujian parameter unggul obat kanker pada sampel regional, sistem ventilasi yang baik, dan pengelolaan limbah cair untuk mengantisipasi volume pengujian yang semakin meningkat dan kompleks

- Kerja Sama dan Kolaborasi

BBPOM di Semarang aktif menjalin kemitraan dengan universitas, lembaga penelitian, serta pemerintah daerah, guna memperkuat kapasitas pengujian dan mendorong adopsi teknologi terbaru. Kolaborasi juga dilakukan dengan sektor swasta dalam rangka percepatan inovasi laboratorium.

- Digitalisasi dan Automasi

Implementasi sistem laboratorium berbasis digital tahun 2025 mulai diterapkan untuk mempercepat pengelolaan data dan dokumen hasil uji dari pengujian. Selain itu, proses automasi diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi hasil uji. Digitalisasi dan automasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, akurasi dan keamanan data serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

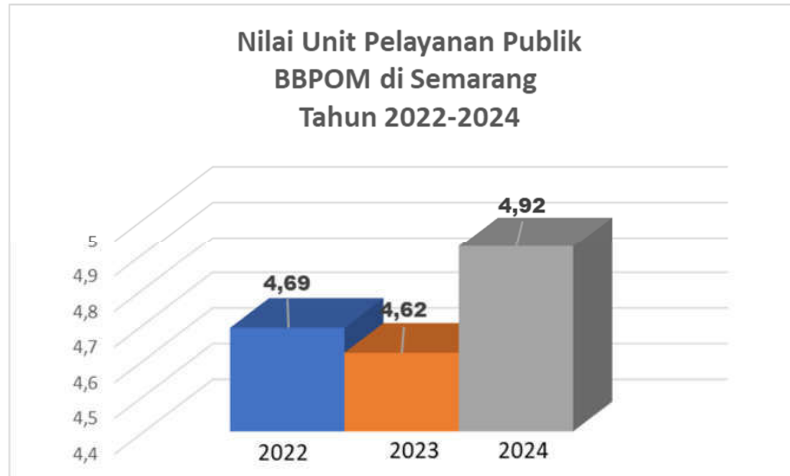
f. Kapasitas BBPOM di Semarang dalam Mengedukasi dan Memberdayakan Masyarakat sebagai Mitra Pengawasan

Kekuatan BBPOM di Semarang dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan terletak pada regulasi dan kebijakan yang terkini, kredibel, dan berkualitas yang disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui Forum Komunikasi Publik. Keterbukaan BBPOM di Semarang untuk bekerja sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui PKS (Perjanjian Kerja Sama) untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Kolaborasi ini memperluas jangkauan program pemberdayaan melalui Program Kabupaten/Kota Pangan Aman untuk memastikan keamanan obat dan makanan bagi masyarakat. Selain itu, BPOM juga menyediakan pembelajaran secara online melalui platform seperti SOS, melon Manis, Sarahsehan, Siulan (podcast) yang mudah diakses dengan kebutuhan masyarakat di provinsi Jawa Tengah.

g. Infrastruktur Pelayanan Publik yang memadai

Dalam lima tahun terakhir, BBPOM di Semarang terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan publik melalui penguatan infrastruktur pelayanan yang memadai, aman, dan inklusif.

Peningkatan kualitas layanan publik tersebut dapat dilihat dari capaian nilai Unit Pelayanan Publik yang telah di peroleh dari tahun 2022 - 2024.



Gambar 24 Nilai Unit Pelayanan Publik BBPOM di Semarang tahun 2022 - 2024

Upaya ini dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penataan sarana prasarana fisik, pengembangan sistem layanan digital, hingga penyediaan fasilitas pendukung untuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak.

Pelayanan publik yang diselenggarakan BBPOM di Semarang tidak hanya menekankan pada aspek kecepatan dan ketepatan, tetapi juga memperhatikan aksesibilitas dan kenyamanan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan jalur kursi roda, ruang laktasi, area bermain anak, serta sistem antrean yang ramah pengguna.

Atas komitmen tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memberikan apresiasi kepada BBPOM di Semarang atas capaian sebagai unit layanan yang ramah kelompok rentan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pengakuan ini memperkuat posisi BBPOM di Semarang sebagai instansi yang adaptif terhadap prinsip-prinsip pelayanan prima dan berkeadilan.

Ke depan, BBPOM di Semarang berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah dengan melakukan pemutakhiran fasilitas fisik dan digital secara berkala, guna memastikan seluruh layanan tetap relevan, adaptif, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Selain itu, BBPOM di Semarang akan menerapkan sistem surveilans kepuasan masyarakat yang berkelanjutan untuk menangkap persepsi, harapan, serta pengalaman masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Data yang diperoleh akan menjadi dasar perbaikan dan pengembangan layanan publik secara tepat sasaran.

Dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, BBPOM di Semarang juga akan terus memperkuat kapasitas SDM frontliner agar mampu memberikan layanan yang komunikatif, empatik, serta berorientasi pada kebutuhan pengguna (*user-centric service*).

Seluruh upaya tersebut akan terintegrasi dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan dikembangkan menuju konsep layanan publik cerdas (*smart service*),

agar pelayanan dapat diakses secara mudah, cepat, dan responsif baik melalui kanal daring maupun luring.

Dengan dukungan infrastruktur yang semakin memadai serta pelayanan yang mengedepankan kepuasan dan perlindungan kelompok rentan, BBPOM di Semarang siap menjadi model praktik pelayanan publik yang profesional, manusiawi, dan berkeadilan. Seiring dengan upaya perbaikan yang dilakukan, harapannya 5 tahun ke depan akan semakin prima layanan yang diberikan dan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat yang dilayani

1.2.2 Kelemahan (Weakness)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan obat dan makanan yang terus meningkat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi BBPOM di Semarang menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja BBPOM di Semarang dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh BBPOM di Semarang, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan

a. Kelembagaan dan Susunan Organisasi BPOM yang belum optimal

Salah satu tantangan utama dalam kelembagaan BPOM adalah adanya perbedaan pendekatan beban kerja antara tingkat pusat dan unit pelaksana teknis (UPT). Di tingkat Badan POM pusat, struktur dan beban tugas dirancang berdasarkan komoditas (*by commodity*)—misalnya obat, makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Model ini memungkinkan pusat untuk menyusun kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) secara spesifik terhadap jenis komoditas tertentu, termasuk penguatan regulasi dan harmonisasi standar internasional.

Namun, di tingkat UPT termasuk Balai Besar POM di Semarang, struktur organisasi dan pelaksanaan tugas masih menggunakan pendekatan berbasis fungsi (*by function*). Artinya, setiap seksi memiliki fungsi umum seperti pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan informasi komunikasi, tanpa pembagian spesifik berdasarkan komoditas. Perbedaan basis penugasan ini menimbulkan beberapa ketidaksinkronan dalam pelaksanaan tugas.

Pertama, kompleksitas regulasi dan beban kerja dari pusat tidak terdistribusi secara ideal di UPT, karena tenaga teknis di lapangan harus menangani berbagai komoditas sekaligus dengan bobot risiko yang berbeda-beda. Misalnya, satu seksi pemeriksaan dapat menanggung beban pengawasan obat berisiko tinggi sekaligus pangan siap saji, kosmetik, hingga suplemen, yang regulasinya berbeda dan sering diperbarui oleh pusat.

Kedua, pendekatan *by function* membuat distribusi SDM berbasis keahlian komoditas sulit diterapkan. Pegawai sering harus menguasai banyak komoditas secara bersamaan, sehingga kedalaman kompetensi teknis tidak setara dengan tuntutan pusat yang telah mengarah pada

spesialisasi komoditi. UPT pun mengalami beban administrasi yang lebih besar karena harus menyesuaikan pelaporan lintas komoditas dengan format pusat yang spesifik.

Ketiga, model by commodity di pusat menuntut alur data, respon risiko, serta evaluasi yang juga tersegmentasi berdasarkan jenis produk. Namun, di UPT, data pengawasan masih dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan fungsi. Akibatnya, proses integrasi data pusat dan daerah memerlukan waktu lebih lama, dan respons risiko tertentu—misalnya temuan obat palsu atau pangan kedaluwarsa—tidak selalu dapat ditindak secara cepat karena struktur belum memungkinkan spesialisasi.

Selain itu, gap nomenklatur tersebut berdampak pada perencanaan beban kerja dan alokasi SDM. UPT harus menyesuaikan tugas lapangan berdasarkan komoditas tetapi melaporkannya berdasarkan fungsi, sehingga beban kerja tidak terekam secara akurat. Ketidaktepatan ini berimbas pada penentuan kebutuhan SDM, formasi jabatan fungsional, hingga kebutuhan pelatihan spesifik komoditas yang sering tidak berbanding lurus dengan realitas lapangan.

Perbedaan pendekatan inilah yang membuat sebagian tugas pusat sulit diturunkan secara langsung kepada UPT tanpa adanya penyesuaian kelembagaan. Struktur organisasi UPT perlu diperkuat agar mampu menerima sebagian peran spesialisasi komoditas, terutama jika pengawasan berbasis risiko dan digitalisasi data terus berkembang.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis seperti:

- penyesuaian struktur UPT untuk mengakomodasi spesialisasi komoditas, misalnya melalui penambahan sub-fungsi atau focal point komoditas secara resmi,
- penataan pelaporan dan integrasi data agar selaras dengan kebutuhan pusat,
- pemetaan kebutuhan kompetensi spesifik per komoditas,
- serta restrukturisasi beban kerja agar tidak terjadi ketimpangan antar seksi.

Dengan penyelarasan ini, BBPOM di Semarang dapat menjadi unit pelaksana yang lebih responsif, akurat, dan sejalan dengan arah kebijakan pusat yang semakin komoditas-based, sehingga efektivitas pengawasan obat dan makanan dapat meningkat secara signifikan.

b. Keterbatasan distribusi sumber daya manusia (SDM) dan pola rotasi pegawai lintas fungsi yang dinamis

Distribusi sumber daya manusia (SDM) pada Balai Besar POM di Semarang saat ini belum sepenuhnya proporsional dengan beban kerja dan kebutuhan kompetensi masing-masing unit. Untuk melakukan pengawasan obat dan makanan di seluruh wilayah Jawa Tengah, Balai Besar POM di Semarang dibekali dengan 149 orang personel, jumlah tersebut belum sepenuhnya memadai jika dibandingkan kebutuhan personel berdasarkan Analisis Beban Kerja sejumlah 199 orang pegawai. Ketidakseimbangan ini berdampak pada optimalisasi

pelaksanaan tugas dan fungsi, serta memengaruhi kecepatan dan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan. Dibutuhkan strategi pendistribusian beban kerja yang sangat hati-hati dan merata sesuai jenjang jabatan yang dimiliki, baik fungsional terampil maupun fungsional keahlian. Pendistribusian kinerja hingga level individu dapat lebih diperkuat melalui dialog kinerja yang intens antara Kepala Unit Kerja, Ketua Tim Kerja hingga level Anggota sehingga target organisasi dapat direalisasikan sesuai perencanaan.

Pola rotasi pegawai lintas fungsi juga belum sepenuhnya dirancang secara terstruktur dan berbasis kompetensi. Rotasi cenderung dilakukan sebagai upaya pemerataan tanpa didukung analisis kebutuhan jabatan dan peta kompetensi yang komprehensif. Kondisi ini mengakibatkan proses adaptasi pegawai di unit baru memerlukan waktu cukup panjang, sehingga menimbulkan potensi penurunan kinerja unit dan risiko terjadinya disrupsi terhadap keberlanjutan program kerja maupun pelayanan. Minimnya mekanisme serah terima tugas yang terdokumentasi turut memperbesar risiko hilangnya pengetahuan dan praktik baik (best practices) yang telah berjalan. Dibutuhkan strategi pola rotasi internal yang lebih intens dengan mempertimbangkan kompetensi pegawai, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Pola rotasi internal juga perlu dilakukan secara berkala dengan tujuan pengayaan kompetensi pegawai. Pengayaan kompetensi melalui pola rotasi yang dinamis dan berkelanjutan dapat meningkatkan kemampuan pegawai-pegawai dengan label talent / star sehingga siap menjadi pemimpin masa depan.

Belum terintegrasinya kebijakan distribusi dan rotasi SDM dengan manajemen talenta serta pengembangan karier pegawai berdampak pada terbatasnya akselerasi peningkatan kapasitas SDM. Kondisi tersebut juga berimplikasi pada rendahnya motivasi pegawai serta belum optimalnya pencapaian target kinerja organisasi. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan strategi distribusi dan rotasi pegawai yang lebih sistematis, berbasis kompetensi, dan selaras dengan kebutuhan organisasi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola SDM, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang unggul dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

c. Masih terdapat kesenjangan kompetensi teknis pada aspek manajerial dan sosiokultural

Salah satu tantangan yang masih dihadapi oleh Balai Besar POM di Semarang adalah adanya kesenjangan kompetensi teknis pada pegawai, khususnya dalam aspek manajerial dan sosiokultural. Kesenjangan ini terlihat dari belum meratanya pemahaman dan kemampuan pegawai dalam menjalankan peran kepemimpinan, pengambilan keputusan strategis, serta pengelolaan tim secara efektif di lingkungan kerja. Meskipun sebagian besar pegawai memiliki kompetensi teknis sesuai bidang fungsionalnya, kemampuan untuk mengintegrasikan pendekatan manajerial dalam pelaksanaan tugas sering kali masih terbatas, terutama pada level ketua tim kerja atau pejabat fungsional tertentu yang belum memiliki pengalaman kepemimpinan sebelumnya.

Sampai dengan saat ini, pelatihan kepemimpinan masih dilakukan pada jabatan struktural saja,

Di sisi lain, aspek sosiokultural seperti kemampuan berkomunikasi lintas unit, sensitivitas terhadap perbedaan karakter dan latar belakang pegawai, serta keterampilan dalam

membangun kerja sama, belum sepenuhnya dimiliki oleh seluruh pegawai. Hal ini berdampak pada efektivitas kolaborasi internal maupun eksternal, termasuk dalam kegiatan lintas sektor, koordinasi dengan pemerintah daerah, maupun pelibatan masyarakat dalam program edukasi.

Dampak dari kondisi ini terlihat dalam pelaksanaan program yang masih terfragmentasi, kurangnya inisiatif kolaboratif, serta lambatnya respons terhadap dinamika organisasi dan eksternal. Oleh karena itu, penguatan kompetensi pada aspek manajerial dan sosiokultural menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung transformasi organisasi menuju pengawasan obat dan makanan yang lebih adaptif, inklusif, dan profesional.

Sebagai langkah perbaikan, diperlukan upaya strategis seperti pengembangan program pelatihan kepemimpinan secara berjenjang, pelatihan komunikasi dan etika kerja lintas budaya, pembinaan pegawai melalui mentoring internal, serta pemberian ruang partisipasi yang lebih luas bagi pegawai dalam forum diskusi lintas fungsi. Penguatan kompetensi ini diharapkan dapat membentuk SDM yang tidak hanya andal secara teknis, tetapi juga mampu menjalankan peran manajerial dan menjalin kerja sama yang produktif dalam ekosistem kerja yang semakin kompleks.

BBPOM di Semarang berkomitmen memperkuat kualitas kepemimpinan melalui program pelatihan berjenjang bagi pejabat struktural, fungsional tertentu dan pelaksana. Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dalam mengelola tim, menyusun strategi, serta membuat keputusan berbasis data dan risiko.

Selain aspek teknis, juga dilakukan penguatan kapasitas sosiokultural pegawai melalui pelatihan soft skills, seperti komunikasi lintas unit, etika kerja, dan pemahaman keberagaman guna menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis.

Untuk mendukung regenerasi kepemimpinan, BBPOM di Semarang mendorong program mentoring dan coaching internal, serta rotasi dan penugasan lintas fungsi untuk memperluas pengalaman dan kemampuan adaptasi pegawai.

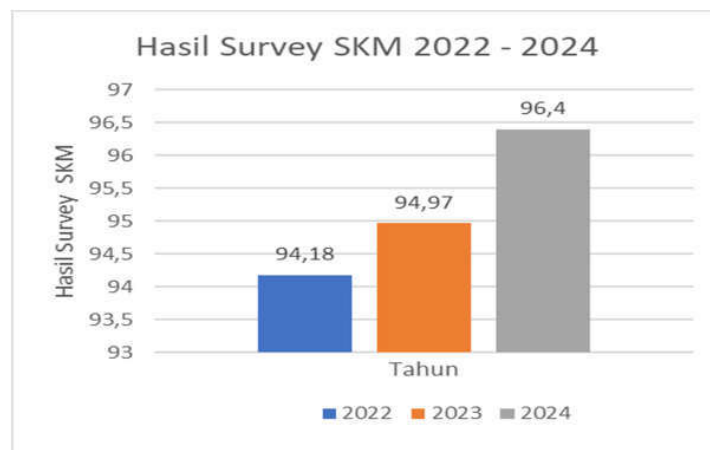
Sebagai langkah sistemik, kompetensi nonteknis seperti kepemimpinan dan integritas juga akan diintegrasikan ke dalam penilaian kinerja dan pengembangan karier, sebagai dasar promosi dan penugasan strategis ke depan.

1.2.3 Peluang (Opportunity)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi BBPOM di Semarang untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan obat dan makanan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh BBPOM di Semarang untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

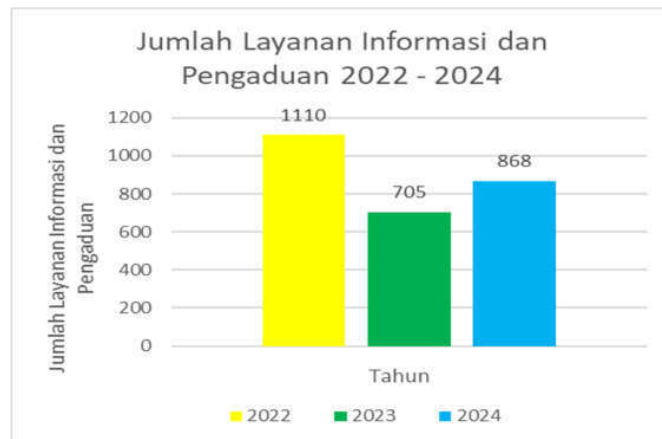
a. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja BBPOM di Semarang

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan produk obat dan makanan, ekspektasi publik terhadap kinerja BBPOM di Semarang pun semakin tinggi. Hal ini terlihat dari hasil survey kepuasan masyarakat yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, hasil survey kepuasan masyarakat sebesar 94,18; pada tahun 2023 hasil survey kepuasan masyarakat sebesar 94,97 dan pada tahun 2024 hasil survey kepuasan masyarakat sebesar 96,40. Masyarakat tidak hanya menuntut kecepatan dan ketegasan dalam pengawasan, tetapi juga transparansi, akuntabilitas, serta layanan yang responsif dan inklusif.



Gambar 25 Hasil Survey SKM BBPOM di Semarang Tahun 2022-2024

Harapan ini tercermin dari berbagai masukan yang diterima melalui kanal pengaduan publik, hasil survei kepuasan masyarakat, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan edukasi dan komunikasi risiko. Jumlah layanan informasi dan pengaduan untuk tahun 2022 sebesar 1110 layanan, tahun 2023 sebesar 705 layanan dan tahun 2024 sebesar 868 layanan. Seluruh layanan tersebut telah 100% selesai ditindaklanjuti.



Gambar 26 Jumlah Layanan Informasi dan Pengaduan BBPOM di Semarang Tahun 2022-2024

Tingginya ekspektasi tersebut menjadi pendorong sekaligus tantangan bagi BBPOM di Semarang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas jangkauan pengawasan, serta memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan.

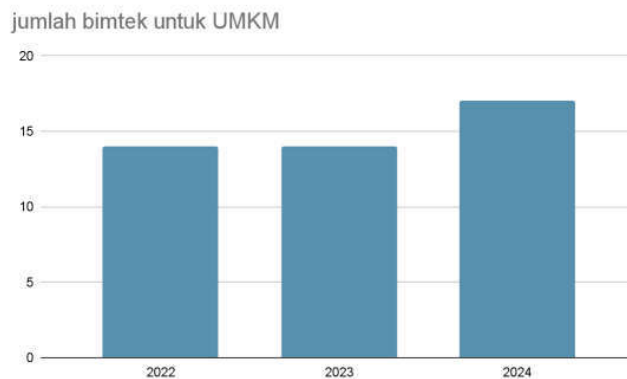
Dengan semangat berbenah dan adaptif terhadap perubahan, BBPOM di Semarang terus berkomitmen memenuhi harapan masyarakat melalui pengawasan yang profesional, berbasis data, dan berorientasi pada perlindungan kesehatan publik

b. Meningkatnya Pertumbuhan pasar dan daya saing Industri/Produk Obat dan Makanan di Wilayah Jawa Tengah

Dalam beberapa tahun terakhir, Jawa Tengah menunjukkan tren pertumbuhan industri obat dan makanan yang signifikan, baik dari sisi jumlah pelaku usaha maupun variasi produk yang dihasilkan. Hal ini dipicu oleh meningkatnya permintaan pasar domestik, ekspansi pasar UMKM, serta dorongan dari pemerintah daerah dalam mempermudah perizinan dan meningkatkan nilai tambah produk lokal. Sebagai bagian dari wilayah pengawasan strategis, Balai Besar POM di Semarang dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap penguatan daya saing industri.

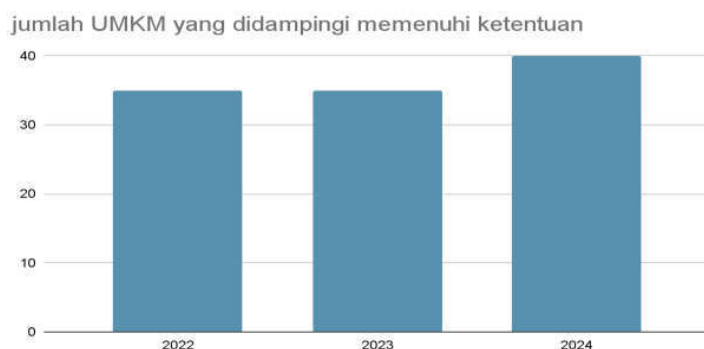
Peningkatan jumlah industri rumah tangga pangan, kosmetik lokal, serta pelaku usaha herbal dan suplemen, menuntut pengawasan yang lebih adaptif dan responsif. Balai Besar POM di Semarang harus mampu memberikan pembinaan teknis yang intensif, memfasilitasi pemenuhan standar keamanan dan mutu, serta mendorong sertifikasi produk yang berorientasi ekspor. Di sisi lain, peningkatan kompleksitas produk dan distribusi juga memperluas risiko penyalahgunaan bahan berbahaya dan pelanggaran etik pemasaran, yang membutuhkan strategi pengawasan yang berbasis risiko dan kolaboratif dengan lintas sektor. Berikut adalah upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Semarang untuk mendukung Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan di Jawa Tengah: BBPOM di Semarang terus berkomitmen membina pelaku usaha, khususnya UMKM, melalui pelatihan teknis dan konsultasi intensif terkait cara produksi yang baik, serta pendampingan dalam pemenuhan aspek keamanan, mutu, dan legalitas produk. Upaya ini

dilengkapi dengan fasilitasi proses perizinan dan sertifikasi seperti MD, PIRT, dan CPPB melalui OSS-RBA dan e-Registration BPOM. Terdapat peningkatan jumlah kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi yang diselenggarakan dari tahun 2022-2024 :



Gambar 27 Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi yang Diselenggarakan 2022-2024

Terdapat peningkatan jumlah UMKM yang didampingi oleh BBPOM Semarang serta telah memenuhi ketentuan dari tahun 2022 sampai tahun 2024, sebagai berikut:



Gambar 28 Jumlah UMKM yang Didampingi oleh BBPOM Semarang serta telah Memenuhi Ketentuan 2022 - 2024

Di sisi lain, BBPOM aktif menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor untuk integrasi program pembinaan, serta membentuk jejaring penguatan daya saing regional. Peningkatan literasi masyarakat dan pelaku usaha juga dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi publik, kampanye produk aman, serta pemberdayaan kader keamanan pangan.

Selain itu, BBPOM mendorong pelaku usaha untuk berinovasi dan melakukan diversifikasi produk berbasis kearifan lokal, serta memanfaatkan teknologi produksi yang ramah lingkungan. Untuk mendukung hal ini, platform digital seperti webinar, e-learning, dan media sosial dimanfaatkan sebagai sarana pembinaan, sekaligus promosi produk aman yang telah memenuhi ketentuan BPOM. Sebagai contoh buah Patijoto, buah endemik khas Kab Kudus

akhirnya diizinkan sebagai bahan baku pangan sesuai Surat Persetujuan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan No T-SD.03.095.09.24.168.

c. Adaptasi Perkembangan Teknologi pada Proses Bisnis BPOM melalui Peningkatan Digitalisasi

Di era transformasi digital yang semakin cepat, BBPOM di Semarang menghadapi tantangan dalam mengadaptasi proses bisnis dengan perkembangan teknologi informasi. Kebutuhan akan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien mendorong lembaga untuk memperkuat sistem digital di berbagai lini, mulai dari pengawasan, layanan publik, hingga administrasi internal.

Namun, proses digitalisasi ini tidak terlepas dari hambatan, seperti kesenjangan kompetensi digital antarpegawai, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta integrasi sistem yang belum sepenuhnya terhubung lintas unit dan platform. Selain itu, dinamika regulasi serta perubahan pola kerja akibat digitalisasi menuntut penyesuaian budaya organisasi secara berkelanjutan. Menjawab tantangan tersebut, BBPOM di Semarang terus melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan digital, optimalisasi pemanfaatan aplikasi seperti SIPT dan Lawang Sewu. Beberapa bentuk adaptasi teknologi yang telah diimplementasikan di Balai Besar POM di Semarang antara lain:

1. Digitalisasi Pengujian dan Pengawasan

Penerapan teknologi pada komputer instrumen alat yang kompatibel sesuai windows yang telah terinstal sehingga penguji mampu mengendalikan pengujian di instrumen HPLC dari jarak jauh.

2. E-Office dalam general affair

Balai Besar POM di Semarang telah mengimplementasikan sistem **e-Office** yang memungkinkan seluruh proses administrasi, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan pemeliharaan dilakukan secara digital. Hal ini meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi penggunaan kertas, serta mempermudah proses monitoring dokumen.

- KIBAS RAMBUT pengembangan dashboard kinerja dan monitoring internal secara real-time (KIBAS RAMBUT).
- SIPERAN pengembangan dashboard pengelolaan persediaan (alat tulis kantor, reagen, suku cadang secara real-time).
- SEMUT METAL

3. Inovasi Layanan Publik Digital

Balai Besar POM di Semarang juga mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital seperti:

- **Layanan konsultasi daring** untuk pelaku usaha dan masyarakat : jamu online, melon manis, SOS.
- **Pemanfaatan media sosial dan kanal komunikasi digital sebagai sarana edukasi publik tentang keamanan obat dan makanan** : Cerita OMA, Sarasehan.

Upaya ini diarahkan agar proses pengawasan dan layanan menjadi lebih responsif, adaptif, dan terintegrasi dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

d. PP pengelolaan PNBP terbaru 2025

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang baru pada tahun 2025 membawa implikasi strategis bagi Balai Besar POM di Semarang, baik dari sisi administratif maupun pelayanan publik. PP ini mendorong penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan PNBP, serta membuka peluang fleksibilitas dalam penggunaan dana untuk mendukung peningkatan kualitas layanan.

Dengan adanya perubahan struktur tarif, jenis layanan, dan mekanisme pembayaran, Balai Besar POM di Semarang perlu melakukan penyesuaian SOP, sosialisasi internal dan eksternal, serta peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis aplikasi. Selain itu, diperlukan pemahaman yang utuh dari seluruh pegawai mengenai ruang lingkup layanan ber-PNBP, batasan pemanfaatan anggaran, serta tanggung jawab pelaporan. Dalam konteks pengawasan obat dan makanan, kebijakan baru ini diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga mampu menjadi instrumen yang memperkuat pelayanan publik secara profesional dan berorientasi pada pengguna layanan.

Berikut adalah upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Semarang untuk mengimplementasikan dan menyesuaikan diri terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Pengelolaan PNBP Terbaru Tahun 2025 secara optimal:

Sebagai respons terhadap kebijakan PNBP terbaru, BBPOM di Semarang melakukan berbagai upaya penyesuaian internal. Langkah awal dilakukan melalui sosialisasi intensif kepada seluruh pegawai, khususnya yang terlibat langsung dalam layanan berbayar dan pengelolaan anggaran, disertai penyusunan panduan praktis seperti buku saku dan infografis. Selanjutnya, dilakukan penyesuaian SOP dan mekanisme layanan agar sesuai dengan ketentuan tarif dan jenis layanan yang berlaku, serta menyelaraskan alur kerja antara unit teknis dan keuangan. Untuk memperkuat akuntabilitas, BBPOM di Semarang juga mengoptimalkan sistem pelaporan digital PNBP dan melaksanakan audit internal secara berkala.

1). Peninjauan ulang dan optimalisasi jenis dan tarif PNBP

PP 44/2025 menegaskan bahwa jenis dan tarif PNBP perlu disusun untuk “mengantisipasi dinamika masyarakat, kebijakan Pemerintah, dan perkembangan ekonomi”.

Bagi BBPOM Semarang, ini berarti peluang untuk melakukan kajian internal terhadap tarif-layanan yang berada di bawah pengawasannya (misalnya pengujian laboratorium, sertifikasi, inspeksi) agar tarif lebih sesuai dengan biaya layanan, perkembangan teknologi digitalisasi, dan kebutuhan pasar.

Dengan perilaku layanan yang semakin digital, BBPOM bisa merevisi tarif layanan berbasis digital/otomasi agar lebih efisien dan kompetitif, sehingga meningkatkan realisasi PNBP dari layanan yang disediakan.

2). Penguatan pengelolaan, efisiensi dan integrasi sistem PNBP

PP ini juga menekankan “pengelolaan PNBP yang efektif dan efisien termasuk penyelarasan dengan ketentuan anggaran pendapatan dan belanja negara. penguatan optimalisasi penagihan piutang PNBP”. Untuk BBPOM Semarang: terdapat peluang besar untuk mengimplementasikan sistem digital untuk penagihan, piutang, pelaporan transaksi PNBP, dan monitoring real-time melalui aplikasi internal.

Digitalisasi layanan (yang juga sudah menjadi bagian transformasi BPOM) akan mendukung pengelolaan PNBП yang lebih transparan dan akuntabel — meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan.

3). Peningkatan layanan publik dan bisnis-pelaku usaha melalui mekanisme keringanan dan keberatan

PP 44/2025 mengatur juga penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBП — artinya regulasi memberi ruang bagi fleksibilitas dan kepastian hukum dalam layanan PNBП. BBPOM Semarang dapat memanfaatkan peluang ini dengan menyediakan layanan konsultasi terhadap pelaku usaha mengenai tarif layanan, proses keberatan/keringanan, serta memperkuat edukasi agar pelaku usaha memahami hak dan kewajiban mereka — ini akan memperkuat compliance dan potensi penerimaan PNBП.

4). Inovasi produk layanan dan diversifikasi layanan

Dengan regulasi yang lebih fleksibel, BBPOM Semarang dapat melihat peluang untuk mengembangkan layanan tambahan yang menghasilkan PNBП — misalnya layanan premium atau ekspres untuk pengujian, sertifikasi online, layanan konsultasi digital, paket-layanan terpadu yang dikenai tarif PNBП baru.

Penguatan digitalisasi internal dan eksternal memungkinkan layanan dengan value added yang bisa dikenai tarif PNBП yang sesuai, meningkatkan kontribusi BBPOM terhadap penerimaan negara namun juga meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha.

5). Penguatan data, monitoring, dan integritas sistem keuangan

PP juga menempatkan pentingnya “penyelarasan dengan anggaran”, “piutang optimum”, serta “pengelolaan yang tertib dan akuntabel”.

BBPOM Semarang bisa menggunakan sistem monitoring realtime, dashboard PNBП, pemanfaatan big-data untuk analisis layanan dan penerimaan, dan integrasi dengan sistem nasional agar aliran penerimaan PNBП lebih transparan, mempermudah audit, dan meningkatkan realisasi penerimaan.

e. Ketimpangan Gender

Ketimpangan gender masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan. Di lingkungan BBPOM di Semarang, kesenjangan ini bisa berdampak pada akses informasi, perlakuan berbeda dalam pelayanan, serta representasi dalam pengambilan keputusan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4 Jumlah partisipan / peserta dalam kegiatan sosialisasi, KIE dan pemberdayaan Masyarakat BBPOM di Semarang Tahun 2024

No	Kegiatan	Peserta Laki-laki	Peserta Perempuan
1	Sosialisasi / Bimbingan Teknis bagi UMKM	390	219
2	KIE	19.839	15.097
3	Desa Pangan Aman	100	547
4	Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas	235	313
5	Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di Sekolah	452	669
	TOTAL	21.016	16.845

Berdasarkan data partisipasi program edukasi dan pemberdayaan masyarakat, yang telah dilakukan oleh BBPOM di Semarang tahun 2024, terdapat ketimpangan gender pada jenis program tertentu, seperti dominasi peserta laki-laki dalam bimbingan teknis UMKM dan dominasi perempuan dalam program Desa Pangan Aman. Ketidakseimbangan ini perlu mendapat perhatian agar seluruh segmen masyarakat memperoleh akses setara terhadap edukasi keamanan pangan dan obat.

BPS Jawa Tengah mencatat bahwa Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar 0,308, (BPS, 2025). Hal ini menunjukkan adanya kondisi ketimpangan gender yang masih perlu diintervensi. Sehingga BBPOM di Semarang berkomitmen untuk turut berkontribusi terhadap upaya penurunan ketimpangan tersebut melalui perluasan jangkauan edukasi dan pemberdayaan perempuan dalam ekosistem pengawasan obat dan makanan.

Selaras dengan itu, BBPOM di Semarang menargetkan peningkatan partisipasi perempuan dalam program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), pemberdayaan UMKM Pangan, dan program komunitas pangan aman hingga mencapai proporsi minimal 50% dalam lima tahun mendatang. Peningkatan partisipasi perempuan diharapkan memberikan dampak berantai terhadap peningkatan pengetahuan keluarga, peningkatan kepatuhan pelaku usaha mikro dan kecil, serta penguatan jejaring pengawasan berbasis masyarakat.

Upaya BBPOM di Semarang untuk dapat mencapainya diarahkan pada peningkatan kesetaraan, baik melalui kebijakan internal, pelatihan sensitif gender, maupun penyusunan program KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) yang inklusif serta penerapan pemantauan dan evaluasi berbasis data terpilah menurut gender. Keterwakilan perempuan dalam posisi manajerial dan teknis juga terus didorong untuk memastikan pendekatan pengawasan yang responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, Renstra BBPOM di Semarang diarahkan untuk tidak hanya meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap obat dan makanan, tetapi juga mendorong kesetaraan

akses informasi, pemberdayaan ekonomi UMKM pangan perempuan, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.

1.2.4 Ancaman (Threat)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis BBPOM di Semarang. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga BBPOM di Semarang dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (*Threat*) yang dapat mempengaruhi BBPOM di Semarang dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang.

a. Kesenjangan Regulasi dan Keterbatasan Pengawasan Produk Obat dan Makanan Secara Daring

Di tengah pesatnya pertumbuhan pasar digital, masyarakat kini semakin mudah mengakses dan membeli berbagai produk obat dan makanan secara online. Namun di balik kemudahan tersebut, tersembunyi ancaman yang tak selalu terlihat—peredaran produk ilegal, tanpa izin edar, atau tidak memenuhi standar keamanan, yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.

BBPOM di Semarang menghadapi tantangan nyata dalam mengawasi ruang siber yang bergerak cepat dan lintas batas. Kesenjangan antara regulasi konvensional dan dinamika platform digital menyebabkan banyak produk tidak terdeteksi dalam sistem pengawasan yang ada. Anonimitas penjual, pemanfaatan media sosial sebagai jalur distribusi, dan kurangnya kontrol atas klaim produk menjadi celah yang kerap dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Untuk menjawab tantangan ini, BBPOM di Semarang memperkuat upaya melalui patroli siber rutin, pemantauan aktif terhadap marketplace, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum, Direktorat Siber Obat dan Makanan, dan penyedia platform digital. Selain itu, edukasi publik digencarkan agar masyarakat lebih kritis dan sadar terhadap bahaya produk ilegal, khususnya yang dibeli secara daring.

Balai Besar POM di Semarang turut melakukan pengawasan dengan cara melaporkan situs/link yang menjual obat dan makanan secara daring kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan yang kemudian dilakukan take down atas kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Selama tahun 2024 telah dilaporkan sebanyak sekitar 480 *link* yang melakukan penjualan obat dan makanan ilegal.

Ke depan, penguatan sistem pelaporan masyarakat, integrasi data pengawasan digital, serta pengembangan teknologi pengawas berbasis AI atau big data menjadi arah yang perlu diperkuat. Pengawasan tak terlihat di dunia maya membutuhkan sistem yang lincah, kolaboratif, dan berbasis risiko agar dapat melindungi konsumen dengan lebih efektif di era perdagangan digital.

b. Adaptasi Sistem Pengawasan terhadap Percepatan Dinamika Pasar

Di tengah derasnya arus perubahan, pasar obat dan makanan mengalami percepatan dinamika yang belum pernah terjadi sebelumnya. Munculnya produk-produk baru dengan inovasi bahan aktif, tren natural dan herbal yang masif, serta perluasan distribusi digital, menuntut adaptasi sistem pengawasan yang cepat dan presisi. Jika tidak diantisipasi, kondisi

ini berisiko menggerus efektivitas pengawasan dan memperbesar celah masuknya produk yang tidak aman.

Bagi BBPOM di Semarang, tantangan tersebut menjadi nyata, terutama saat menghadapi produk dengan klaim berlebihan, formulasi baru yang belum sepenuhnya diatur, dan peredaran online yang sulit dilacak secara konvensional. Ketika sistem pengawasan tidak berkembang secepat pasar, potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat pun meningkat.

Berdasarkan hasil pengawasan Balai Besar POM di Semarang periode 01 Januari - 31 Oktober 2025, ditemukan **9.095 pieces** produk obat tradisional dan suplemen kesehatan Tanpa Izin Edar (TIE) dan/atau mengandung bahan kimia obat (BKO) dengan nilai keekonomian sebesar **Rp 66.876.314,-**

Untuk menjawab hal ini, BBPOM di Semarang terus mendorong transformasi sistem pengawasan berbasis digital dan analisis risiko, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta membangun literasi masyarakat agar lebih kritis dalam memilih produk. Dashboard pemantauan produk, pelatihan deteksi tren pasar, serta pendampingan pelaku usaha menjadi bagian dari langkah preventif yang dilakukan.

Ke depan, ketahanan pengawasan akan sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga untuk berinovasi secara sistemik, berjejaring secara luas, dan tanggap terhadap sinyal perubahan yang muncul dari pasar. Dengan langkah ini, BBPOM di Semarang berkomitmen tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat.

c. Disinformasi dan Hoaks dalam Pengawasan Obat dan Makanan

Di era informasi saat ini, hoaks menjadi ancaman serius yang mengintai kita setiap hari. Dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, dari 2015 hingga 2023, Mafindo telah berhasil mengidentifikasi sebanyak 450 hoaks yang berkaitan dengan obat dan makanan. Sebagai respons, BPOM telah berupaya keras untuk memerangi hoaks ini melalui berbagai klarifikasi dan penjelasan kepada publik. Melalui situs resminya, BPOM telah menyampaikan tidak kurang dari 148 penjelasan publik. Kerja sama antara BPOM dan Mafindo dalam menangkis hoaks pun telah terjalin kuat sejak tahun 2019.

Muatan hoaks Obat dan Makanan yang sering beredar di masyarakat meliputi:

1. Penggunaan klaim menyesatkan. Misal, mengubah cerita, menggunakan kutipan sepotong (tidak utuh), mengutip statistik yang mendukung saja, mengurangi informasi penting lainnya.
2. Penggunaan klaim palsu yang sebenarnya tidak ada.
3. Penggunaan klaim manipulatif. Misal, hasil editan dengan deepfake AI.
4. Penggunaan narasi yang memicu sentimen negatif. Misal, produk disebarkan dengan tujuan menghancurkan generasi
5. Penggunaan narasi narasi yang menjanjikan harapan. Misal, sembuh dalam waktu tiga hari saja.
6. Penggunaan narasi yang memicu rasa takut. Misal, lambung bisa robek jika tidak meminum obat ini.
7. Pengalihan peristiwa internasional seolah menjadi peristiwa domestik (konteks tempat kejadian). Misal, sebuah kebijakan standar kandungan zat di Amerika namun dibuat seolah-olah itu kebijakan di Indonesia

BBPOM di Semarang sebagai UPT dari Badan POM juga berperan untuk menangkal hoaks yang beredar di masyarakat karena hoaks menyebabkan kepanikan, menurunkan kepercayaan kepada BPOM, kesalahpahaman, kecurigaan yang berlebihan, kerugian ekonomi, dan menyesatkan serta dapat membahayakan kesehatan. Tidak ada cara lain untuk menghentikan dan melawan hoaks, selain dua hal yaitu meningkatkan literasi tentang hoaks dan melawan hoaks.

Untuk mengatasi hal tersebut, BBPOM di Semarang melakukan sejumlah upaya strategis, antara lain:

- Mengoptimalkan kanal komunikasi BBPOM di Semarang baik melalui media sosial resmi dan kanal komunikasi digital untuk menangkal hoaks secara cepat, jelas, dan berbasis data ilmiah.
- Mengedukasi masyarakat dengan berbagai topik Obat dan Makanan untuk meningkatkan awareness masyarakat cara memilih Obat dan Makanan yang aman
- Meningkatkan kecepatan respon terhadap isu publik, termasuk dengan menyediakan layanan pengaduan masyarakat yang aktif menerima klarifikasi.
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kampanye anti hoaks dan tips melawan hoaks

BBPOM di Semarang juga mendorong peran aktif masyarakat sebagai mitra pengawasan, termasuk dalam menyaring dan menyebarluaskan informasi yang sahih. Dengan pendekatan kolaboratif dan responsif, pengawasan obat dan makanan tidak hanya akan lebih kuat, tetapi juga lebih dipercaya.

Dalam era keterbukaan informasi, pemberitaan negatif tentang BPOM di media dan media sosial memiliki potensi besar untuk membentuk persepsi publik yang keliru. BBPOM di Semarang menyadari bahwa transparansi, komunikasi responsif, dan kecepatan dalam memberikan klarifikasi adalah kunci menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan data monitoring terbaru menunjukkan dominasi pemberitaan positif, BBPOM terus memperkuat media relations dan kanal komunikasi resmi agar informasi yang benar dan berbasis fakta tersampaikan dengan efektif kepada masyarakat. Tim komunikasi di BBPOM di Semarang juga berperan aktif dalam mengelola isu dan mencegah eskalasi pemberitaan yang dapat menimbulkan mispersepsi terhadap kinerja pengawasan.

d. Ancaman Penyakit Tidak Menular dan Peran Strategis BBPOM di Semarang

Dalam beberapa tahun terakhir, tren kesehatan masyarakat menunjukkan peningkatan signifikan pada prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, jantung, dan kanker. Pola konsumsi masyarakat yang semakin bergeser ke makanan olahan tinggi gula, garam, dan lemak, serta penggunaan produk kesehatan tanpa pengawasan medis, menjadi kontributor utama meningkatnya risiko PTM.

Bagi BBPOM di Semarang, kondisi ini menjadi ancaman yang memerlukan intervensi pengawasan dan edukasi publik secara komprehensif. Produk yang tidak memenuhi standar

keamanan dan mutu, serta klaim kesehatan yang menyesatkan, dapat memperparah kondisi kesehatan masyarakat apabila dikonsumsi terus-menerus tanpa pengendalian.

Untuk menjawab tantangan ini, BBPOM di Semarang telah mengambil sejumlah langkah strategis, antara lain:

Memperketat pengawasan terhadap produk pangan olahan, khususnya yang mengandung kadar gula, garam, dan lemak tinggi. Label GGL (Gula, Garam, Lemak) menjadi bagian penting dalam edukasi konsumen.

Mengawasi iklan dan klaim produk kesehatan, agar tidak menyesatkan konsumen terutama dalam mengklaim dapat menyembuhkan atau mencegah penyakit kronis.

Mendorong pelaku industri untuk berinovasi dengan formulasi yang lebih sehat, seperti produk rendah gula atau bebas *trans fat*.

Menguatkan kampanye Cek KLIK dan literasi gizi melalui media sosial, komunitas sekolah, dan kolaborasi lintas sektor dengan dinas kesehatan, akademisi, serta pelaku usaha.

Mengembangkan sistem pelaporan masyarakat dan *early warning system* terhadap produk yang dicurigai berdampak negatif terhadap kesehatan jangka panjang.

Dengan pendekatan berbasis pencegahan dan partisipasi masyarakat, BBPOM di Semarang berkomitmen menjadi bagian dari solusi dalam menurunkan angka PTM di wilayah Jawa Tengah. Pengawasan tidak hanya soal keamanan produk, tetapi juga kontribusi nyata pada transformasi perilaku konsumsi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

e. Perubahan Demografi dan Epidemiologi

Perubahan struktur demografi dan epidemiologi di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Tengah, membawa konsekuensi penting dalam tata kelola pengawasan obat dan makanan. Peningkatan jumlah penduduk usia lanjut, urbanisasi, dan pola hidup modern memunculkan kebutuhan yang lebih kompleks terhadap produk kesehatan, suplemen, pangan fungsional, dan kosmetik. Di sisi lain, pergeseran epidemiologi dari penyakit menular ke penyakit tidak menular (PTM) menuntut sistem pengawasan yang mampu beradaptasi terhadap risiko baru.

BBPOM di Semarang menghadapi tantangan meningkatnya permintaan terhadap produk-produk kesehatan dan pangan olahan dengan klaim fungsional, yang sering kali tidak diimbangi dengan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi. Risiko beredarnya produk dengan klaim kesehatan yang tidak terbukti, serta meningkatnya konsumsi suplemen tanpa pengawasan, menjadi ancaman nyata terhadap keselamatan konsumen.

Sebagai respons terhadap tantangan ini, BBPOM di Semarang telah dan akan terus melakukan berbagai upaya strategis, antara lain:

- Penguatan pengawasan berbasis risiko dan data populasi, termasuk peningkatan pengawasan terhadap produk yang menyasar kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak.
- Edukasi publik berbasis segmentasi demografis, dengan pendekatan KIE yang disesuaikan karakteristik usia dan kebutuhan informasi kesehatan masyarakat.

- Peningkatan sinergi dengan sektor kesehatan daerah dan akademisi untuk pemantauan tren konsumsi, klaim kesehatan, dan potensi risiko jangka panjang.
- Mendorong inovasi regulasi yang adaptif terhadap perubahan epidemiologi, termasuk untuk produk herbal, suplemen, dan pangan dengan fortifikasi.
- Peningkatan literasi konsumen dan penguatan sistem pelaporan masyarakat melalui kanal digital dan komunitas kader keamanan pangan dan obat.

Ke depan, pengawasan obat dan makanan akan semakin berbasis pada proyeksi kebutuhan penduduk dan pola penyakit dominan. Oleh karena itu, adaptasi kebijakan berbasis data demografi dan tren penyakit menjadi keharusan, demi melindungi masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan.

f. Resistensi Antimikroba (AMR)

Resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) merupakan tantangan serius yang perlu dihadapi secara sistemik oleh BBPOM di Semarang. Penggunaan antibiotik dan antimikroba yang tidak rasional, baik pada manusia, hewan, maupun sektor pertanian, mempercepat munculnya mikroorganisme resisten yang sulit diatasi. Situasi ini tidak hanya mengancam efektivitas pengobatan, tetapi juga menimbulkan potensi risiko terhadap keamanan pangan dan beban pembiayaan kesehatan yang tinggi. Dalam merespons hal ini, BBPOM di Semarang mendorong penguatan pengawasan post-market terhadap sediaan antibiotik, melakukan pelacakan residu pada produk pangan, serta memperkuat sistem pelaporan dan pelacakan digital. Kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan one health terus diperluas, termasuk dengan pelaku usaha, dinas teknis, dan komunitas kesehatan. Edukasi publik dan penguatan laboratorium pengujian juga menjadi langkah penting untuk memastikan ketahanan sistem pengawasan terhadap ancaman AMR.

g. Serangan Siber dan Kebocoran Data

Di era digitalisasi layanan publik, ancaman serangan siber menjadi semakin nyata bagi BBPOM di Semarang, khususnya dalam pengelolaan data pengawasan, informasi publik, dan layanan berbasis elektronik. Risiko seperti ransomware, phishing, dan kebocoran data sensitif tidak hanya mengganggu kinerja internal tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, BBPOM di Semarang berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber, meningkatkan literasi keamanan digital di kalangan pegawai, serta menerapkan sistem monitoring dan audit berkala terhadap akses data dan aplikasi internal. Koordinasi dengan pusat serta otoritas keamanan nasional juga terus diperkuat untuk memastikan kesiapan menghadapi ancaman digital yang semakin kompleks.

h. Ancaman Bioterrorisme

Ancaman bioterrorisme melalui produk obat dan makanan menuntut kesiapsiagaan BBPOM di Semarang dalam aspek deteksi dini, pengawasan rantai distribusi, dan koordinasi lintas sektor. BBPOM menyadari bahwa kontaminasi disengaja dapat menciptakan krisis kesehatan dan ketidakpercayaan publik secara masif. Oleh karena itu, penguatan sistem pelaporan cepat, pengujian laboratorium berstandar tinggi, dan peningkatan kapasitas penanganan krisis menjadi prioritas. BBPOM di Semarang juga menjalin kemitraan strategis dengan aparat

penegak hukum dan dinas teknis daerah untuk memperkuat deteksi dini terhadap potensi ancaman bioterorisme yang menyasar produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Terkait hal tersebut BBPOM Semarang terdapat 5 pegawai yang telah mengikuti pelatihan Pengawasan Keamanan Radiasi CS-137 pada pangan.

i. Keterbatasan PFM Inklusif

Jumlah Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) inklusif yang masih terbatas di daerah menjadi tantangan bagi BBPOM di Semarang dalam menjangkau wilayah pengawasan yang luas. Rotasi jabatan dan minimnya dukungan dari instansi daerah juga memperlemah efektivitas pengawasan di lapangan. Untuk mengatasi hal ini, BBPOM di Semarang terus membangun komunikasi dengan pemda, BKN, dan Kementerian Dalam Negeri agar penempatan dan penguatan jabatan PFM inklusif dapat lebih terstruktur. Selain itu, BBPOM mendorong peningkatan kapasitas PFM melalui pelatihan dan pemberian dukungan teknis untuk memperkuat fungsi pengawasan lintas wilayah.

Kekuatan (Strength)		Kelemahan (Weakness)	
1	Kinerja Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Internal yang Kuat dan Terukur	1	Kelembagaan dan Susunan Organisasi BPOM yang belum optimal
2	Kerja Sama lintas sektor aktif dan jaringan kerja sama yang solid	2	Keterbatasan distribusi sumber daya manusia (SDM) dan pola rotasi pegawai lintas fungsi yang dinamis
3	SDM pengawasan obat dan makanan yang kompeten dan profesional, serta spesialisasi jabatan yang sesuai fungsi	3	Masih terdapat kesenjangan kompetensi teknis pada aspek manajerial dan sosiokultural
4	Komitmen Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Inovasi dalam rangka implementasi SPBE BBPOM di Semarang		
5	Laboratorium Pengujian yang Terakreditasi		
6	Kapasitas BBPOM di Semarang dalam Mengedukasi dan Memberdayakan Masyarakat sebagai Mitra Pengawasan		
7	Infrastruktur Pelayanan Publik yang memadai		
Peluang (Opportunity)		Ancaman (Threat)	
1	Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja BBPOM di Semarang	1	Kesenjangan Regulasi dan Keterbatasan Pengawasan Produk Obat dan Makanan Secara Daring
2	Meningkatnya Pertumbuhan pasar dan daya saing Industri/Produk Obat dan Makanan di Wilayah Jawa Tengah	2	Adaptasi Sistem Pengawasan terhadap Percepatan Dinamika Pasar
3	Adaptasi Perkembangan Teknologi pada Proses Bisnis BPOM melalui Peningkatan Digitalisasi	3	Disinformasi dan Hoaks dalam Pengawasan Obat dan Makanan
4	PP pengelolaan PNBPN terbaru 2025	4	Ancaman Penyakit Tidak Menular dan Peran Strategis BBPOM di Semarang
5	Ketimpangan Gender	5	Perubahan Demografi dan Epidemiologi
		6	Resistensi Antimikroba (AMR)
		7	Serangan Siber dan Kebocoran Data
		8	Ancaman Bioterrorisme
		9	Keterbatasan PFM Inklusif

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Semarang perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.2.1 Isu Internal

1. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan Pada Tahun 2020, BBPOM di Semarang telah diperkuat melalui peraturan BBPOM di Semarang Nomor 80 Tahun 2017 tentang BBPOM di Semarang yang memuat tugas kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden, fungsi dan kewenangan BBPOM di Semarang. Diperkuat kembali di tahun 2022 melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sejalan dengan mewujudkan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran serta sejalan dengan strategi dan arah kebijakan pemerintah serta perkembangan hukum di bidang pengawasan obat dan makanan.

Badan POM juga berupaya meningkatkan efektivitas dan kinerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan serta adanya perkembangan pengaturan mengenai organisasi unit pelaksana teknis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti menjadi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2. Sumber Daya

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dengan 86% pegawai berpendidikan S1 dan S2, BBPOM DI SEMARANG Semarang memiliki tenaga kerja yang terampil, terlatih, dan memiliki pemahaman mendalam dalam pengawasan obat dan makanan. Pendidikan tinggi ini meningkatkan

kemampuan analisis, inovasi, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam pengujian dan inspeksi.

Dominasi Generasi Milenial (56%) membawa energi, kreativitas, serta kemudahan dalam adopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja. Generasi X (41%) memberikan keseimbangan dengan pengalaman dan ketelitian dalam pengawasan, pengambilan keputusan, serta kepemimpinan. Generasi Z (3%) mulai masuk ke dalam organisasi, memberikan potensi peningkatan keterampilan digital dan perspektif baru dalam pengawasan.

Keberagaman generasi dalam organisasi memungkinkan kombinasi antara pengalaman dan inovasi, sehingga menghasilkan pendekatan kerja yang lebih efektif dan efisien. Tim kerja yang terdiri dari berbagai generasi cenderung lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan, terutama dalam merespons perubahan regulasi dan tuntutan masyarakat. Komposisi SDM yang mayoritas perempuan (81%) juga berpotensi memberikan pelayanan publik yang lebih teliti, komunikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan industri. Keunggulan ini berkontribusi pada peningkatan kepuasan stakeholder, baik itu produsen obat dan makanan maupun masyarakat umum.

ISO Terintegrasi

BBPOM di Semarang telah mengintegrasikan empat sistem manajemen standar internasional, yaitu **ISO 9001 (Mutu)**, **ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan - SMAP)**, **ISO 45001 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja - SMK3)**, serta **ISO/IEC 17025 (Akreditasi Laboratorium)**. Integrasi ini mencerminkan komitmen lembaga untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan aman, sambil memastikan keselamatan kerja dan kompetensi teknis laboratorium.

Sarana dan Prasarana

BBPOM DI SEMARANG Semarang memiliki berbagai **sarana dan prasarana** untuk mendukung tugas pengawasan dan pengujian obat serta makanan. Berikut adalah fasilitas utama yang tersedia:

1. Laboratorium Pengujian

Laboratorium modern dengan peralatan canggih untuk menguji mutu dan keamanan produk:

- Laboratorium Mikrobiologi: Pengujian kontaminasi mikroba pada obat, makanan, dan kosmetik.
- Laboratorium Kimia: Analisis kandungan bahan kimia dalam pangan dan obat.
- Laboratorium Obat dan Narkotika: Pengujian kandungan obat, bahan aktif, serta deteksi zat berbahaya atau ilegal.
- Laboratorium Pangan: Analisis bahan tambahan pangan, cemaran logam berat, serta uji mutu dan keamanan makanan.

2. Fasilitas Pengawasan dan Inspeksi

- Mobil Laboratorium Keliling (Layanan Cekatan): Untuk pengujian cepat di lapangan.
- Fasilitas Inspeksi Lapangan: Digunakan dalam pengawasan industri farmasi, makanan, dan kosmetik.
- Ruang Sampling: Tempat penyimpanan dan pemrosesan sampel sebelum diuji di laboratorium.

3. Ruang Pelayanan dan Administrasi

- Pelayanan Publik & Informasi Konsumen: Memberikan edukasi dan konsultasi terkait obat dan makanan.
- Sistem Informasi & Digitalisasi: Mendukung pemrosesan data, manajemen pengaduan, serta sistem pemantauan produk.
- Ruang Arsip & Dokumentasi: Untuk menyimpan hasil pengujian dan laporan pengawasan.

4. Ruang Edukasi dan Sosialisasi

- Penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha : Siulan (podcast), SOS
- pelatihan internal pegawai dan sosialisasi regulasi kepada stakeholder.

5. Sarana Pendukung

- Ruang Rapat & Koordinasi: Untuk diskusi dan koordinasi tim pengawas.
- Gudang Penyimpanan: Menyimpan bahan dan alat pengujian.
- Area Parkir & Transportasi Operasional: Mendukung mobilitas tim dalam melakukan pengawasan ke lapangan.

1.2.2 Isu Eksternal

1. Program Prioritas Pemerintah yang terkait BBPOM DI SEMARANG

1) Menjamin penyediaan obat untuk Rakyat

A. Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan

Berdasarkan data hasil pengawasan pada sarana produksi dan sarana distribusi yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Semarang pada *catchment* area pengawasan di wilayah BBPOM di Semarang menunjukkan tren peningkatan persentase kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan untuk produksi obat dan makanan. Pada sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan persentase pemenuhan persyaratan dari pelaku distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan masih fluktuatif. Hal ini disebabkan karena munculnya tren baru pasca era pandemi covid baik pada produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang sangat cepat berkembang seiring dengan meningkatnya era digitalisasi.

Data hasil pengawasan pada sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan terangkum pada tabel berikut :

Keterangan	2021		2022		2023	
	MK	TMK	MK	TMK	MK	TMK
Sarana Produksi Obat dan Makanan	51,57%	48,43%	54,96%	45,04%	62,17%	37,83%
Sarana Distribusi Obat dan Makanan	74,8%	25,2%	71,5%	28,5%	78,7%	21,3%

**data hasil pengawasan pada sarana produksi dan distribusi Balai Besar POM di Semarang*

Sarana produksi dan distribusi di wilayah BBPOM di Semarang terus berkembang seiring dengan peningkatan investasi di sektor industri, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, tantangan infrastruktur dan aksesibilitas masih menjadi isu utama, terutama bagi distribusi produk ke wilayah pelosok. Pemerintah provinsi bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas jaringan transportasi dan fasilitas pendukung distribusi, seperti pusat logistik dan gudang penyimpanan, guna memastikan kelancaran aliran barang dari produsen ke konsumen. Di sisi lain, pengawasan terhadap sarana produksi juga diperketat untuk memastikan kualitas produk yang sesuai dengan standar serta menghindari pelanggaran yang dapat merugikan konsumen. Melalui strategi ini, Jawa Tengah berupaya memantapkan posisinya sebagai pusat produksi yang kompetitif dan andal.

Kondisi peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah BBPOM di Semarang dihadapkan pada tantangan terkait peredaran produk ilegal dan produk yang tidak memenuhi standar kesehatan yang berlaku. Balai Besar POM di Semarang terus memperketat pengawasan dan inspeksi terhadap produk yang beredar di pasaran, bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengurangi risiko yang membahayakan kesehatan masyarakat. Upaya edukasi kepada masyarakat tentang bahaya konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal juga terus digencarkan guna meningkatkan kesadaran publik. Selain itu, program sosialisasi dan bimbingan teknis serta pendampingan dilakukan untuk mendukung pelaku usaha agar memenuhi standar keamanan dan kualitas produk, sehingga masyarakat dapat terlindungi dari produk yang tidak aman.

B. Sampling Obat dan Makanan

Berdasarkan data dari website Badan POM www.pom.go.id, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, statistik produk yang mendapatkan persetujuan izin edar dari Badan POM mengalami kenaikan, seperti data terlampir :

Komoditi	Jumlah
Makanan dan Minuman	342.618
Kosmetika	543.310
Suplemen Makanan	9.542
Obat Tradisional	31.749
Obat	21.077
Total	948.296

Data Sampling obat dan makanan yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Semarang dalam kurun waktu tahun 2020 - Oktober 2024 sebesar 15.042 sampel (1,59%) dari total produk yang sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM).

Hal tersebut merupakan tantangan bagi Balai Besar POM di Semarang untuk bisa menjamin bahwa produk yang beredar di provinsi Jawa Tengah terjamin keamanan, mutu dan khasiat. Pelaksanaan sampling yang dilakukan dapat menjadi gambaran yang mewakili terhadap produk yang beredar khususnya di provinsi Jawa Tengah. Selama periode tahun 2020-2024, pelaksanaan sampling dilakukann secara cak dan targeted.

Untuk menjamin bahwa produk yang beredar di provinsi Jawa Tengah aman, bermutu dan berkhasiat dilakukan dengan cara sampling produk dari hulu ke hilir yaitu dari produsen sampai dengan sarana pelayanan. Pelaksanaan sampling tahun 2025-2029 dilakukan secara targeted berdasarkan analisa resiko.

Berdasarkan data dari laporan kinerja Kemenkes Tahun 2023 diperoleh data bahwa :

- Jumlah bahan baku obat dan obat 10 terbesar yang diproduksi dalam negeri tercapai 14 dari target 14 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 100%
- Jumlah vaksin 10 terbesar yang diproduksi di dalam negeri tercapai 12 dari target 12 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 100%

Berdasarkan hal tersebut, Balai Besar POM di Semarang mempunyai peluang untuk bisa menjamin keamanan, mutu dan khasiat bahan obat, obat termasuk vaksinyang diproduksi dalam negeri khususnya agar mempunyai daya saing tinggi dengan bahan obat dan obat yang diproduksi oleh produsen luar negeri. Penjaminan mutu terhadap bahan obat, obat dan vaksin melalui sampling dan pengujian yang dilakukan secara targeted dan / atau berdasarkan analisa resiko.

Selain itu, dalam kurun waktu yang cukup singkat, program JKN telah berkembang pesat dengan cakupan kepesertaan yang telah mencapai lebih dari 200 juta jiwa. Jumlah peserta yang besar ini menjadikan Program JKN sebagai program jaminan kesehatan terbesar di dunia yang diselenggarakan melalui pendekatan lembaga pembayar tunggal. (Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (ISSN 2798-7183 dan E-ISSN 2798-6705) diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan Republik Indonesia) sejak Juli 2021).

Hal tersebut merupakan peluang bagi Balai Besar POM di Semarang untuk ambil bagian dalam penjaminan keamanan, mutu dan khasiat obat yang digunakan pada fasilitas JKN agar

masyarakat mendapatkan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat melalui Sampling dan Pengujian khususnya di sarana JKN.

2) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA)

Hilirisasi merujuk pada strategi pengembangan ekonomi di mana suatu negara atau sektor berusaha untuk meningkatkan nilai tambah pada produk atau komoditas tertentu. Hal ini dapat mencakup langkah-langkah seperti pengembangan industri pengolahan, peningkatan teknologi, diversifikasi produk, dan penguatan rantai pasokan. Sebagai contoh, sebuah negara yang mengandalkan ekspor bahan mentah dapat mengadopsi hilirisasi dengan memproses bahan mentah tersebut menjadi produk jadi, meningkatkan nilai ekonomi yang dihasilkan dari sumber daya alamnya

Sementara itu, industrialisasi fokus pada transformasi suatu masyarakat dari sektor pertanian ke sektor industri. Ini melibatkan pembangunan dan pertumbuhan sektor manufaktur, penggunaan teknologi baru, dan peningkatan kapasitas produksi untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Ini melibatkan pembangunan dan pertumbuhan sektor manufaktur, penggunaan teknologi baru, dan peningkatan kapasitas produksi untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam hayati seperti coklat, kopi, teh, kelapa, rempah-rempah, kayu putih, tanaman herbal, dll, beberapa diantaranya merupakan produk spesifik yang hanya bisa tumbuh di wilayah Jawa Tengah seperti buah carica *Vasconcellea pubescens*, buah parijoto (*Medinilla speciosa*), purwoceng (*Pimpinella pruatjan*). Menurut data dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah produksi tanaman biofarmaka yang mendominasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 adalah komoditas kapulaga (34,35 juta kg) diikuti dengan jahe (33,29 juta kg) dan kunyit (20,57) juta kg). Produksi terbesar komoditas kapulaga berada di Kabupaten Banyumas (10,59 juta kg). Produksi terbesar komoditas jahe berada di Kabupaten Semarang (6,64 juta kg). Produksi terbesar komoditas kunyit berada di Kabupaten Wonogiri (8,61 juta kg).

Dengan adanya kebijakan hilirisasi dan industrialisasi oleh pemerintah maka potensi sumber daya alam hayati ini harus diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah seperti pangan olahan, obat bahan alam, kosmetik maupun suplemen kesehatan. Disinilah BBPOM DI SEMARANG Semarang dapat berperan, dengan cara aktif melakukan KIE dan pendampingan kepada *stakeholder* terkait tata cara dan persyaratan cara produksi yang baik dan mendaftarkan izin edar, serta dalam hal keamanan mutu produk melalui fasilitasi pengujian produk di laboratorium BBPOM DI SEMARANG Semarang. BBPOM DI SEMARANG Semarang juga dapat mengambil peran dalam menjembatani antara pelaku usaha (produsen) dengan pemerintah daerah, peneliti maupun fasilitator.

3) Penegakan hukum Pengawasan Obat dan Makanan ilegal di Jawa Tengah (Cyber Patrol)

Kejahatan obat dan makanan masih terjadi di tengah maraknya sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai instansi maupun *stakeholder* lain mengenai bahaya penggunaan obat dan

makanan ilegal. Kejahatan obat dan makanan ilegal mulai bergeser dari sistem konvensional yang mengharuskan pertemuan antara penjual dan pembeli dengan transaksi langsung menjadi sistem *online* yang menggunakan jaringan internet dalam melakukan penjualan sehingga pembayaran dilakukan melalui virtual dan barang dikirim melalui ekspedisi. Pertumbuhan tingkat penetrasi internet di Indonesia menurut Survei Internet Indonesia APJII (Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia) tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Data menunjukkan tahun 2018 penetrasi internet di Indonesia sebesar 64,80% sedangkan di tahun 2024 naik menjadi 79,50%. Hal ini berarti pengguna internet di Indonesia mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia.¹

Kultur budaya Masyarakat Indonesia yang konsumtif dapat dilihat dari data pengguna internet yang berpartisipasi dalam Harbolnas tahun 2023. Rusdy Sumantri selaku Director of Nielsen IQ Indonesia memaparkan bahwa tahun 2023, nilai transaksi selama Harbolnas mencapai 25.7 Triliun Rupiah, atau meningkat sebanyak 13% dari tahun 2022.² Kemudahan yang ditawarkan pada bisnis penjualan online ini menyebabkan peredaran komoditi Obat dan Makanan juga meningkat termasuk penjualan Obat dan Makanan Ilegal. Beralihnya peredaran Obat dan Makanan dari sistem *offline* menjadi *online* dapat dilihat dari perkara yang ditangani Balai Besar POM di Semarang yaitu pada tahun 2020 sebanyak 33,33% perkara menggunakan *marketplace* dan media sosial untuk penjualan produknya secara *online* menjadi 41, 67% pada tahun 2024.³

Pembentukan SOTK baru di Badan POM dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap semakin kompleksnya kejahatan di bidang Obat dan Makanan seiring dengan kemajuan teknologi digital dan globalisasi telah memperluas jaringan kejahatan, termasuk peredaran obat dan makanan ilegal. Melalui Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan telah dibentuk Deputi Bidang Penindakan yang terdiri dari 4 direktorat yaitu Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Direktorat Siber Obat dan Makanan, dan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Dengan adanya Direktorat Siber Obat dan Makanan diharapkan kinerja Badan POM dalam mengungkap kejahatan obat dan makanan yang dilakukan secara *online* semakin meningkat. Balai Besar POM di Semarang selaku UPT Badan POM berperan dalam melakukan patroli siber yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap *website/akun* yang melakukan distribusi dan pelayanan obat dan makanan ilegal dengan tindak lanjut berupa *take down* atau penelusuran lebih lanjut untuk dikembangkan ke arah penindakan. Hal ini diharapkan dapat mencegah dan mengurangi peredaran obat dan makanan ilegal secara *online*.

Ke depan perlu dilakukan kerja sama yang lebih komprehensif dengan lintas sektor seperti Direktorat Siber POLRI, Kementerian Komunikasi dan Digital, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Dalam Negeri (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), Asosiasi pengguna internet (seperti APJII, IdEA), Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo),

¹ Anonim, "APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang", <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tebus-221-juta-orang>, diakses pada 05 November 2024

² Anonim, "Pemaparan Hasil Riset Harbolnas 2023", <https://idea.or.id/artikel/pemaparan-hasil-riset-harbolnas-2023?lang=id>, diakses pada 05 November 2024

³ Anonim, *Laporan Kemajuan Penyidikan Balai Besar POM di Semarang tahun 2020-2024*

4) Percepatan Penurunan Angka Stunting di Jawa Tengah Melalui KIE

Menurut laporan Studi Status Gizi Indonesia Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Indonesia turun dari 27,7% pada tahun 2019, 24,4% pada tahun 2021, menjadi 21,6% pada tahun 2022 dengan mayoritas terjadi pada anak usia 3-4 tahun sebanyak 6%. Namun angka ini masih belum sesuai dengan standar WHO yang menargetkan kurang dari 20%. Untuk itu, pemerintah berusaha menurunkan angka stunting menjadi 17% pada tahun 2023 dan 14% pada tahun 2024.

Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi di dunia termasuk Indonesia. Stunting merupakan kondisi *irreversible* akibat asupan gizi yang tidak adekuat dan atau infeksi yang berulang/kronis yang terjadi dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), waktu paling kritis dalam periode tumbuh kembang anak. Secara global, stunting berkontribusi sebesar 15-17 persen pada kasus kematian anak.

Stunting memberikan dampak yang merugikan bagi negara, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Stunting pada anak menyebabkan terhambatnya pertumbuhan fisik dan metabolik serta meningkatkan risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) di usia dewasa. Disamping itu stunting dapat menghambat perkembangan kognitif dan motorik anak sehingga berpengaruh pada Tingkat kecerdasan dan produktivitas anak.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting secara *holistic* dan *integratif* melalui koordinasi di antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan data Monitoring Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di wilayah Jawa Tengah, seperti data terlampir* :

	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kasus stunting	Persen (%)	11,9	13,1	9,0	9,4	9,1	8,6
Rerata nasional		12,1	10,9	9,5	8,4	7,1	6,1

* sumber : <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/>

Data diatas menunjukkan bahwa persentase kasus stunting di wilayah Jawa Tengah secara garis besar menunjukkan diatas rerata nasional. Hal ini merupakan peluang bagi Balai Besar POM di Semarang untuk mengambil peran penting dalam percepatan penurunan angka stunting. Upaya pencegahan stunting salah satunya dengan meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi ibu-ibu hamil serta pada keluarga dengan melibatkan PKK, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat RT dan RW serta relawan, dan kita harapkan ini menjadi gerakan bersama di masyarakat. Disamping itu, kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) juga perlu dilaksanakan.

Upaya lainnya dalam mendukung percepatan penurunan stunting yaitu melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan berupa sosialisasi/penyuluhan/pameran yang melibatkan interaksi secara langsung/tatap muka dengan masyarakat dan secara virtual/video conference.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM di Semarang) memiliki peran penting dalam pencegahan stunting melalui pengawasan dan pengendalian keamanan pangan. Beberapa aspek utama dari peran BPOM di Semarang dalam upaya ini:

1. Pengawasan Pangan Fortifikasi

BPOM di Semarang terlibat dalam program fortifikasi pangan, yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi. Fortifikasi ini meliputi penambahan nutrisi pada produk pangan tertentu, seperti garam, tepung terigu, dan minyak goreng sawit. BPOM di Semarang melakukan pengawasan baik sebelum (pre-market) maupun setelah (post-market) produk beredar di pasar, memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan

2. Edukasi dan Advokasi Keamanan Pangan

BPOM di Semarang aktif dalam melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan pangan. Ini termasuk pelatihan bagi kader keamanan pangan di desa-desa untuk memastikan bahwa masyarakat memahami cara mengolah dan menyimpan makanan dengan aman. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi makanan yang dapat berdampak negatif pada kesehatan anak-anak

Identifikasi permasalahan dalam manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar, sehingga pelayanan untuk mencegah dan menurunkan prevalensi stunting belum tersedia dalam skala dan kualitas yang memadai, serta tidak sampai secara lengkap pada kelompok sasaran prioritas, yaitu Remaja, Calon Pengantin, Ibu Menyusui, Ibu Hamil, dan Anak usia 0 – 59 Bulan.

BPOM di Semarang diharapkan dapat memberikan strategi yang tepat dalam upaya penurunan angka stunting di wilayah Jawa Tengah. BPOM di Semarang bekerja sama dengan lintas sektor terkait, termasuk kesehatan dan pendidikan, untuk menciptakan pendekatan yang *holistik* dalam penanganan stunting. Melalui kolaborasi ini, BPOM di Semarang berupaya memastikan bahwa semua intervensi terkait gizi dan kesehatan saling mendukung dan terkoordinasi dengan baik. Dengan langkah-langkah tersebut, BPOM di Semarang berkontribusi secara signifikan dalam upaya pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia, yang merupakan masalah kesehatan masyarakat yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensional.

Tujuan pelaksanaan KIE Tematik dalam Upaya Konvergensi Penanganan Stunting yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang stunting, penyebab, dampak dan pencegahan stunting, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan stunting, diantaranya melalui praktek keamanan pangan dan konsumsi pangan bermutu dan

bergizi, meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai agent of change/role model/duta/kader dalam upaya pencegahan stunting melalui pemberdayaan tokoh masyarakat, kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), kader Dasawisma, komunitas desa, karang taruna, dan lain-lain

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Tematik dalam Upaya Konvergensi Penanganan Stunting di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan perwujudan komitmen untuk berkontribusi aktif dalam upaya percepatan penurunan stunting demi terwujudnya generasi emas 2045.

5) Makan Siang Bergizi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM di Semarang) memiliki peran penting dalam memastikan program **Makan Siang Bergizi** berjalan dengan baik dan aman bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa peran utama BBPOM DI SEMARANG dalam mendukung makan siang yang bergizi:

a. Pengawasan Keamanan Pangan

BBPOM di Semarang memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi masyarakat, termasuk dalam program makan siang bergizi, memenuhi standar keamanan pangan. Ini dilakukan melalui:

- Pengawasan terhadap bahan baku makanan untuk memastikan tidak mengandung bahan berbahaya seperti boraks, formalin, dan pewarna berbahaya.
- Pengecekan izin edar dan label gizi pada produk pangan kemasan.
- Pengawasan terhadap proses produksi makanan agar sesuai dengan standar higiene dan sanitasi.

b. Edukasi dan Sosialisasi Gizi Seimbang

BBPOM di Semarang aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan bergizi seimbang. Beberapa inisiatif yang dilakukan meliputi:

- Kampanye "Cek KLIK" (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih makanan yang aman.
- Sosialisasi tentang pentingnya makanan bergizi di sekolah-sekolah, panti asuhan, dan komunitas.
- Penyuluhan kepada UMKM dan produsen makanan tentang standar keamanan dan kandungan gizi dalam makanan.

c. Pengawasan Produk Makanan di Pasaran

BBPOM di Semarang melakukan inspeksi dan uji laboratorium terhadap produk makanan di pasaran untuk memastikan kualitas dan keamanannya. Jika ditemukan makanan yang tidak memenuhi standar, BBPOM di Semarang dapat memberikan peringatan, menarik produk dari peredaran, hingga memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar.

d. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Sektor Swasta

BBPOM di Semarang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta pelaku industri makanan untuk mendukung program makan siang bergizi, khususnya di lingkungan sekolah dan tempat kerja.

Berikut adalah analisis isu eksternal dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan di BBPOM di Semarang:

1. Perubahan Regulasi Nasional dan Internasional

- Tantangan Kepatuhan terhadap Regulasi Internasional : BBPOM di Semarang harus mengikuti standar keamanan pangan dan sediaan farmasi yang ditetapkan oleh organisasi internasional (seperti WHO atau ASEAN), yang terus diperbarui. Ini memerlukan penyesuaian yang cepat dalam sistem pengawasan agar tetap relevan dengan standar global.
- Dinamika Regulasi Nasional: Perubahan kebijakan atau peraturan dari pemerintah pusat maupun kementerian terkait dapat memengaruhi proses pengawasan. Misalnya, aturan mengenai bahan tambahan pangan atau standar izin edar yang baru memerlukan revisi prosedur pengawasan.

2. Tren Perkembangan Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

- Inovasi Produk yang Cepat: Inovasi dalam sediaan farmasi dan pangan olahan menciptakan produk-produk baru yang memerlukan metode pengawasan khusus. Produk-produk ini, seperti suplemen kesehatan atau pangan fungsional (untuk kebutuhan khusus), memerlukan pemantauan ketat untuk memastikan keamanan bagi konsumen.

3. Tantangan Teknologi Digital

- Peredaran Produk Ilegal Melalui E-commerce: Meningkatnya penjualan produk sediaan farmasi dan pangan olahan melalui platform digital atau e-commerce menyulitkan pengawasan produk yang tidak berizin. Banyak produk ilegal yang beredar secara daring, yang sering kali sulit ditelusuri asal-usulnya.
- Pemalsuan Produk: Teknologi memudahkan pemalsuan produk farmasi dan pangan olahan yang menyerupai produk asli, sehingga konsumen sulit membedakan produk yang aman dengan yang ilegal atau palsu. Ini menjadi tantangan bagi BBPOM di Semarang untuk memperketat pengawasan peredaran secara daring dan mengatasi distribusi produk ilegal.

4. Tingkat Kesadaran dan Permintaan Konsumen yang Berubah

- Kesadaran Publik terhadap Keamanan Pangan dan Obat Meningkat : Masyarakat semakin peduli terhadap keamanan dan kualitas produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Konsumen kini lebih kritis terhadap bahan yang digunakan dalam produk, labelisasi, dan izin BBPOM di Semarang. Ini mendorong BBPOM di Semarang untuk memastikan kualitas produk, terutama bagi produk yang banyak dikonsumsi masyarakat.

- Tuntutan Konsumen atas Produk Berbahan Alami dan Organik: Ada kecenderungan konsumen yang semakin tertarik pada produk yang berbahan alami, organik, atau bebas bahan kimia tertentu. Hal ini menambah tantangan bagi BBPOM di Semarang dalam mengawasi kebenaran klaim tersebut dan menjamin produk tersebut aman dikonsumsi.

5. Ancaman Bahan Baku Impor yang Tidak Terkendali

- Ketergantungan pada Bahan Baku Impor: Banyak industri farmasi dan pangan olahan yang bergantung pada bahan baku impor, terutama bahan-bahan yang tidak diproduksi secara lokal. Risiko adanya bahan berbahaya atau terkontaminasi dalam bahan impor menambah tantangan bagi BBPOM di Semarang untuk memastikan bahwa bahan yang diimpor aman dan sesuai standar.
- Isu Kontaminasi Global : Adanya risiko kontaminasi silang atau kontaminasi bahan kimia pada bahan baku dari negara lain dapat berdampak pada keamanan produk dalam negeri. Kasus-kasus seperti residu pestisida atau bahan kimia berbahaya di pangan impor menjadi isu yang penting dalam pengawasan.

Isu eksternal yang dihadapi BBPOM di Semarang mencakup tantangan dari sisi regulasi yang terus berubah, dinamika pasar yang berkembang cepat, serta kebutuhan akan kolaborasi lintas lembaga. Untuk mengatasi hal ini, BBPOM di Semarang perlu memperkuat pemantauan di platform digital, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, dan memastikan tenaga pengawas selalu siap mengikuti perkembangan regulasi terbaru.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BALAI BESAR POM DI SEMARANG

2.1 Visi

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025- 2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

- 1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
- 3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

- 4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya.

Balai Besar POM di Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam pengawasan obat dan makanan di Wilayah kerjanya yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045", adalah refleksi nyata dari komitmen tersebut.

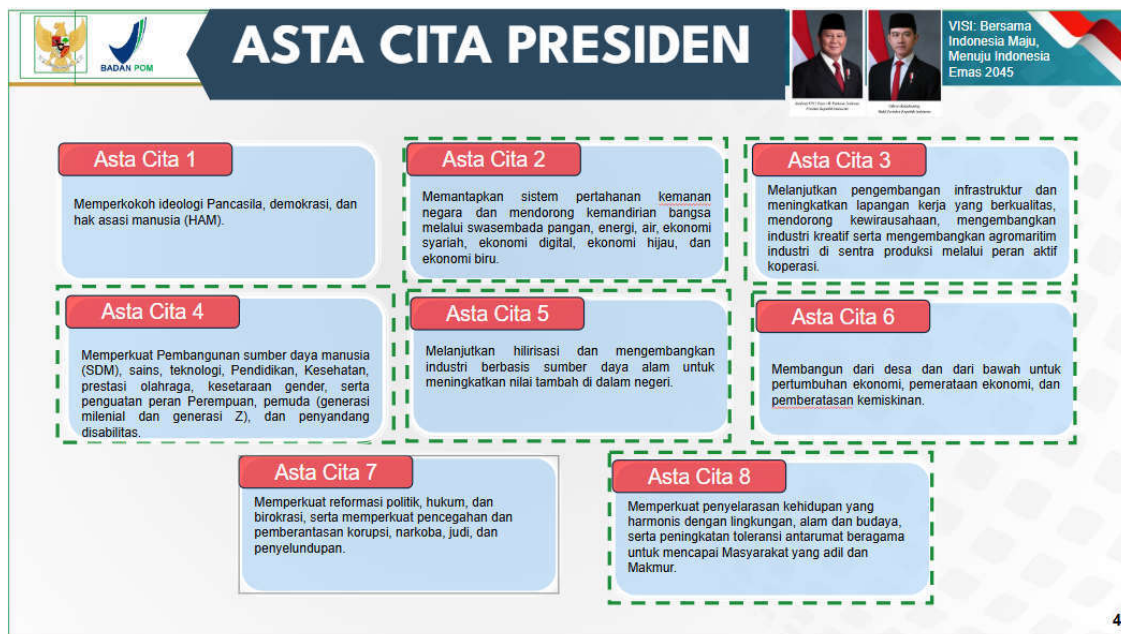
Visi ini menegaskan upaya nyata BPOM untuk memastikan bahwa setiap sediaan farmasi dan pangan olahan aman dikonsumsi, bermutu tinggi, serta memiliki daya saing di tingkat nasional maupun global. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengawasan ketat dari hulu hingga hilir — mulai dari proses produksi, distribusi, hingga produk sampai ke tangan konsumen — guna memastikan standar keamanan, mutu, dan efisiensi terpenuhi. BPOM juga terus mendorong inovasi industri serta memperkuat daya saing pelaku usaha lokal agar mampu menembus pasar internasional.

Visi ini merupakan jembatan penghubung yang kokoh dengan visi BPOM, yaitu "Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong." Di tengah denyut nadi Jawa Tengah, BBPOM di Semarang menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap produk yang beredar di masyarakat adalah produk yang aman, bermutu, dan mampu bersaing. Keamanan dan mutu produk merupakan fondasi utama bagi masyarakat sehat dan sejahtera. Tanpa jaminan ini, sulit rasanya mewujudkan Indonesia Maju yang kita impikan, apalagi mencapai puncak Indonesia Emas 2045.

Melalui kerja keras, integritas, dan semangat gotong royong, BBPOM di Semarang hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penggerak perubahan, memastikan rantai produksi dan distribusi berjalan sesuai standar, melindungi konsumen dari risiko, serta mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi. Dengan demikian, kontribusi BBPOM di Semarang menjadi pilar penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam kesehatan, mandiri dalam penyediaan obat dan makanan, serta berkepribadian kuat berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa.

2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 29 Misi Presiden (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 4, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 29 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1). **Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat**

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan

yang kuat dan terpercaya.

2). Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM

dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3). Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4). Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Dalam rangka mewujudkan **Misi Indonesia 2025-2029** dijabarkan Misi BBPOM di Semarang 2025-2029:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa obat-obatan dan produk pangan yang beredar di masyarakat aman, berkhasiat, dan bermutu. BBPOM di Semarang memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum dengan tidak hanya bertindak sendiri, tetapi juga bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti instansi pemerintah daerah, pelaku usaha,

dan masyarakat. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem pengawasan yang lebih luas dan efektif, terutama dalam mencegah dan menindak pelanggaran seperti peredaran obat ilegal, makanan tanpa izin edar, atau produk palsu.

Misi ini menggambarkan komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memperkuat sistem pengawasan yang efektif, transparan, dan akuntabel terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan. Upaya ini dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat guna mewujudkan ekosistem pengawasan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Sebagai unit pelaksana teknis di daerah, Balai Besar POM di Semarang berperan strategis dalam mengimplementasikan misi tersebut melalui beberapa langkah konkret sebagai berikut:

a. Penguatan Pengawasan Terpadu

BBPOM di Semarang secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di wilayah kerja. Pengawasan dilakukan melalui:

- Pengambilan sampel dan pengujian laboratorium untuk memastikan keamanan, mutu, dan khasiat produk.
- Inspeksi sarana produksi dan distribusi guna menjamin kepatuhan terhadap standar Cara Pembuatan yang Baik (CPOB, CPOTB, CPPB, dan lainnya).
- Penerapan pendekatan pengawasan berbasis risiko (risk-based surveillance) agar sumber daya diarahkan pada area dan komoditas dengan tingkat risiko tertinggi.

b. Penegakan Hukum dan Pencegahan Pelanggaran

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan, BBPOM di Semarang melaksanakan kegiatan penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan, antara lain:

- Menindaklanjuti temuan peredaran obat dan pangan ilegal, kosmetik tanpa izin edar, serta produk mengandung bahan berbahaya.
- Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, serta instansi terkait lainnya dalam rangka penegakan hukum.
- Mengembangkan sistem intelijen pengawasan dan mekanisme pengaduan masyarakat untuk mempercepat proses deteksi dini dan tindak lanjut pelanggaran.

c. Kolaborasi dan Kemitraan Strategis

BBPOM di Semarang aktif menjalin kerja sama lintas sektor dalam rangka memperkuat efektivitas pengawasan. Bentuk kolaborasi dilakukan melalui:

- Koordinasi dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, lembaga pendidikan, dan instansi vertikal terkait dalam pengawasan bersama.
- Pembinaan dan pendampingan teknis kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, agar mampu memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk.
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan melalui kampanye Gerakan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa) serta kegiatan edukasi publik lainnya.

d. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Sebagai upaya pencegahan jangka panjang, BBPOM di Semarang melaksanakan berbagai kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memilih dan mengonsumsi produk yang aman dan legal. Pelaksanaan KIE dilakukan melalui berbagai media, baik secara langsung di komunitas, sekolah, dan lembaga masyarakat, maupun melalui media digital dan sosial untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut, BBPOM di Semarang berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Implementasi misi ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan yang kolaboratif dan berintegritas, sehingga masyarakat terlindungi dari risiko kesehatan dan sektor usaha dapat tumbuh dalam iklim yang sehat, adil, dan berdaya saing.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

Misi ini menegaskan peran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mendorong tumbuhnya dunia usaha yang kuat, berdaya saing, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui peningkatan kapasitas sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dan mitra pembinaan bagi pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agar mampu menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan berdaya saing global.

Sebagai perpanjangan tangan BPOM di daerah, Balai Besar POM di Semarang melaksanakan berbagai upaya nyata untuk mendukung misi tersebut melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Fasilitasi dan Pembinaan UMKM BBPOM di Semarang secara berkelanjutan melaksanakan pendampingan teknis dan pembinaan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, agar mampu memenuhi standar keamanan, mutu, dan kelayakan produksi. Upaya ini diwujudkan melalui:

- Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek), Klinik UMKM, dan Program Pendampingan Intensif bagi pelaku usaha di bidang obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan.
 - Fasilitasi dalam proses perizinan edar melalui asistensi sistem e-registrasi dan penjelasan regulasi yang mudah dipahami oleh pelaku usaha.
 - Pendampingan dalam penerapan Cara Produksi yang Baik (CPB) sesuai kategori produk untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan mutu.
- b. Mendorong Daya Saing Industri Lokal
- Dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, BBPOM di Semarang berperan dalam peningkatan daya saing industri lokal dengan cara:
- Mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi produk dan pengemasan, serta meningkatkan efisiensi proses produksi agar kompetitif di pasar domestik maupun ekspor.
 - Memberikan advokasi dan asistensi regulasi bagi pelaku usaha dalam menghadapi tantangan pasar global dan sertifikasi mutu produk.
- c. Kolaborasi dan Sinergi
- BBPOM di Semarang membangun kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mempercepat pengembangan dunia usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, antara lain:
- Bersinergi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta lembaga akademik dan lembaga sertifikasi mutu.
 - Melaksanakan program pembinaan terpadu lintas sektor yang menggabungkan pengawasan, pembinaan, dan fasilitasi teknis bagi UMKM di wilayah Jawa Tengah.
 - Menjalani kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam mendukung inovasi dan peningkatan mutu produk lokal.
- d. Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Daerah
- Selain fokus pada pengawasan dan pembinaan industri, BBPOM di Semarang juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan yang mendorong tumbuhnya wirausaha baru. Kegiatan tersebut meliputi:
- Pelatihan berbasis komunitas dalam produksi pangan olahan dan kosmetik yang memenuhi standar keamanan.
 - Edukasi dan pendampingan bagi kelompok masyarakat produktif untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kesadaran terhadap regulasi BPOM.
 - Fasilitasi promosi produk lokal aman dan bermutu melalui pameran, kampanye publik, dan kegiatan edukatif.

Melalui kegiatan pembinaan, fasilitasi, dan sinergi lintas sektor, BBPOM di Semarang berperan aktif dalam mendukung misi BPOM untuk mempercepat pengembangan dunia usaha sediaan farmasi dan pangan olahan. Upaya tersebut tidak hanya memperkuat struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pemberdayaan UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi besar BPOM dalam mendukung Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Misi ini menekankan peran penting Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam meningkatkan kapasitas, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat terhadap keamanan dan mutu sediaan farmasi serta pangan olahan. Penguatan kapasitas masyarakat tidak hanya bertujuan agar mereka mampu menjadi konsumen yang cerdas dan terlindungi, tetapi juga agar masyarakat berperan aktif sebagai mitra pengawasan dan pendorong pembangunan ekonomi sehat.

Pencapaian misi ini dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, media, dan komunitas masyarakat.

Sebagai unit pelaksana teknis BPOM di daerah, Balai Besar POM di Semarang memiliki peran strategis dalam mewujudkan misi tersebut melalui berbagai program dan kegiatan berikut:

a. Peningkatan Kapasitas dan Kesadaran Masyarakat

BBPOM di Semarang melaksanakan berbagai kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berizin edar. Upaya ini diwujudkan seperti

- Sosialisasi Gerakan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa) di berbagai kalangan masyarakat.
- Pelaksanaan edukasi langsung di sekolah, kelompok PKK, komunitas, dan pasar tradisional sebagai bagian dari program pembinaan berbasis masyarakat.
- Pemanfaatan media digital dan media sosial untuk penyebarluasan pesan edukatif secara lebih luas, efektif, dan berkelanjutan.

b. Pengembangan Kemitraan Strategis Lintas Sektor

Dalam rangka memperluas jangkauan dan efektivitas program edukasi serta pengawasan partisipatif, BBPOM di Semarang mengembangkan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain:

- o Pemerintah daerah, melalui kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Koperasi dan UMKM dalam kegiatan sosialisasi, pengawasan terpadu, serta pembinaan pelaku usaha dan masyarakat.
 - o Lembaga pendidikan dan perguruan tinggi, dalam rangka pengembangan riset bersama, pelatihan kader keamanan pangan, dan program kampus binaan.
 - o Media massa dan komunitas masyarakat, sebagai mitra dalam menyebarluaskan informasi yang benar terkait keamanan obat dan makanan, sekaligus menangkal hoaks yang dapat menyesatkan publik.
- c. Pemberdayaan Komunitas dan Kader Keamanan Pangan BBPOM di Semarang aktif membentuk dan membina kader keamanan pangan serta komunitas peduli obat dan makanan aman di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah. Upaya ini meliputi:
- o Pelatihan dan pembinaan kader masyarakat agar mampu melakukan pemantauan sederhana dan pelaporan cepat terhadap temuan produk ilegal atau berisiko.
 - o Fasilitasi kegiatan desa pangan aman, sekolah dengan kantin sehat, dan pasar pangan aman berbasis komunitas.
- d. Kolaborasi untuk Peningkatan Kemandirian dan Kesadaran Publik
- BBPOM di Semarang juga melaksanakan kegiatan kolaboratif dengan berbagai sektor dalam meningkatkan kemandirian masyarakat di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, antara lain:
- o Penyelenggaraan forum koordinasi lintas sektor dalam rangka penguatan jejaring pengawasan dan pelaporan berbasis masyarakat.
 - o Pembinaan masyarakat agar mampu menjadi pengawas mandiri, sekaligus pendorong terbentuknya lingkungan yang sadar keamanan pangan dan obat.
 - o Pelibatan masyarakat dalam peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia (*World Food Safety Day*) dan kegiatan kampanye publik lainnya untuk memperkuat kesadaran kolektif.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, BBPOM di Semarang secara konsisten melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat integritas kelembagaan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini selaras dengan semangat reformasi birokrasi dan visi BPOM untuk menciptakan lembaga pengawasan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

BBPOM di Semarang berkomitmen untuk terus memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung transparansi dan efisiensi proses layanan publik, termasuk dalam pelayanan registrasi, pengawasan, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat. Selain itu, penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi langkah nyata dalam membangun budaya kerja yang berlandaskan integritas dan profesionalisme.

Dari sisi pelayanan publik, BBPOM di Semarang terus meningkatkan kualitas layanan melalui penerapan standar pelayanan prima, penyederhanaan prosedur layanan, serta optimalisasi layanan berbasis digital agar masyarakat dan pelaku usaha dapat mengakses informasi serta layanan pengawasan secara cepat, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, BBPOM di Semarang secara berkelanjutan melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan penguatan nilai-nilai ASN BerAKHLAK untuk memastikan setiap pegawai mampu memberikan kinerja yang unggul, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

Dengan berbagai langkah tersebut, BBPOM di Semarang berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, sekaligus menjadi institusi pengawasan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, guna mendukung terciptanya masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing.

Balai Besar POM di Semarang sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM

2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut.:

Tabel 5 Indikator Tujuan 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74,75	76,4	77,75	79,45	80,7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,2	88,6	88,9	89,2	89,4
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63,6	66,2	69,3	72,7	76,7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,4	75,9	77,1	78,5	79,9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96,3	96,35	96,4	96,45	96,5

Untuk mengukur ketercapaian tujuan BBPOM di Semarang 2025-2029, telah disusun lima tujuan strategis beserta indikator dan target capaian kinerja selama lima tahun ke depan yang dijabarkan dalam indikator kinerja utama pada sasaran strategis BBPOM di Semarang 2025-2029. Berikut penjelasan masing-masing tujuan beserta arah kebijakan yang akan diambil:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang

Indikator yang digunakan adalah *persentase sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu*, termasuk produk PIRT. Target indikator ini terus meningkat dari 74,75% pada tahun 2025 menjadi 80,2% pada tahun 2029. Kenaikan ini mencerminkan komitmen BBPOM di Semarang dalam meningkatkan kualitas produk yang beredar di masyarakat melalui intensifikasi pengawasan, pembinaan pelaku usaha, serta penguatan laboratorium pengujian. Strategi ke depan mencakup pendekatan pengawasan berbasis risiko dan peningkatan pemanfaatan teknologi dalam deteksi dini terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang

Tingkat kesadaran masyarakat diukur melalui *Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu*. Target indeks ini menunjukkan tren positif, dari 88,20% pada tahun 2025 menjadi 89,40% pada tahun 2029. Kenaikannya tergolong tidak signifikan, hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat sudah tinggi namun tetap perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. BBPOM di Semarang berupaya memberdayakan masyarakat agar mampu memilih dan mengonsumsi produk yang aman dan berkualitas secara mandiri. Edukasi dan informasi yang masif akan menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan ini, oleh karena itu BBPOM di Semarang akan memperkuat strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui pendekatan multiplatform, kolaborasi dengan komunitas lokal, dan melibatkan peran aktif generasi muda serta kelompok rentan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri serta Kemandirian Bangsa di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang

Indikator yang digunakan adalah *Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*. Target indeks ini mengalami peningkatan signifikan dari 63,6% pada tahun 2025 menjadi 76,6% pada tahun 2029. Hal ini mencerminkan upaya strategis dalam memberdayakan pelaku usaha, khususnya UMKM, agar dapat memenuhi standar keamanan dan mutu serta memiliki daya saing tinggi. BBPOM di Semarang akan memperkuat program fasilitasi sertifikasi, pendampingan regulasi, pelatihan teknis, dan penyederhanaan prosedur layanan publik bagi pelaku usaha kecil dan menengah sehingga pelaku usaha dapat berdaya saing di pasar global.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang

Indikator efektivitas diukur melalui *Indeks Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*, dengan target kenaikan dari 74,4% pada tahun 2025 menjadi 79,9% pada tahun 2029. Ini menunjukkan pentingnya penguatan fungsi penegakan hukum sebagai bagian integral dari perlindungan masyarakat. BBPOM di Semarang akan meningkatkan kerja sama lintas sektor (kepolisian, kejaksaan, dinas kesehatan, organisasi profesi), memperluas sistem pelaporan masyarakat, serta menerapkan digitalisasi dalam proses pelacakan dan analisis peredaran produk ilegal.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif, dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang

Indikator kinerja organisasi diukur melalui *Indeks Reformasi Birokrasi (RB) BPOM*, dengan target stabil tinggi dari 96,3% pada tahun 2025 hingga 96,5% pada tahun 2029. Ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang diarahkan untuk mempertahankan kualitas manajemen organisasi, tata kelola, serta layanan publik yang akuntabel dan responsif. Strategi yang dilakukan antara lain penguatan sistem manajemen kinerja, pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik, serta pembangunan budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan pelayanan prima.

Balai Besar POM di Semarang sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM."

2.4 Sasaran Kegiatan BBPOM di Semarang

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai Besar POM di Semarang, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Semarang akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar POM di Semarang berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), Balai Besar POM di Semarang berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai Besar POM di Semarang
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. Balai Besar POM di Semarang berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. Balai Besar POM di Semarang harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk.

Untuk itu, Balai Besar POM di Semarang berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, Balai Besar POM di Semarang berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Semarang.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, Balai Besar POM di Semarang mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Balai Besar POM di Semarang berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Semarang.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan Balai Besar POM di Semarang merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Semarang
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang
- d. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Semarang

Tabel 6 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator

Visi:
"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan pelanggaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PRT dan MBG) yang aman dan bermutu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: 1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu 2. Persentase Pangan Olahan dan PRT yang aman dan bermutu 3. Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu 4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 6. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Indikator: 1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 6. Persentase kepatuhan anekdotasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 12. Persentase label produk tambakau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2025-2029) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Indikator: Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
	Terwujudnya Perindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penindakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Indikator: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Indikator: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemendirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM Indikator: Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemendirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemendirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu Indikator: Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOOB pangan olahan
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya efektivitas KIE Indikator: 1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima Indikator: Indeks RB BPOM	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima Indikator: Indeks RB BPOM	Layanan Publik UPT yang prima Indikator: Indeks Pelayanan Publik UPT Terwujudnya tatakelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal Indikator: 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Sebagai upaya memastikan pencapaian sasaran kegiatan secara efektif, dilakukan identifikasi terhadap potensi risiko beserta langkah pengendalian dan penanggung jawabnya. Matriks berikut memuat keterkaitan antara setiap Sasaran Kegiatan dengan Indikasi Risiko, Perlakuan Risiko, serta Indikasi Penanggung Jawab perlakuan risikonya.

Tabel 7 Matriks Indikasi Risiko

No.		Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
1	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Sarana pelayanan kesehatan tidak melaporkan KTD/ESO di dalam sistem e-meso	1. Bimtek pelaporan e-meso 2. Follow up ke faskes peserta bimtek pelaporan e-meso untuk pelaporan KTD/ESO melalui e-meso	Inspeksi
2	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Pembuatan Surat Tindak Lanjut hasil pemeriksaan sarana Produksi/Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melebihi timeline	1. Monitoring berkala 2. Penunjukan Petugas Monitoring hasil pemeriksaan sarana Produksi	Inspeksi
3	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Feedback CAPA hasil pemeriksaan Sarana produksi/ distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan belum seluruhnya dibuat oleh sarana.	1. Monitoring berkala 2. Penunjukan Petugas Monitoring hasil pemeriksaan sarana Produksi/ distribusi 3. Pencantuman Nomor Layanan Inspeksi (08895166322) pada surat tindak lanjut 4. Merancang aksi agen perubahan untuk percepatan pembuatan CAPA berupa JAMU SERBAT (Janji Temu Solusi Evaluasi Responsif Perbaikan dan Pencegahan Terintegrasi) 5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan JAMU SERBAT	Inspeksi
4	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Timeline pengujian tidak tercapai	1. Pemeliharaan dan kalibrasi peralatan/instrumen sesuai perencanaan 2. pengusulan kebutuhan alat lab dan suku cadang/ usulan perbaikan 3. Koordinasi dengan bagian pengadaan untuk	Pengujian

RENCANA STRATEGIS 2025-2029
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Semarang

No.	Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
				mempercepat proses pengadaan suku cadang	
5	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Evaluasi Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (CAPA) dari sarana Produksi/ distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan belum seluruhnya dilakukan petugas	1. Monitoring berkala 2. Penunjukan Petugas Monitoring hasil pemeriksaan sarana Produksi/ distribusi 3. Merancang aksi agen perubahan untuk percepatan pembuatan CAPA berupa SiMONCER (Sistem Informasi Monitoring Evaluasi CAPA Terintegrasi) 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SiMONCER	Inspeksi
6	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Kader keamanan pangan kurang tepat dalam mengambil kesimpulan hasil uji	Verifikasi hasil uji oleh petugas BBPOM Semarang, dan melakukan uji ulang terhadap hasil uji yg Tidak Memenuhi Syarat (TMS).	Infokom
7	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Timeline pengujian tidak tercapai	1. Koordinasi dengan masing masing Balai untuk mengatur proses pengiriman sampel 2. Monitoring dan evaluasi internal balai setiap bulan dan triwulan untuk Region Semarang 3. Merancang aksi agen perubahan berupa sistem pemantauan dan peringatan waktu pengujian sehingga yaitu STARS (Sample Tracking Alert System) 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan STARS	Pengujian
8	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Pengujian tidak dapat dilakukan	1. Meningkatkan ketertiban perawatan dan pemeliharaan peralatan/instrumen 2. pengusulan kebutuhan alat lab dan suku cadang/ usulan perbaikan 3. Koordinasi dengan bagian pengadaan untuk	Pengujian

RENCANA STRATEGIS 2025-2029
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Semarang

No.	Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
				mempercepat proses pengadaan suku cadang	
9	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Kebutuhan test kit tidak tercukupi	1. Menyusun perencanaan kebutuhan test kit 2. Koordinasi dengan penyedia	Pengujian
10	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Pelaporan hasil pengujian ke Badan POM mengalami keterlambatan	1. Koordinasi dengan bagian Tata Usaha untuk memperbaiki jaringan internet 2. Melaporkan kendala-kendala SIPT yang terjadi di Balai ke Pusdatin Badan POM ,melalui aplikasi Help Pusdatin 3. Mengkomunikasikan dengan Inspeksi, bidang Tata Usaha dan admin Balai 4. Evaluasi Pelaporan sampel secara SIPT	Pengujian
11	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Sampel Sediaan Farmasi, Pangan Olahan, PIRT yang diperiksa tidak sesuai standar/ pedoman	1. Pelatihan sampling sediaan farmasi dan pangan olahan 2. Penunjukan petugas sampling berdasarkan komoditi 3. Monitoring kesesuaian kategori sampel oleh petugas	Inspeksi
12	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Pelaporan Hasil pengawasan Iklan tidak tepat waktu (maksimal tanggal 10 bulan berikutnya)	1. Penunjukan petugas Monitoring pelaporan 2. Monitoring berkala	Inspeksi
13	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Evaluasi penandaan dan iklan tidak sesuai dengan pedoman	1. Penunjukan petugas Monitoring dan verifikasi hasil evaluasi penandaan/ iklan 2. Monitoring berkala	Inspeksi
14	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Petugas BBPOM Semarang menyalahgunakan fasilitas CSR (tes kit dan transport lokal untuk	1. Disusun perjanjian kerjasama antara pelaku usaha, BBPOM di Semarang, dan tim penggerak PKK 2. Penandatanganan Pakta	Infokom

RENCANA STRATEGIS 2025-2029
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Semarang

No.	Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
			kader PKK) yang seharusnya diberikan kepada kader PKK	Integritas oleh petugas 3. Pengaduan melalui saluran Lapor Kabalai	
15	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Resiko penolakan masyarakat (Serangan verbal dan fisik terhadap petugas)	1. Pendekatan humanis terhadap pengelola pasar 2. Koordinasi dengan sarana tempat pelaksanaan layanan Cekatan 3. Koordinasi dengan Subtansi Infokom untuk penunjukan personel dan penyediaan bahan KIE 4. Memberikan penugasan kepada personel yang kompeten dan berpengalaman 5. Memantau Form Hasil Pengujian Membuat pelaporan hasil uji cepat dan dikomunikasikan dengan pedagang dan pengelola 6. Melakukan monev terhadap hasil uji (membuat trend hasil) 7. Mengkomunikasikan hasil monev terhadap pengelola sarana pelaksanaan layanan Cekatan	Pengujian
16	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Pelaksanaan kegiatan anggaran DAK NF BOK POM oleh Kabupaten/ Kota tidak mencapai target	1. Penunjukan melalui SK Tim sebagai pengawal kegiatan DAK. 2. Monitoring capaian kegiatan DAK melalui aplikasi smart POM. 3. Koordinasi intensif dengan Penanggungjawab DAK Kab/Kota melalui WAG/telpon.	Inspeksi
17	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Petugas sampling salah dalam pemeriksaan dan memasukkan data sampel di SIPT	1. Penunjukan verifikator sampel 2. Monitoring kesesuaian evaluasi sampel oleh verifikator	Inspeksi

RENCANA STRATEGIS 2025-2029
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Semarang

No.	Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
18	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Petugas menerima suap dari pelaku usaha	1. Koreksi bertingkat 2. Penandatanganan Pakta integritas 3. Pengisian survei integritas pegawai BBPOM di Semarang melalui http://bit.ly/SurveyIntegritasPegawaiBBPOM (sibergas)	Inspeksi
19	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Evaluasi hasil pemeriksaan sarana tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya	1. Saluran Whistle Blower System 2. Saluran pengaduan langsung ke Kepala Balai 3. Koreksi bertingkat	Inspeksi
20	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Kesalahan sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, antara lain seperti keberulangan sampling dengan nomor batch yang sama, sampel obat yang disampling tidak sesuai dengan kemampuan uji	1. Monitoring/ kontrol realisasi sampling dengan Kartu Stok sampling/ database 2. Link data kemampuan uji laboratorium Regional Semarang 3. Penunjukan petugas monitoring hasil sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Inspeksi
21	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Timeline pengujian sampel kasus tidak tercapai	1. Meningkatkan kontinuitas perawatan dan pemeliharaan terhadap alat 2. Kaji Ulang timeline sampel kasus dengan parameter uji lebih dari 3 parameter uji 3. Koordinasi tim inspeksi, penindakan dan lab untuk ketersediaan alat dan bahan sebagai parameter sampel kasus 4. Penggunaan aplikasi team Viewer	Pengujian
22	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Pengadaan Reagen Kimia, Media Mikrobiologi membutuhkan waktu yang lebih lama dan dana lebih besar	1. Komunikasi antara PPK, pantek, penyedia dan LKPP mengenai sistem e catalog 2. Koordinasi dengan Pantek dengan penanggung jawab gudang reagen 3. Penggunaan aplikasi SiPeran mempermudah penyusunan kebutuhan reagen	Pengujian

RENCANA STRATEGIS 2025-2029
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Semarang

No.	Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
23	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan diperiksa secara daring	1. Mengajukan revisi anggaran 2. Penetapan kriteria pemeriksaan secara luring/daring	Inspeksi
24	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Petugas mendapatkan suap dari pelaku usaha	Koreksi bertingkat hasil evaluasi di tandatangi berjenjang, sehingga ada filter akhir sebelum dokumen sah	Inspeksi
25	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Petugas melakukan pemerasan	1. Saluran Whistle Blower System 2. Pembuatan Surat Tugas melalui aplikasi si Adits yang mencantumkan "Petugas tidak diperkenankan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun" 3. Rotasi penugasan pegawai ke sarana 4. Saluran pengaduan langsung ke Kepala Balai 5. Pengisian survei integritas pegawai BBPOM di Semarang melalui http://bit.ly/SurveiIntegritasPegawaiBBPOM (sibergas)	Inspeksi
26	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Pemeriksaan sarana tidak objektif	1. Update data benturan kepentingan melalui http://sangintegritas.pom.go.id 2. Rotasi penugasan pegawai ke sarana 3. Penandatanganan Pakta Integritas	Inspeksi
27	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Petugas menerima suap dari pelaku usaha	1. Saluran Whistle Blower System 2. Susunan tim minimal 2 orang atau lebih 3. Saluran pengaduan langsung ke Kepala Balai	Inspeksi
28	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Tidak ada sampel KLB yang bisa disampling atau yang masuk ke BBPOM di Semarang	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Propinsi dan Kab/Kota terkait	Inspeksi

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang

No.	Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
29	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Mark-up harga sampel	1. Saluran Whistle Blower System 2. Pembuatan Surat Tugas melalui aplikasi si Adits yang mencantumkan "Petugas tidak diperkenankan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun" 3. Rotasi penugasan pegawai ke sarana 4. Saluran pengaduan langsung ke Kepala Balai yang dicantumkan pada mobil operasional/ presentasi kegiatan sosialisasi 5. Pengisian survei integritas pegawai BBPOM di Semarang melalui http://bit.ly/SurveiIntegritasPegawaiBBPOM (sibergas)	Inspeksi
30	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Pemilihan sarana tidak objektif	Penetapan kajian risiko berdasarkan database sarana produksi/ distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Inspeksi
31	2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Penetapan rencana pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi tidak sesuai pedoman	Penetapan kajian risiko berdasarkan database sarana produksi pangan fortifikasi	Inspeksi
32	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Kerusakan alat Lab tidak dapat segera diperbaiki	1. Kerjasama dengan pihak ke 3 untuk perawatan alat, memanfaatkan layanan purna jual dari penyedia alat 2. Melakukan koordinasi dan pengujian di Balai lain.	Pengujian
33	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Sebagian sampel Regionalisasi tidak dapat dilaksanakan pengujian di BBPOM Semarang	1. Meningkatkan ketertiban perawatan dan pemeliharaan peralatan/instrumen 2. pengusulan kebutuhan alat lab dan suku cadang/ usulan perbaikan 3. Koordinasi dengan bagian pengadaan untuk mempercepat proses pengadaan suku cadang	Pengujian

No.	Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
34	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium sesuai standar GLP tidak tercapai	1. Menyusun dokumen GAP kebutuhan peralatan laboratorium 2. Pengajuan kebutuhan peralatan 3. Kerjasama antar laboratorium dalam penggunaan peralatan laboratorium	Pengujian
35	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Target pemenuhan Standart Ruang Lingkup pengujian tidak tercapai	1. Pemeliharaan dan kalibrasi peralatan/instrumen sesuai perencanaan 2. pengusulan kebutuhan alat lab dan suku cadang/ usulan perbaikan 3. Koordinasi dengan bagian pengadaan untuk mempercepat proses pengadaan suku cadang 4. Koordinasi dengan bagian pengadaan untuk mempercepat proses pengadaan bahan baku	Pengujian
36	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Pemenuhan metoda analisa yang diverifikasi sesuai standar GLP tidak tercapai	1. Pemeliharaan dan kalibrasi peralatan/instrumen sesuai perencanaan 2. pengusulan kebutuhan alat lab dan suku cadang/ usulan perbaikan 3. Koordinasi dengan bagian pengadaan untuk mempercepat proses pengadaan suku cadang dan bahan baku 4. Menyusun rencana verifikasi MA	Pengujian
37	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Pemenuhan kompetensi SDM sesuai standar GLP tidak tercapai	1. Menyusun kebutuhan dan perencanaan pelatihan 2. Monitoring dan evaluasi efektivitas pelatihan 3. Kepenyelaaan personil baru	Pengujian

No.	Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
38	3	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Kegiatan pemberdayaan kader keamanan pangan desa tidak berjalan berjalan baik	1. Komunikasi intensif 2. Pendampingan berkelanjutan 3. Monev terhadap kegiatan yang sudah dilakukan oleh kader/tim keamanan pangan Desa tiap tahun 4. Merancang aksi agen perubahan untuk menyebarkan informasi terkait obat dan makanan kepada masyarakat, kader (termasuk kader desa) dan komunitas yaitu SHARA SEHAN (SHaring InfoRmAsi Tentang Obat dan Pangan SEHat serta AmAN) 5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SHARA SEHAN	Infokom
39	3	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Kegiatan pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah tidak berjalan baik	1. Komunikasi intensif 2. Pendampingan berkelanjutan 3. Merancang aksi agen perubahan untuk menyebarkan informasi terkait obat dan makanan kepada masyarakat, kader (termasuk kader sekolah) dan komunitas yaitu SHARA SEHAN (SHaring InfoRmAsi Tentang Obat dan Pangan SEHat serta AmAN) 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SHARA SEHAN	Infokom
40	3	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Petugas pasar kurang tepat dalam melakukan sampling, menentukan parameter uji, dan menentukan kesimpulan hasil uji	1. Komunikasi intensif 2. Pendampingan berkelanjutan	Infokom
41	3	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan Kejadian Tidak Diinginkan / Efek Samping Obat	Memasukkan materi KTD/ESO dalam kegiatan KIE	Infokom

RENCANA STRATEGIS 2025-2029
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Semarang

No.	Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
42	3	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Kerja sama tidak berjalan maksimal	1. Koordinasi dengan mitra kerja sama 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama	Infokom
43	3	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Masyarakat tidak tertarik mengakses sehingga tidak terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan yang aman	1. Pelatihan tentang promosi yang efektif dan design grafis 2. Merancang aksi agen perubahan untuk mengedukasi masyarakat melalui platform sosial media yang bersifat dua arah yaitu Cerita OMA (Ceriwis Fakta Obat dan Makanan) 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Cerita OMA 4. Merancang aksi agen perubahan untuk menyebarkan informasi terkait obat dan makanan kepada masyarakat, kader dan komunitas yaitu SHARA SEHAN (SHaring InfoRmAsi Tentang Obat dan Pangan SEHat serta AmAN) 5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SHARA SEHAN	Infokom
44	3	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Petugas menerima hadiah atas Kegiatan KIE yang sudah dilakukan dan memuaskan .	1. Penandatanganan Pakta Integritas oleh petugas 2. Pelaporan melalui saluran Lapor Ka Balai	Infokom
45	3	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Masyarakat kurang puas terhadap pelaksanaan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Langsung kepada Masyarakat	1. Koordinasi intensif dengan panitia daerah 2. Melakukan evaluasi penyelenggaraan KIE	Infokom
46	3	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Materi Iklan/konten promosi melalui media elektronik, cetak, luar ruang tidak mudah dipahami oleh penerima pesan (masyarakat)	Meningkatkan kompetensi petugas tentang promosi yang efektif	Infokom
47	3	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Materi Iklan/konten promosi melalui media sosial tidak mudah	Meningkatkan kompetensi petugas tentang promosi yang efektif	Infokom

No.	Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
			dipahami oleh penerima pesan (masyarakat)		
48	4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Target pendampingan UMKM tidak tercapai	1. melakukan seleksi yang ketat terhadap UMKM yang menjadi prioritas pendampingan diminta melampirkan video tempat produksi 2. Menetapkan aksi agen perubahan berupa program pendampingan UMKM dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh izin edar yaitu PIJAR MENTARI (Pendampingan Ijin Edar Menuju UMKM Pintar dan Mandiri) 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PIJAR MENTARI	Sertifikasi
49	5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Identitas petugas intelijen terdeteksi	1. Peningkatan kompetensi petugas intelijen 2. Perencanaan cover petugas intelijen	Penindakan
50	5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Ketidaksesuaian hasil investigasi dengan kondisi saat dilakukan penindakan	1. Pemastian informasi menjelang penindakan	Penindakan
51	5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Tersangka melarikan diri	1. Peningkatan koordinasi dengan kepolisian untuk upaya penangkapan	Penindakan
52	5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Petugas Menerima Suap Pada Tahap Pemberkasan	1. Penerapan ISO 37001 : 2016 SMAP	Penindakan
53	5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Upaya Penyuaan terhadap petugas termasuk ancaman kepada petugas	1. Penerapan ISO 37001 : 2016 SMAP	Penindakan

RENCANA STRATEGIS 2025-2029
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Semarang

No.	Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
54	5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Jumlah barang bukti tidak sesuai dengan fakta di lapangan	Menambah sumber daya manusia pengelola barang bukti	Penindakan
55	5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Petugas tidak menemukan barang bukti di TKP	1. Penerapan ISO 37001 : 2016 SMAP	Penindakan
56	5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Praperadilan dan kalah	1. Petugas berhati-hati dan teliti dalam membuat administrasi penyidikan	Penindakan
57	5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Petugas Menerima Suap Pada Tahap Penindakan	1. Penerapan ISO 37001 : 2016 SMAP	Penindakan
58	5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Petugas Menjual/ Menggunakan Aset (Barang Bukti)	1. Dibentuk Tim PPBB 2. Penambahan fasilitas gudang barang bukti	Penindakan
59	5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Petugas Melakukan Pemerasan Terhadap Pelaku Kejahatan	1. Penerapan ISO 37001 : 2016 SMAP	Penindakan
60	5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Mark Up Harga Sampel	1. Pembuatan Rekap Pembelian Sampel Sesuai Harga Asli 2. Penerapan ISO 37001 : 2016 SMAP	Penindakan
61	6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja di BBPOM di Semarang	Kemampuan patroli siber petugas kurang mutakhir dibandingkan dengan kejahatan berbasis daring dalam bidang obat dan makanan	1. Meningkatkan kompetensi petugas siber 2. Pengadaan alat pendukung kegiatan siber 3. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Intelijen dan Siber BPOM 4. Pemanfaatan alat khusus untuk siber secara baik	Penindakan
62	6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan	Penyampaian Laporan Cegah Tangkal Tidak Sesuai Timeline	1. Perencanaan timeline pelaporan cegah tangkal	Penindakan

RENCANA STRATEGIS 2025-2029
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Semarang

No.		Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
		Olahan yang efektif di wilayah kerja di BBPOM di Semarang			
63	7	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	Ketidaknyamanan petugas layanan publik	Koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	TATA USAHA
64	7	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	Sebagian audit sarana dilakukan secara daring	1. Mengajukan revisi anggaran 2. Penetapan standar audit secara luring/daring	Sertifikasi
65	7	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	Petugas tidak dapat memberikan informasi yang memuaskan konsumen	1. Peningkatan kompetensi petugas layanan 2. Monitoring Berkala terhadap kepuasan konsumen melalui survei IKM 3. Menjaga konsistensi pelaksanaan aksi agen perubahan yang mendukung peningkatan indeks kepuasan masyarakat berupa SENTUH BBPOM (Sarana Nyaman dan Terpadu untuk Tuna Netra dan Tuna Rungu di BBPOM), PIJAR MENTARI (Pendampingan Ijin Edar Menuju UMKM Pintar dan Mandiri), STARS (Sample Tracking Alert System), SHARA SEHAN (SHaring InfoRmAsi Tentang Obat dan Pangan SEHat serta AmAN) dan Cerita OMA (Ceriwis Fakta Obat dan Makanan) 4. Monitoring dan Evaluasi bulanan pelaksanaan SENTUH BBPOM, PIJAR MENTARI, STARS, SHARA SEHAN dan Cerita OMA	Infokom
66	7	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	Petugas tidak dapat memberikan informasi yang memuaskan konsumen	1. Peningkatan kompetensi petugas layanan 2. Monitoring Berkala terhadap kepuasan konsumen melalui survei IKM	Infokom
67	7	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	Proses pemberian informasi kurang memuaskan konsumen	Pemberian layanan Melon Manis ulang bagi peserta yang memerlukan	Infokom

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang

No.	Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
68	7	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	Berhentinya seluruh kegiatan operasional perkantoran	Pemeliharaan genset tiap tahun	TATA USAHA
69	7	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	Petugas menerima hadiah atas layanan informasi yang sudah diberikan dan memuaskan konsumen	1. Penandatanganan Pakta Integritas oleh petugas 2. Pelaporan melalui saluran Laporka Balai	Infokom
70	7	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	Pelaku usaha kesulitan dalam memahami alur pengajuan proses sertifikasi dalam rangka perijinan sehingga berkas yang diajukan tidak sesuai	Melakukan bimtek kepada pelaku usaha terkait update peraturan terbaru tentang proses sertifikasi	Sertifikasi
71	7	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	Pelanggan kesulitan memahami survei IKM yang dilakukan	Pendampingan kepada responden	Sertifikasi
72	7	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	Petugas tidak dapat segera mengevaluasi pengajuan permohonan sertifikasi/CAPA yang masuk	Monitoring history pengajuan dari sistem	Sertifikasi
73	7	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	Adanya pemberian gratifikasi dari pelaku usaha kepada petugas agar hasil audit memenuhi kriteria untuk direkomendasikan	1. Whistle Blower System 2. Mencantumkan "Mohon tidak memberikan gratifikasi kepada petugas, dukung kami menciptakan clean government" pada surat tugas 3. Saluran pengaduan langsung ke Kepala Balai yang dicantumkan pada mobil operasional	Sertifikasi
74	7	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	Petugas tidak dapat memberikan layanan informasi sesuai jadwal layanan yang disepakati antara BBPOM Di Semarang dan MPP	1. Pengaturan jadwal layanan di MPP 2. Memberikan layanan informasi melalui online	Infokom
75	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Penetapan target IKU tidak sesuai baseline kemampuan UPT	1. Monitoring dan evaluasi capaian IKU 2. Reviu target	TATA USAHA
76	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Rencana tindak lanjut kurang spesifik dan/atau relevan terhadap	Monitoring dan Evaluasi RAPK tiap bulan	TATA USAHA

No.	Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
			kendala yang telah diidentifikasi		
77	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya	1. Monitoring dan evaluasi Kinerja Setiap Bulan (Rapat Bulanan) 2. Reviu target setiap tahun yang ditujukan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan	TATA USAHA
78	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Kecelakaan kerja pegawai yang menyebabkan cedera ringan sampai kematian	1. Penerapan ISO 45001:2018 2. Penyediaan perlengkapan K3 yang memadai. 3. Penunjukan petugas K3 untuk tiap bagian/ substansi 4. Bahan Kimia Berbahaya dan Beracun di tempatkan di lemari reagen dengan susunan yang telah ditetapkan 5. Personel penguji menggunakan APD dengan benar 6. Pemeliharaan Eye Washer dan shower 7. Memasang Fire Alarm di tempat yang telah ditentukan. 8. Memasang APAR di ruangan/ tempat yang telah ditentukan. 9. Tersedianya jalur evakuasi dan titik kumpul 10. Medical Check Up rutin setiap tahun untuk seluruh pegawai 11. Merancang aksi agen perubahan berupa kampanye pentingnya hidup sehat dan penyediaan alat untuk tes kesehatan mandiri bagi pegawai berupa GEMAS (Gerak Maksimal Sehat)) 12. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan GEMAS	TATA USAHA

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang

No.	Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
79	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di bawah Target	1. Rapat Progresif setiap bulan 2. update PoA tiap triwulan 3. Monev PoA 4. Pertemuan awal tahun untuk pembahasan kesepakatan keuangan	TATA USAHA
80	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Daftar Barang Ruangan tidak update	1. Melakukan sensus BMN 2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIMAN mobile	TATA USAHA
81	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Tagihan listrik tidak terbayar	1. Penghematan penggunaan listrik 2. Merancang aksi agen perubahan bertema Go Green Office seperti Bilik Madya (Bijak Listrik Hemat Daya), Conter Green Lab (Conservation Water for Green Laboratory) dan OASIS (Office Actions for environmental Sustainability and Innovative Solutions) 3. Monitoring dan evaluasi bulanan pelaksanaan aksi bertema Go Green Office seperti Bilik Madya, Conter Green Lab dan OASIS	TATA USAHA
82	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Proses registrasi naskah, disposisi surat dan tanda tangan elektronik tidak dapat dilakukan melalui SRIKANDI	1. Proses disposisi dan tanda tangan dilakukan secara manual atau melalui aplikasi SIKD 2. Pengiriman surat keluar melalui SIKD dan email	TATA USAHA
83	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Pengadaan persediaan tidak sesuai kebutuhan	1. Meningkatkan koordinasi antara petugas pengelola BMN dengan panitia pengadaan 2. Verifikasi bertingkat pada proses pengadaan	TATA USAHA
84	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai dimensi kompetensi tidak dapat terpenuhi	1. Menyusun MPH yang lebih tajam dalam mendukung penilaian kinerja oleh Kepala Balai 2. Melakukan edukasi kepada ketua tim kerja terkait pelaksanaan bimbingan	TATA USAHA

RENCANA STRATEGIS 2025-2029
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Semarang

No.	Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
				kinerja, pendekatan variabel aspek capaian (Kuantitas / Kualitas / Waktu) dan penilaian SKP (Kinerja dan Perilaku Kerja) yang lebih objektif	
85	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai paket pengadaan tidak sesuai dengan yang diumumkan pada SIRUP	Update data dari SAKTI ke SIRUP	TATA USAHA
86	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Penggelembungan anggaran	Desk antara PPK dengan penyelenggara kegiatan	TATA USAHA
87	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Tamu mengalami kecelakaan kerja di lingkungan kantor Balai Besar POM di Semarang	Pemilihan penyedia jasa yang sudah menerapkan K3	TATA USAHA
88	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Selisih antara data pada kartu stok dan fisik persediaan	1. Mencatat permintaan barang pada formulir Surat Permintaan Barang (SPB) dan mencatat barang keluar pada formulir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) 2. Monev pemutahiran data persediaan tiap bulan	TATA USAHA
89	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Operator persediaan tidak dapat menginput barang masuk dan keluar pada aplikasi SAKTI	Pemberian kode pada pencatatan kartu stok untuk pengadaan barang secara termin	TATA USAHA
90	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Penumpukan arsip pada unit pengolah atau substansi pencipta arsip	1. Membentuk tim pengelola arsip yang berasal dari tiap substansi 2. Pemindahan arsip dilakukan setiap tahun	TATA USAHA
91	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Realisasi Anggaran Pagu Minus	1. Monitoring penganggaran melalui SAKTI 2. Rekonsiliasi data pengelola anggaran di masing-masing bidang dengan bagian keuangan secara berkala	TATA USAHA
92	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Data sampel tidak sesuai dengan yang dikirim	Membuat pengaduan melalui helpdesk Pusdatin	TATA USAHA

RENCANA STRATEGIS 2025-2029
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Semarang

No.	Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
93	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Laporan kendala penggunaan SIPT tidak direspon dengan cepat oleh admin pusat	1. Melaporkan ke Admin SIPT Pusat melalui WA Group 2. Membuat pengaduan melalui helpdesk Pusdatin	TATA USAHA
94	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Adanya konflik kepentingan antara petugas dan penyedia barang/jasa	1. Whistle Blower System 2. Saluran pengaduan langsung ke Kepala Balai 3. Penandatanganan pakta Integritas	TATA USAHA
95	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Data absensi pegawai tidak sesuai kenyataan	Muncul pop up peringatan penyalahgunaan device e-presensi yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan	TATA USAHA
96	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	manipulasi saldo persediaan	1. Menandatangani Pakta Integritas 2. Pelaporan Whistle Blower System 3. Stok opname oleh masing masing laboratorium 4. stock opname secara bersama antara bidang pengujian dan TU (rekonsiliasi)	Pengujian
97	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Jadwal Pemeliharaan dan perawatan Air Conditioner belum terkomunikasikan dengan baik	Koordinasi lebih intensif antara Bagian TU dan Bidang Pengujian agar pemeliharaan AC tidak mempengaruhi proses pengujian di laboratorium	Pengujian
98	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Keterlambatan Pendaftaran Kontrak	Monitoring Kontrak oleh PPK	TATA USAHA
99	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Server terkena virus	Melakukan recovery dan backup data pada google drive	TATA USAHA
100	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Petugas menerima suap dari penyedia	1. Whistle Blowing System 2. Penandatanganan Pakta Integritas 3. Pengadaan barang/jasa melalui e-catalog (LPSE)	TATA USAHA

RENCANA STRATEGIS 2025-2029
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Semarang

No.	Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
101	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Adanya kerja sama yang tidak sehat antara pegawai pengadaan dan supplier	1. Serah Terima hasil pengadaan barang/jasa 2. Audit internal secara Berkala 3. Pisah fungsi antara bagian yang melaksanakan pekerjaan dengan yang menerima pekerjaan 4. Penandatanganan Pakta integritas	TATA USAHA
102	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Gratifikasi	Sudah dibuat Pakta Integritas untuk Pihak terkait dengan Pengadaan	TATA USAHA
103	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Mensub- kontrakkan seluruh/ sebagian pekerjaan	1. Serah Terima hasil pengadaan barang/jasa 2. Audit internal secara Berkala 3. Pisah fungsi antara bagian yang melaksanakan pekerjaan dengan yang menerima pekerjaan 4. Penandatanganan Pakta integritas	TATA USAHA
104	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Adanya kerja sama yang tidak sehat antara pejabat pengadaan dengan supplier	1. Pelaporan Whistle Blower System (WBS) melalui Sang Integritas 2. Pengaduan penyimpangan melalui kanal Lapor Kabalai	TATA USAHA
105	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Kesengajaan untuk mengganti barang	1. Adendum kontrak ditandatangani oleh PPK setelah melalui mekanisme rapat koordinasi 2. Memastikan bahwa spesifikasi yang ada di addendum kontrak sama dengan barang yang akan diterima	TATA USAHA
106	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Adanya kerja sama yang tidak sehat antara pegawai pengadaan supplier	1. Whistle Blowing System 2. Penandatanganan Pakta Integritas 3. Pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai Peraturan tentang Pengadaan Barang Dan Jasa	TATA USAHA
107	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Pengaturan permintaan penawaran harga barang/jasa	Penyedia wajib membuat Pakta Integritas sebelum proses pengadaan	TATA USAHA

RENCANA STRATEGIS 2025-2029
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Semarang

No.	Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
108	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Pemecahan paket pengadaan barang/jasa	Desk Anggaran antara PPK dan user (substansi)	TATA USAHA
109	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Penyalahgunaan wewenang oleh KPA/PPK	1. Sosialisasi SBM dan juklak anggaran 2. Kesepakatan pertanggungjawaban keuangan di awal tahun	TATA USAHA
110	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Manipulasi hasil uji Laboratorium	1. Penandatanganan Pakta Integritas 2. Pengecekan secara berjenjang 3. Audit penerapan sistem mutu 17025	Pengujian
111	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Terjadi penyuapan kepada pegawai	1. Sistem Pelaporan Suap (WBS) melalui Sangintegritas dan inovasi Lapor Ka Balai Secara Langsung 2. Pelaporan LHKPN/ LHKASN 3. Penandatanganan pakta integritas 4. RTM ISO 37001 2016 5. Merancang aksi agen perubahan berupa edukasi pencegahan tindak pidana korupsi berupa FOSIL ANTIK SIP (Infografis Lengkap Anti Korupsi Seru, Inovatif dan Presisi) 6. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan FOSIL ANTIK SIP	TATA USAHA
112	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	BMN digunakan untuk kepentingan pribadi	1. Sensus BMN 5 tahun sekali 2. Inventarisasi berkala per tahun 3. Serah terima BMN dari TU ke pengguna barang	TATA USAHA
113	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Deviasi halaman 3 DIPA tinggi	Update POA untuk penetapan Rencana Penarikann Dana (RPD)	TATA USAHA

No.	Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
114	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Potongan harga yang tidak dilaporkan	1. Penyelenggaraan paket meeting dilakukan sesuai Peraturan tentang Pengadaan Barang Dan Jasa 2. Penetapan spesifikasi paket meeting 3. Penandatanganan Pakta Integritas 4. WBS	TATA USAHA
115	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Penunjukan penyedia barang/jasa tidak objektif	1. Pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai Peraturan tentang Pengadaan Barang Dan Jasa 2. Penandatanganan Pakta Integritas 3. WBS 4. Pelaporan benturan kepentingan setiap triwulan	TATA USAHA
116	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Mark up harga	1. Pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai Peraturan tentang Pengadaan Barang Dan Jasa 2. Penandatanganan Pakta Integritas 3. WBS	TATA USAHA
117	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Pembelian Fiktif	1. Whistle Blower System 2. Pengecekan barang oleh pembantu PPK 3. Pengecekan pertanggungjawaban keuangan secara berjenjang oleh verifikator, PPK, dan bendahara	TATA USAHA
118	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Mark up harga pembelian konsumsi, fotokopi dan sejenisnya	1. Whistle Blower System 2. Pengecekan pertanggungjawab an keuangan secara berjenjang oleh verifikator, PPK, dan penandatanganan SPM 3. Koreksi bertingkat 4. Pengecekan internal bidang terkait data dukung oleh penanggungjawab keuangan 5. Audit secara berkala oleh Inspektorat	TATA USAHA

RENCANA STRATEGIS 2025-2029
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Semarang

No.	Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
119	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	markup jumlah barang/jasa yang dibeli	1. Pelaporan Whistle Blower System 2. Pengecekan internal bidang terkait data dukung oleh penanggungjawab keuangan 3. Pengecekan pertanggungjawab an keuangan secara berjenjang oleh verifikator, PPK, dan penandatanganan SPM	Pengujian
120	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Pemilihan rekanan/penyedia tertentu karena hubungan baik	1. Penandatanganan Pakta Integritas 2. pelaporan Whistle Blower System 3. Pengawasan secara berjenjang terhadap dokumen pengadaan	Pengujian
121	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Pemilihan rekanan/penyedia tertentu dengan menerima imbalan	1. Penandatanganan Pakta Integritas 2. pelaporan Whistle Blower System 3. Pengawasan secara berjenjang terhadap dokumen pengadaan	Pengujian
122	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Manipulasi Hasil uji Laboratorium	1. Penandatanganan Pakta Integritas 2. Pengecekan Laporan Catatan Pengujian secara berjenjang 3. Audit penerapan sistem mutu 17025	Pengujian
123	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Petugas menerima suap dari pelaku usaha	1. Penandatanganan Pakta Integritas 2. Pelaporan Whistle Blower System 3. Penyediaan Saluran pengaduan langsung ke Kepala Balai 4. Koreksi bertingkat Laporan Catatan Pengujian 5. Audit penerapan sistem mutu 17025 dan 37001	Pengujian
124	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Manipulasi Hasil uji Laboratorium	1. Penandatanganan Pakta Integritas (soft control) 2. Pelaporan Whistle Blower System 3. koreksi bertingkat Laporan	Pengujian

RENCANA STRATEGIS 2025-2029
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Semarang

No.	Sasaran Kegiatan		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
				Catatan Pengujian 4.Audit penerapan sistem mutu 17025	
125	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Gratifikasi Pengujian Sampel	1. Penandatanganan Pakta Integritas 2. Pelaporan Whistle Blower System 3. Penyediaan Saluran pengaduan langsung ke Kepala Balai 4. Koreksi bertingkat Laporan Catatan Pengujian 5.Audit penerapan sistem mutu 17025 dan 37001	Pengujian
126	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Kebocoran AC pasca perawatan/pembersihan AC	1. Koordinasi lebih intensif antara Bagian TU, Penanggungjawab Ruangan dan Pihak ketiga. 2. Pelaporan kondisi pasca pemeliharaan AC	Pengujian
127	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Indeks BerAKHLAK mengalami penurunan dari tahun sebelumnya	1. Merancang aksi agen perubahan berupa Padi Manis (Paparan & Diseminasi Manajemen Perubahan di hari Kamis), English Fun Day 2. Melakukan monitoring dan evaluasi bulanan pelaksanaan Padi Manis dan English Fun Day	TATA USAHA (POKJA 1)
128	8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Dugaan keterlibatan transaksi perjudian online	1. Whistle Blowing System 2. Sosialisasi terkait bahaya judi online 3. Klarifikasi dugaan keterlibatan transaksi judi online	TATA USAHA

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi

kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.

3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.

5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.

6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 8 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>post market</i> sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan Offline	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai Besar POM di Semarang juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Semarang

Untuk mendukung Agenda pembangunan Transformasi Sosial di bidang Kesehatan serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BBPOM di Semarang periode 2025-2029, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah kebijakan BBPOM di Semarang 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Pengawasan Pre-Postmarket dengan Mendorong Inovasi untuk Mengantisipasi Ancaman Keamanan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

BBPOM di Semarang terus meningkatkan efektivitas pengawasan pre dan postmarket terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mendorong inovasi dalam setiap lini pengawasan. Inovasi dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital, pengembangan metode uji terbaru, serta peningkatan pengawasan berbasis risiko untuk mengantisipasi munculnya ancaman keamanan yang semakin kompleks. Upaya ini menjadi kunci dalam memastikan produk yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan bermanfaat.

2. Penguatan Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Mengedepankan Pencegahan/Deteksi Kejahatan pada Peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara Online dan Offline

BBPOM di Semarang memperkuat aspek penindakan terhadap kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dengan pendekatan pencegahan dan deteksi dini. Fokus diarahkan pada pemantauan dan penelusuran aktivitas ilegal, baik secara online melalui platform digital maupun secara offline di lapangan. Pendekatan ini didukung oleh kolaborasi intensif dengan aparat penegak hukum, penguatan intelijen pengawasan, serta peningkatan kemampuan patroli siber guna mencegah kerugian masyarakat akibat peredaran produk ilegal.

3. Peningkatan Regulatory Assistance dan Pendampingan Pelaku Usaha dengan Keberpihakan pada UMKM

Sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan usaha lokal, BBPOM di Semarang berkomitmen meningkatkan layanan pendampingan dan bimbingan regulatori kepada pelaku usaha, khususnya UMKM. Upaya ini diwujudkan melalui fasilitasi sertifikasi, pelatihan produksi yang sesuai dengan standar, serta pemberian kemudahan akses terhadap informasi peraturan. Dengan keberpihakan terhadap UMKM, BBPOM turut mendorong peningkatan daya saing produk lokal dan memperluas akses pasar yang aman dan legal.

4. Peningkatan Kesadaran serta Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

BBPOM di Semarang menyadari pentingnya peran serta masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu, berbagai program edukasi dan pemberdayaan terus digencarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan produk obat dan makanan. Melalui pelibatan tokoh masyarakat, kader pengawasan, serta pemanfaatan media sosial dan forum interaktif, partisipasi publik semakin diperkuat dalam menciptakan ekosistem pengawasan yang kolaboratif dan berkelanjutan.

5. Peningkatan Kolaborasi dan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan Dalam dan Luar Negeri di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

BBPOM di Semarang aktif menjalin sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari dalam maupun luar negeri. Kolaborasi ini mencakup peningkatan pertukaran data dan informasi, koordinasi lintas sektor, dan kerja sama dalam penguatan kapasitas pengawasan. Dengan kerja sama strategis ini, diharapkan pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan dapat semakin adaptif terhadap dinamika global dan mampu menjawab tantangan lintas batas.

6. Peningkatan Kapasitas SDM, Kualitas Pengujian Laboratorium, Analisis Kebijakan, dan Transformasi Digital dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Untuk memastikan pengawasan yang unggul dan responsif, BBPOM di Semarang terus memperkuat kapasitas SDM, laboratorium, serta sistem pendukung lainnya. Kegiatan ini mencakup pelatihan teknis, sertifikasi laboratorium, peningkatan metode uji, serta penggunaan teknologi digital dalam proses pengawasan. Di sisi lain, analisis kebijakan berbasis data juga dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan evidence-based.

7. Penguatan Dukungan Manajemen di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Pengawasan yang efektif memerlukan dukungan manajemen yang solid. BBPOM di Semarang mengoptimalkan pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung guna memastikan keberhasilan program pengawasan. Penguatan dilakukan melalui tata kelola yang transparan, sistem pelaporan kinerja yang terukur, serta penguatan akuntabilitas internal. Hal ini menjadi pondasi dalam menjaga konsistensi mutu layanan dan pencapaian sasaran strategis secara berkelanjutan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BBPOM di Semarang melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:

1. Penguatan Pengawasan yang Komprehensif (*Full Spectrum*) Berbasis Risiko serta Penguatan *Networking*/Kerja Sama Lintas Sektor dan Kelembagaan BBPOM di Semarang demi Terwujudnya Pengawasan Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu

BBPOM di Semarang mengembangkan pendekatan pengawasan yang komprehensif mencakup seluruh siklus hidup produk (*full spectrum*) dari pre-market hingga post-market. Strategi ini berbasis pada analisis risiko guna memfokuskan sumber daya pengawasan secara efektif terhadap produk, pelaku, atau wilayah berisiko tinggi. Dalam mendukung keberhasilan pengawasan, BBPOM di Semarang juga memperkuat jejaring kemitraan lintas sektor dan kelembagaan, baik di tingkat pusat, daerah, hingga komunitas, guna menciptakan sinergi yang solid dan berkelanjutan dalam menjaga mutu serta keamanan obat dan makanan.

Strategi yang akan dilakukan kedepannya yaitu dengan meningkatkan kolaborasi pengawasan obat dan makanan Bersama TKPPOM di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

2. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi dengan Digitalisasi Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan dan Harapan Masyarakat terhadap Kinerja BBPOM di Semarang

BBPOM di Semarang terus melanjutkan agenda Reformasi Birokrasi secara konsisten, terutama dalam peningkatan kualitas layanan publik yang berbasis digital. Upaya ini mencakup simplifikasi prosedur layanan, pemanfaatan sistem informasi daring, serta penerapan standar pelayanan yang transparan dan akuntabel. Tujuannya adalah agar pelayanan BBPOM menjadi lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan serta ekspektasi masyarakat, sekaligus mendukung prinsip pemerintahan yang bersih dan melayani.

Strategi yang akan dilakukan kedepannya yaitu dengan pengembangan dan penguatan digitalisasi pelayanan publik secara online sesuai standar pelayanan publik di BBPOM di Semarang.

3. Optimalisasi Pemanfaatan TIK, Riset, dan Kajian, Pengujian, serta Database Pengawasan Obat dan Makanan

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), riset ilmiah, serta penguatan sistem data menjadi pilar utama dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti. BBPOM di Semarang mengoptimalkan penggunaan TIK untuk mendukung efektivitas proses pengawasan, mempercepat alur pengujian laboratorium, serta membangun database terpadu yang akurat dan dapat ditelusur. Sinergi antara hasil kajian ilmiah dan sistem informasi ini mendorong pengawasan yang lebih presisi dan adaptif terhadap perubahan tren risiko.

Strategi yang akan dilakukan kedepannya yaitu dengan digitalisasi dokumen hasil uji laboratorium BBPOM di Semarang.

4. Intensifikasi Penindakan dalam Rangka Penegakan Hukum terhadap Obat dan Makanan melalui Perkuatan Kemitraan dengan Institusi Penegakan Hukum dan Peningkatan Kompetensi Pegawai terkait Pengawasan Cyber Crime Peredaran Obat dan Makanan secara Online

BBPOM di Semarang menegaskan komitmennya dalam memberantas pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan melalui intensifikasi penindakan, baik secara fisik di lapangan maupun di ruang digital. Fokus diarahkan pada penguatan kerja sama dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya. Selain itu, kompetensi internal pegawai juga ditingkatkan, khususnya dalam pengawasan *cyber crime* yang berkaitan dengan peredaran produk ilegal secara daring (*online surveillance*), guna memastikan penegakan hukum berjalan efektif dan terukur.

Strategi yang akan dilakukan kedepannya yaitu dengan terus meningkatkan hubungan kemitraan dengan Institusi penegak hukum lain. Selain itu, akan ditingkatkan hubungan dengan institusi selain penegak hukum dan juga masyarakat yang dapat mengambil peran sebagai sumber informasi di daerah apabila terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.

Pengawasan Cyber Crime juga ditingkatkan dengan meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan-pelatihan *e commerce* agar dapat mengungkap modus-modus baru yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

5. Optimalisasi Pengelolaan SDM, Sarana Prasarana, Laboratorium, serta Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Alokasi dan Penggunaan Anggaran

Penguatan internal organisasi menjadi landasan utama bagi pencapaian kinerja BBPOM di Semarang. Optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia dilakukan melalui pengembangan kompetensi, penguatan budaya kerja, dan sistem evaluasi kinerja yang

akuntabel. Di sisi lain, sarana dan prasarana termasuk laboratorium terus ditingkatkan kapasitasnya guna mendukung pengujian yang andal dan akurat. Seluruh proses ini didukung dengan manajemen anggaran yang efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil (*value for money*).

Strategi yang akan dilakukan kedepannya yaitu dengan mengoptimalkan implementasi Regionalisasi Laboratorium di Region Semarang, melalui:

1. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup Laboratorium
2. Pemenuhan Standar Kompetensi Personel
3. Pemenuhan Standar Peralatan Laboratorium
4. Pemenuhan Standar Metode Analisa Terverifikasi

6. Tetap Terus Berupaya Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang Obat dan Makanan dalam Menghadapi VUCA (Bu novi infokom)

Dalam menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian (VUCA: *Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*), BPOM di Semarang menaruh perhatian besar terhadap peningkatan literasi masyarakat. Program edukasi publik dikembangkan secara kreatif dan adaptif melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial, kampanye langsung, dan kerja sama dengan komunitas. Tujuannya adalah membekali masyarakat dengan pengetahuan yang memadai agar mampu memilih, menggunakan, dan menyebarkan informasi yang benar terkait obat dan makanan yang aman dan bermutu.

Strategi yang akan dilakukan kedepannya yaitu dengan memiliki saluran komunikasi publik eksternal dan internal yang dikelola dengan baik

Strategi dan saluran komunikasi publik, baik eksternal maupun internal, memegang peranan krusial dalam meningkatkan efektivitas penyampaian informasi dan membangun kepercayaan publik terhadap BPOM. Strategi komunikasi publik yang diterapkan oleh BPOM mengedepankan pendekatan berbasis data ilmiah (*scientific-based*), yang bersumber dari hasil pengawasan obat dan makanan secara rutin maupun insidental.

Strategi ini telah dituangkan secara baku dalam Pedoman Strategi Komunikasi Publik yang menjadi rujukan dalam setiap publikasi informasi kepada masyarakat. Dalam situasi tertentu, BPOM juga menerapkan pedoman komunikasi krisis, yang dirancang untuk menghadapi isu-isu sensitif di bidang pengawasan obat dan makanan yang menjadi perhatian publik luas.

Prinsip dasar komunikasi publik yang diterapkan BPOM meliputi transparansi, edukasi, dan keterlibatan masyarakat. Transparansi diwujudkan dalam bentuk rilis resmi hasil pengawasan yang disampaikan melalui siaran pers, peringatan publik, berita aktual, maupun konten informasi lainnya. Untuk meningkatkan literasi masyarakat, BPOM secara konsisten menyelenggarakan edukasi publik, salah satunya melalui kampanye nasional “Cek KLIK” (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) guna mendorong masyarakat menjadi konsumen yang cerdas dan kritis.

Penyebaran informasi dilakukan secara masif dan real-time melalui kanal digital seperti situs web resmi, media sosial (Instagram, Facebook, Twitter/X, YouTube, dan TikTok), serta aplikasi mobile “BPOM Mobile”. Di tingkat UPT, BBPOM di Semarang juga secara aktif memanfaatkan owned media untuk memperkuat orkestrasi dan amplifikasi pesan-pesan pengawasan obat dan makanan aman kepada publik.

Selain itu, media massa (cetak, online, dan elektronik) tetap menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat melalui mekanisme media relations. Di wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses digital, BPOM tetap mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung, termasuk penyuluhan kepada komunitas lokal, pelajar, kader kesehatan, dan pelaku usaha.

Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi bagian penting dari strategi komunikasi BPOM. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan maupun laporan pelanggaran obat dan makanan melalui saluran publik seperti:

- Nomor layanan pengaduan: 0812-2569-4252
- WA Lapor ke Kepala Balai: 0811-1841-911

Respons cepat terhadap laporan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap BPOM sebagai lembaga pengawas yang responsif dan terbuka.

Melalui keterlibatan masyarakat, BPOM membangun sistem pengawasan kolaboratif tiga lapis, yaitu: pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, yang saling menguatkan dalam menjamin keamanan dan mutu produk obat dan makanan di pasaran.

Secara keseluruhan, strategi dan saluran komunikasi publik yang diterapkan BPOM menunjukkan upaya yang terintegrasi antara pengawasan, edukasi, dan pelibatan masyarakat. Keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis lembaga, tetapi juga pada efektivitas komunikasi publik yang terbuka, partisipatif, dan berkelanjutan.

7. Intensifikasi Pembinaan dan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha untuk Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Obat dan Makanan dengan Menekankan Inovasi

BBPOM di Semarang terus memperluas jangkauan pembinaan kepada pelaku usaha, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan, kualitas produk, dan daya saing di pasar. Pendekatan yang digunakan adalah bimbingan teknis berbasis kebutuhan dan berbasis risiko, dengan penekanan pada pentingnya riset dan inovasi dalam proses produksi. Dukungan ini diharapkan mampu mendorong pelaku usaha, terutama UMKM, untuk naik kelas serta mampu memenuhi standar keamanan dan mutu yang berlaku baik di pasar domestik maupun global.

Strategi yang akan dilakukan kedepannya yaitu dengan intensifikasi pelaksanaan inovasi PIJAR MENTARI yang terdiri dari SOS, Melon Manis, dan Lakone Sekti.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai POM di Semarang juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial. Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai Besar POM di Semarang melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana BPOM.

1. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia, meliputi:

- a. Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
Program ini memastikan regulasi, standar, dan kebijakan pengawasan selalu mutakhir sehingga seluruh proses pengawasan berjalan seragam dan terarah di seluruh Indonesia.
- b. Pemeriksaan dan Sampling Produk
Melalui inspeksi sarana serta pengambilan sampel rutin maupun terbatas, program ini mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini sebelum produk bermasalah beredar luas.
- c. Pengujian Laboratorium
Laboratorium BPOM di daerah melakukan pengujian keamanan, mutu, dan gizi yang menjadi dasar ilmiah untuk setiap keputusan pengawasan dan tindak lanjut hukum.
- d. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
Program ini meningkatkan literasi masyarakat agar lebih cerdas memilih produk yang aman, sekaligus memperkuat peran komunitas sebagai bagian dari ekosistem pengawasan.
- e. Penindakan dan Intelijen Obat dan Makanan
Melakukan operasi, penelusuran, dan penindakan terhadap pelanggaran serius seperti produk ilegal, palsu, atau mengandung bahan berbahaya, bekerja sama dengan lintas sektor.
- f. Transformasi Digital Pengawasan
Berbagai aplikasi dan sistem informasi terintegrasi mempermudah pelaksanaan pengawasan, meningkatkan transparansi data, serta mempercepat respons terhadap risiko.
- g. Penguatan SDM dan Tata Kelola
Melalui pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, serta penguatan manajemen internal, program ini memastikan pengawas memiliki kapasitas yang memadai dan tata kelola berjalan efektif.
- h. Kemitraan dan Kolaborasi Pengawasan
Sinergi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, maupun organisasi internasional memperluas jangkauan pengawasan dan meningkatkan efektivitas pengendalian risiko.
- i. Pengawasan Pre Market & Post Market
Pada tahap pre-market dilakukan evaluasi keamanan sebelum izin edar diberikan, sedangkan post-market memantau kepatuhan produk yang sudah beredar di masyarakat.
- j. Pemberdayaan Pelaku Usaha

Program ini membantu industri—terutama UMK—memahami standar keamanan pangan/produk dan memenuhi persyaratan produksi sehingga tercipta rantai pasok yang lebih aman.

2. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM meliputi:

- a. Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Operasional
Meliputi perawatan rutin, perbaikan gedung, ruang kerja, ruang pelayanan publik, serta seluruh fasilitas pendukung untuk memastikan kelayakan operasional, kenyamanan, dan keamanan lingkungan kerja.
- b. Pengelolaan Laboratorium dan Peralatan Pengujian
Termasuk kegiatan kalibrasi, pemeliharaan berkala, penggantian peralatan yang rusak, serta peningkatan sarana laboratorium guna menjamin keandalan operasional dan mutu hasil pengujian.
- c. Pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional
Mencakup pemeliharaan kendaraan, pengawasan penggunaan, penjadwalan servis, serta optimalisasi armada untuk mendukung kegiatan inspeksi dan operasional lapangan secara efisien.
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana
Dilaksanakan berdasarkan prioritas kebutuhan organisasi, meliputi pengadaan peralatan laboratorium, perangkat TIK, furnitur, dan perlengkapan kerja lainnya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan.
- e. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
Meliputi pencatatan, inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan, dan penghapusan BMN sesuai ketentuan yang berlaku untuk memastikan ketertiban administrasi dan akuntabilitas pengelolaan aset.
- f. Pemeliharaan dan Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi
Termasuk perawatan server, jaringan, aplikasi, serta penyediaan perangkat TIK yang mendukung transformasi digital dalam kegiatan pengawasan dan peningkatan kualitas layanan publik.
- g. Pengelolaan Kebersihan, Keamanan, dan Kenyamanan Lingkungan Kantor
Dilaksanakan untuk memastikan lingkungan kerja yang bersih, aman, tertib, dan produktif melalui penyelenggaraan layanan kebersihan, keamanan, serta penataan tata ruang yang optimal.
- h. Pengelolaan Gudang dan Penyimpanan Barang
Mencakup penataan ruang penyimpanan, pengaturan sistem keluar–masuk barang, serta pengawasan stok guna mendukung efisiensi, ketertiban, dan kelancaran logistik organisasi.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan untuk periode 2025–2029, BBPOM di Semarang menyusun matriks kinerja pembangunan sebagai pedoman utama dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran strategis yang selaras dengan visi kelembagaan, serta dilengkapi dengan indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang dirancang untuk memastikan tercapainya perlindungan kesehatan masyarakat secara optimal. Setiap indikator dan target dalam matriks tersebut merepresentasikan capaian akhir yang ingin diraih BBPOM di Semarang dalam lima tahun ke depan. Penegasan atas tujuan utama — yakni menjamin peredaran produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing — menjadi fondasi dari seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, seluruh unit kerja di lingkungan BBPOM di Semarang wajib menjadikan matriks ini sebagai rujukan utama, agar setiap langkah strategis selama periode 2025–2029 benar-benar berkontribusi pada pengawasan yang efektif, pencegahan peredaran produk berisiko, dan penjaminan standar keamanan yang tinggi bagi masyarakat.

Tabel 9 Target Kinerja BBPOM di Semarang

Sasaran Kegiatan		Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia						
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT						
1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,5	92,5	93,5	94,75	96
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30
3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	93	94	95	96

Sasaran Kegiatan		Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86	87	88	89	90
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75	92,5	94,25	95,5	97
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88	90	92	95
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,75	97,63	98,25	98,88	99,5
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	87	90
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	92	93,2	94	94,8
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	92	93	94	95
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	83,2	85,5	87	89,1	90,2
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	3,85	11,54	26,92	42,31	65,38
16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		82	83	84	85
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi						
1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54	57	62	66	71
Meningkatnya efektivitas KIE						
1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,42	87,28	88,15	89,01	89,87

Sasaran Kegiatan		Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	20	25	27	29
3	Jumlah desa pangan aman	6	10	10	10	10
4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	5	5	5	6
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu						
1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	18,44%	37,59%	56,74%	77,30%	98,58%
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT						
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	86,5	88	89,5	91
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT						
1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
Layanan Publik UPT yang prima						
1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9
Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal						
1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	92,43	92,53	92,63	92,83	93
2	Nilai AKIP UPT BPOM	82	82,15	82,3	82,45	83
3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,6	3,7	3,8	3,9	4

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang

Tabel 10 Kerangka Pendanaan BBPOM di Semarang 2025-2029 Berdasarkan Program

Program	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	53,902.53	59,316.42	64,711.40	70,104.02	75,496.63
Total	53,902.53	59,316.42	64,711.40	70,104.02	75,496.63

Tabel 11 Kerangka Pendanaan BBPOM di Semarang 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	51,223.00	56,367.76	61,494.55	66,619.10	71,743.65
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2,680.00	2,949.18	3,217.41	3,485.53	3,753.65
Total	53,902.53	59,316.42	64,711.40	70,104.02	75,496.63

BAB V **PENUTUP**

5.1 Kesimpulan

Rencana lima tahun ke depan menjadi pijakan penting bagi BBPOM di Semarang dalam mewujudkan visi pengawasan obat dan makanan yang semakin efektif, adaptif, dan berintegritas tinggi. Seluruh arah kebijakan dan program dirumuskan untuk mendukung misi organisasi dalam memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan akses informasi bagi masyarakat, serta memastikan perlindungan konsumen yang berkelanjutan. Dengan demikian, keseluruhan perencanaan diarahkan agar mampu menjawab dinamika perkembangan industri farmasi dan pangan, perubahan perilaku konsumen, serta tantangan global dalam keamanan produk.

Dalam kerangka tujuan jangka menengah, BBPOM di Semarang menetapkan fokus pada peningkatan mutu layanan publik, penguatan kelembagaan, serta perluasan cakupan pengawasan berbasis risiko. Upaya ini diwujudkan melalui optimalisasi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi proses, serta keharmonisan hubungan koordinatif dengan pemangku kepentingan daerah. Pendekatan ini menjadi modal strategis untuk memastikan setiap kebijakan mampu memberikan dampak nyata terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Arah kebijakan lima tahun mendatang juga menempatkan strategi kolaboratif sebagai landasan utama penguatan ekosistem pengawasan. Hal ini mencakup intensifikasi program komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE); penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan dunia usaha; serta peningkatan kapasitas laboratorium dan sarana operasional. Strategi tersebut diharapkan mampu mempercepat pencapaian target kinerja serta memperkuat kehadiran BBPOM di Semarang sebagai institusi pengawas yang responsif dan terpercaya.

Secara menyeluruh, Renstra 2025–2029 ini memberikan arah pembangunan organisasi yang lebih terukur, terarah, dan berorientasi hasil. Penyusunan kebijakan dan strategi dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja sebelumnya, evaluasi kelemahan serta potensi perbaikan, serta proyeksi kebutuhan pengawasan di masa mendatang. Dengan komitmen dan sinergi seluruh pegawai, BBPOM di Semarang diyakini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan perlindungan masyarakat dalam lima tahun ke depan.

5.2 Saran

Ke depan, untuk memperkuat efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah Jawa Tengah khususnya wilayah kerja BBPOM di Semarang, diperlukan akselerasi pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap proses pengawasan, mulai dari perencanaan, inspeksi,

pengujian, hingga pelaporan. Integrasi sistem digital yang lebih kuat akan meningkatkan kecepatan respons, akurasi data, serta kemampuan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran. Selain itu, kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah, dinas teknis, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha perlu terus diperluas guna menciptakan ekosistem pengawasan yang lebih solid dan sinergis di seluruh kabupaten/kota cakupan pengawasan.

Di samping itu, penguatan kapasitas SDM secara berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan kesiapan organisasi dalam menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks. Evaluasi kinerja perlu dilakukan secara lebih mendalam dan terfokus pada karakteristik wilayah, sehingga rekomendasi perbaikan dapat diimplementasikan secara tepat sasaran serta mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas pengawasan di lapangan. Dengan langkah ini, BBPOM di Semarang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang semakin nyata dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat obat dan makanan bagi masyarakat Jawa Tengah.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR/BALAI/LOKA POM TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Balai Besar/Balai/Loka POM di Semarang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

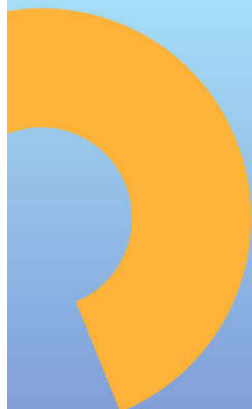
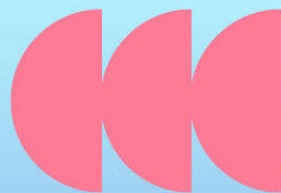
Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
			Target					Alokasi						
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	16 Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Semarang		82	83	84	85							UPT BPOM
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	BBPOM di Semarang	90	90	100	110	120		80,30	88,33	96,36	104,39	112,42	UPT BPOM
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	BBPOM di Semarang	699	699	699	733	733		626,94	689,63	752,33	815,02	877,71	UPT BPOM
	RO 3: Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai standar oleh UPT	BBPOM di Semarang	1492	1504	1560	1619	1683		1.185,44	1.303,99	1.422,53	1.541,07	1.659,62	UPT BPOM
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	BBPOM di Semarang	199	244	271	297	325		263,42	289,76	316,11	342,45	368,79	UPT BPOM
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	BBPOM di Semarang	656	722	774	831	893		1.301,00	1.431,10	1.561,20	1.691,30	1.821,40	UPT BPOM
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM	BBPOM di Semarang	0	204	224	244	264			23,64	28,36	30,73	33,09	UPT BPOM
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	BBPOM di Semarang	2	2	2	2	2		2.100,00	2.310,00	2.520,00	2.730,00	2.940,00	UPT BPOM
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	BBPOM di Semarang	1	1	1	1	1		3.358,91	3.694,80	4.030,69	4.366,58	4.702,47	UPT BPOM
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	BBPOM di Semarang	1	1	1	1	1		4.171,68	4.588,84	5.006,01	5.423,18	5.840,35	UPT BPOM
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar	BBPOM di Semarang	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UPT BPOM
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi													UPT BPOM
	1 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Semarang	54	57	62	66	71							UPT BPOM
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	BBPOM di Semarang	58	61	66	71	76		88,20	97,01	105,83	114,65	123,47	UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas KIE													UPT BPOM
	1 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	BBPOM di Semarang	86,42	87,28	88,15	89,01	89,87							UPT BPOM
	2 Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	BBPOM di Semarang	20	20	25	27	29							UPT BPOM
	3 Jumlah desa pangan aman	BBPOM di Semarang	6	10	10	10	10							UPT BPOM
	4 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	BBPOM di Semarang	1	5	5	5	6							UPT BPOM
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	BBPOM di Semarang	55958	56300	56400	56520	56664		16.954,07	18.649,48	20.344,88	22.040,29	23.735,70	UPT BPOM, Dit. PMPU OTSKK, & Dit. PMPU Pangan Olahan
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	BBPOM di Semarang	45	46	48	50	52		100,95	111,05	121,14	131,24	141,33	UPT BPOM
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	BBPOM di Semarang	20	20	25	27	29		653,58	718,94	784,29	849,65	915,01	UPT BPOM
	RO 4: Desa Pangan Aman	BBPOM di Semarang	6	10	10	10	10		1.308,91	1.439,80	1.570,69	1.701,59	1.832,48	UPT BPOM
			Dokumen ini telah difandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik											

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	BBPOM di Semarang	1	5	5	5	6		130,78	143,85	156,93	170,01	183,09	UPT BPOM
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu													UPT BPOM
	1 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB pangan olahan	BBPOM di Semarang	18,44%	37,59%	56,74%	77,30%	98,58%							UPT BPOM
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	BBPOM di Semarang	26	27	27	30	31		97,72	107,49	117,27	127,04	136,81	UPT BPOM
	Tertaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													UPT BPOM
	1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	BBPOM di Semarang	85	86,5	88	89,5	91							UPT BPOM
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	BBPOM di Semarang	7	8	8	9	10		813,88	895,26	976,65	1.058,04	1.139,43	UPT BPOM
	Tertaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													UPT BPOM
	1 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	BBPOM di Semarang	90	91	92	93	94							UPT BPOM
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	BBPOM di Semarang	14	14	15	15	15		122,17	134,38	146,60	158,82	171,03	UPT BPOM
	Layanan Publik UPT yang prima													UPT BPOM
	1 Indeks Pelayanan Publik UPT	BBPOM di Semarang	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9							UPT BPOM
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	BBPOM di Semarang	2935	5081	5087	5102	5090		688,35	757,19	826,02	894,86	963,70	UPT BPOM
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal													UPT BPOM
	1 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	BBPOM di Semarang	92,43	92,53	92,63	92,83	93							UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	2 Nilai AKIP UPT BPOM	BBPOM di Semarang	82	82,15	82,3	82,45	83							UPT BPOM
	3 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	BBPOM di Semarang	5	5	5	5	5							UPT BPOM
	4 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	BBPOM di Semarang	3,6	3,7	3,8	3,9	4							UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	BBPOM di Semarang	1	1	1	1	1		721,00	793,10	865,20	937,30	1.009,40	UPT BPOM dan Deputi 1,2,3,4
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	BBPOM di Semarang	5	5	5	5	5		139,00	152,90	166,80	180,70	194,60	UPT BPOM
	RO 3: Perangkat pengolahan data dan komunikasi	BBPOM di Semarang	11	11	11	11	11		100,00	110,00	120,00	130,00	140,00	UPT BPOM
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM									18.896,24	20.785,87	22.675,49	24.565,11	26.454,74	UPT BPOM
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal"	BBPOM di Semarang	1	1	1	1	1		8,00	8,80	9,60	10,40	11,20	UPT BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal"	BBPOM di Semarang	1	1	1	1	1	18.888,24	20.777,07	22.665,89	24.554,71	26.443,54	UPT BPOM



LAYANAN BALAI BESAR POM DI SEMARANG

Informasi 081225694252 | Sertifikasi 081227701941

Pengujian 081326759688 | Kantor 024 - 7612324

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

